

VOL 4 NO 3 MEI-JUNI 2019

LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

MAJALAH DWI BULANAN

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

MEMBANGUN
CARA PANDANG KOLABORASI

GELIAT PAYAKUMBUH
TANGANI SAMPAH

MEDIA BPP

J E N D E L A I T B A N G A N

**BERBENAH
PENGINDEKS
JURNAL
ILMIAH**



CALL FOR PAPERS

MATRA PEMBARUAN



Jurnal Inovasi Kebijakan Pemerintah

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2019, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu Mei dan November.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Sumber referensi minimal 15 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*)

Lampirkan alamat korespondensi dan nomor telepon penulis.

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
082111393927 (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com



Menjadi satu-satunya indeks yang digunakan pemerintah, tidak lantas membuat Sinta (*Science and Technology Index*) terlepas dari berbagai pandangan. Salah satu yang mencuat, adalah pendapat yang mempertanyakan keabsahan data Sinta. Pasalnya, data yang dihimpun Sinta salah satunya mengacu pada Google Scholar selain Schopus dan Web of Science. Google Scholar dinilai tidak dapat menyeleksi secara khusus keabsahan suatu data karena mengandalkan kerja mesin. Sehingga, peran aktif pengguna Google Scholar dibutuhkan untuk memastikan validitas datanya. Selain itu, Google Scholar juga memasukkan karya berdasarkan nama penulis, terlepas dari benar tidaknya karya tersebut. Akibatnya, penulis dengan nama yang cukup populer dimungkinkan memasukkan data yang salah, baik disengaja atau pun tidak. Tidak dipungkiri ada beberapa oknum yang memanfaatkan celah ini dengan memasukkan karya yang sebenarnya bukan buah dari kerjanya. Akibatnya, dari berbagai alasan itu tidak sedikit pihak yang meragukan data Sinta.

Berbagai langkah rupanya telah dijalankan Kemenristekdikti untuk menjawab semua keraguan tersebut. Upaya itu seperti menerapkan sanksi tegas kepada pelaku yang dengan sengaja memasukkan data palsu untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, Kemenristekdikti juga mendorong setiap instansi yang memiliki kegiatan



kelitbangan agar ditunjang dengan perangkat kerja verifikator internal. Perangkat tersebut untuk memastikan keabsahan data Sinta sejak dini. Selain menjamin keabsahan data, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas jurnal ilmiah di Indonesia, serta meningkatkan semangat kolaborasi antarinstansi kelitbangan.

Pada edisi Juni 2019 ini, *Media BPP* berusaha mengulas berbagai pandangan mengenai keberadaan Sinta mengingat perannya begitu signifikan bagi dunia penelitian. Semua informasi itu terangkum dalam rubrik Laporan Utama. Tidak hanya menyoal Sinta, berbagai informasi menarik lainnya juga telah disajikan ke dalam aneka rubrik. Mulai dari aktivitas Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) yang dikemas melalui rubrik Jendela BPP. Ada pula rubrik lainnya yang mengabarkan aktivitas penting di beberapa daerah. Selain itu, dalam rubrik Lebih Dekat ada sosok Kepala Subdirektorat Fasilitas Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti Lukman yang akan bercerita mengenai sepak terjangnya dalam meningkatkan pengelolaan jurnal di Indonesia.

Berbagai informasi yang disuguhkan merupakan komitmen *Media BPP* untuk selalu memberikan wawasan yang luas kepada para pembaca ihwal kelitbangan. Dengan demikian, diharapkan lewat berbagai informasi yang hadir mampu menumbuhkan kesadaran sekaligus memahami pentingnya peran litbang dalam peradaban bangsa.

Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Transaksi Non Tunai

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah yang difokuskan dalam tiga area yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi. Pertanyaannya apa peran Kemendagri dalam mendorong adanya regulasi atau peraturan yang mengatur transaksi non tunai sebagai bentuk perluasan transaksi di tingkat pemerintahan daerah

- Pembaca Media BPP-

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong adanya regulasi atau peraturan yang mengatur transaksi non tunai sebagai bentuk perluasan transaksi di tingkat Pemerintahan Daerah. Untuk transaksi non tunai, diperlukan aturan yang bentuknya Perpres atau apapun untuk memberikan petunjuk dalam perluasan transaksi yang ada di tingkat Pemda. Ia juga mengusulkan pemanfaatan data kependudukan yang digunakan untuk data transportasi dan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos). Untuk peningkatan kualitas Penerima Bansos diperlukan efektifitas dan monitoring untuk pelayanan publik yang lebih baik. Hal itu dilakukan untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang semakin baik sebagai upaya penguatan Otonomi Daerah (Otda).

Redaksi

KTP Elektronik

KTP elektronik saat ini sebatas kartu biasa yang manfaatnya sekadar data penduduk. Padahal jika kita lihat di beberapa negara maju, KTP elektronik bisa digunakan dalam berbagai pelayanan publik lainnya. Padahal data kependudukan bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor seperti perbankan dan keuangan. Bagaimana peran Kemendagri selama ini?

- Pembaca Media BPP-

Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat mendukung semua institusi pelayanan publik, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Kemendagri memberikan pasokan data kependudukan yang bisa dimanfaatkan untuk semua

hajat hidup orang banyak. Ditjen Dukcapil Kemendagri mengelola data kependudukan lebih dari 265 juta penduduk. Setiap penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orang tua, data biometrik berupa sidik jari dan irish mata hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang. Kemendagri selanjutnya akan mengintegrasikan data dalam semua proses pemerintahan di Indonesia. Dengan integrasi data ini semua urusan pelayanan publik bakal semakin mudah, murah, cepat dan efisien. Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis single identity number (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Redaksi

Pelayanan Saat Libur Lebaran

Memasuki idulfitri dipastikan kantor pemerintah pasti tutup. Bagaimana jika seandainya ada warga yang hendak melakukan perekaman KTP, atau mengurus dokumen kependudukan lainnya?

- Pembaca Media BPP-

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tetap fokus Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Khususnya menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ia pun meminta seluruh kesiapan Hari Raya Idul Fitri terpantau secara baik dengan memastikan ketenteraman, keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kebutuhan masyarakat lainnya terpenuhi.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 4 NO 3 | MEI-JUNI 2019

BPP DAERAH **28**
BIDANG LITBANG BAPPEDA KOTA SUKABUMI
MINIM STRUKTUR KAYA FUNGSI

DAERAH **32**
GELIAT PAYAKUMBUH
TANGANI SAMPAH



LEBIH DEKAT **40**
LUKMAN,
Kepala Subdirektorat
Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti

DARI KERJA KERAS
MENJADI KERJA CERDAS

JENDELA BPP **6-11**

GAYA HIDUP **42**

SAINS DAN
TEKNOLOGI **43**

RESENSI BUKU **44**

RESENSI FILM **46**

SASTRA **48**

KOMIK **51**

KILAS BERITA **52**

OPINI

SOLUSI PLASTIK BERBAYAR **54**

MENYOAL RENCANA PEMINDAHAN
IBU KOTA **56**

CATATAN
OPOSISI **58**

LAPORAN UTAMA 12-26

BERBENAH PENGINDEKS JURNAL ILMIAH

SEBAB RAWAN TERJADI KESALAHAN, DATA YANG DIHIMPUN SINTA BANYAK DIRAGUKAN. KEMENRISTEKDIKTI MENANGKALNYA DENGAN MEMBERLAKUKAN HUKUMAN, SEKALIGUS MENDORONG INSTANSI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN AGAR MEMILIKI VERIFIKATOR INTERNAL.



TUXEDOVATION, CARA BARU BELAJAR INOVASI

Inovasi erat kaitannya dengan kerja yang efektif dan efisien, begitu pula dengan cara pembelajarannya. Guna meningkatkan daerah menerapkan inovasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), mengembangkan sistem pembelajaran penerapan inovasi daerah secara daring berbasis *audio visual*. Portal yang disebut *Tutorial Exhibition Display of Innovation* (Tuxedovation) ini, berisi kumpulan video inovasi dari berbagai daerah. "Ibaratnya seperti terminal video dari indeks inovasi yang diunggah pemerintah daerah," kata Isman Kepala Subbidang Standar Kompetensi Puslitbang Inovda.

Video yang diunggah pemerintah daerah saat mengisi indeks inovasi, akan secara otomatis terhimpun di dalam *Tuxedovation*. Dengan format dan durasi yang ditentukan, video itu memuat paling sedikit empat aspek, yakni latar belakang, proses penentuan ide, proses penerapan, serta dampak yang dihasilkan dari sebuah inovasi. Selain dari daerah, Puslitbang Inovda juga turut membuat konten *audio visual* yang berkaitan dengan strategi berinovasi. Bahkan, berbagai peraturan inovasi juga bakal dipublikasikan dalam bentuk video. "Bisa jadi animasi, infografis, bisa jadi video grafis," kata Isman.

Isman menyebutkan, jika *Tuxedovation* berjalan maka video yang terhimpun bisa mencapai 3718 video inovasi dari berbagai daerah. Selain menampilkan video, *Tuxedovation* akan mengklasifikasi dan mengklarifikasi semua video berdasarkan bentuk inovasi dan urusannya. "Misalnya inovasi pertanian, ketik saja pertanian, semua akan muncul di situ (*Tuxedovation*)," terang Isman.

Ia mengatakan, lahirnya *Tuxedovation* merupakan ikhtiar untuk menjawab



persoalan terkait cara pembelajaran masyarakat Indonesia terutama generasi milenial. Menurutnya, generasi saat ini lebih menyukai metode pembelajaran dengan menonton dan mendengar. "Kurang tertarik membaca, lebih banyak menonton, mengandalkan pendengaran dan penglihatan," ujarnya.

Dengan adanya *Tuxedovation* memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat umum untuk mempelajari sebuah inovasi. Ia mengaku, terobosan medium pembelajaran inovasi ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah karena lebih mudah dipahami. Selain itu, dengan banyaknya video inovasi, diharapkan memunculkan berbagai ide.

Melalui *Tuxedovation* juga memungkinkan antardaerah saling bersinergi. Ia mencontohkan, suatu daerah yang tertarik dengan inovasi di daerah lain, dapat mengajukan kerja sama lewat fitur yang sudah disediakan. Jika daerah yang dimaksud menyetujui permohonan tersebut, dapat mengirimkan berbagai bahan inovasinya ke daerah pemohon. Bahan tersebut dapat dimanfaatkan baik merep-

likasi dalam bentuk serupa, memodifikasi, atau sebagainya. Kendati bisa diakses oleh publik, tetapi layanan kerja sama itu hanya diperuntukan bagi pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, kerja sama secara daring lebih menguntungkan ketimbang dengan mendatangi daerah yang berinovasi. Salah satu keuntungannya yakni dapat memangkas biaya operasional, mengingat ongkos kunjungan dari satu daerah ke daerah lainnya tidak murah.

Isman menuturkan, *Tuxedovation* akan diluncurkan pada tahun ini, bertepatan dengan perhelatan *Innovative Government Award* (IGA) 2019. Guna mengenalkan *Tuxedovation* ke banyak Pemerintah Daerah, Puslitbang Inovda mensosialisasikannya di forum bersama 100 daerah pada 21 Mei 2019 di Jakarta. Adapun forum tersebut dikhususkan bagi daerah yang belum memasukkan data indeks dan tergolong kurang berinovasi. Ia berharap, dengan banyaknya strategi yang diterapkan, dapat mewujudkan inovasi di seluruh daerah Indonesia.

■ MUJAENI



MEMETAKAN ISU STRATEGIS MELALUI KIRSTANAS

Pelaksanaan pembangunan nasional seringkali dipengaruhi dinamika dan perkembangan lingkungan strategis, baik dari skala global, regional, maupun nasional. Dinamika tersebut memiliki kompleksitas, ketidakpastian, serta risiko yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai dinamika dibutuhkan perkiraan strategis penyusunan suatu perencanaan. Hal ini berfungsi sebagai pedoman menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek (PPNJP), baik dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun penyediaan bahan perumusan kebijakan nasional.

Guna membantu perencanaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum (Puslitbang Otda PolPum) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menyusun dokumen Perkiraan Strategis Nasional (Kirstanas). Sudah dua tahun Puslitbang ini menggelar program serupa dengan tujuan memetakan berbagai isu strategis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya pada tahun berjalan, untuk dijadikan rujukan pada tahun berikutnya. "Pasti trennya setiap tahun berbeda, itulah yang disebut dinamika, yang menjadi dasar memperkirakan isu-isu strategis," kata Kepala Bidang Pemerintahan Umum Puslitbang Otda PolPum Endah

Kastanya, Selasa (14/5).

Endah menjelaskan, penyusunan dokumen Kirstanas sebenarnya merupakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, karena Bappenas menilai Kemendagri memiliki peran yang lebih strategis maka penyusunan itu diserahkan ke Kemendagri melalui BPP. Oleh karenanya, isu yang dibahas meliputi banyak aspek yang dinilai memengaruhi kehidupan nasional, tidak hanya sebatas nomenklatur Puslitbang Otda PolPum.

Hasil penyusunan Kirstanas, lanjut Endah, akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk pihak yang akan memanfaatkan hasil penyusunan itu, sepenuhnya menjadi kewenangan Mendagri. Namun menurutnya, Bappenas merupakan pihak yang lebih membutuhkan karena harus membuat perencanaan program berdasarkan isu-isu strategis yang telah dikaji.

Secara teknis, penyusunan Kirstanas diawali dengan Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) dengan melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan, bisa dari kementerian, pakar, akademisi yang sesuai dengan kapasitasnya. Yunita Amperiana Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menuturkan, dari narasumber itu akan memunculkan beragam informasi aktual terkait dengan aspek yang dikaji. "Kita *kan* belum melaksanakan jadi kita

belum dapat informasi untuk prediksi 2020 itu apa," katanya.

Kepala Subbidang Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional Anthonius Riva menyatakan, sebenarnya berbagai informasi itu dapat dihimpun dengan cara berselancar melalui internet. Namun, agar data yang dikantongi valid, perlunya melibatkan narasumber dari berbagai bidang keilmuan.

Ketua Tim Peneliti Catur Wibowo Budi menjelaskan, pembahasan saat FGD meliputi berbagai isu yang dilihat dari lingkup global, regional, dan nasional. Melalui kegiatan itu juga didapati isu yang perlu ditangani pemerintah, peluang untuk mengatasi isu tersebut, serta kendala yang bakal dihadapi. Guna sukseskan FGD, timnya telah mengusulkan nama-nama narasumber yang akan dihadirkan.

Data yang terhimpun dari para narasumber kemudian dikroscek ke beberapa daerah. Adapun daerah yang dijadikan sampel, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung. Catur menyebutkan, lokasi itu diambil melalui beberapa pertimbangan salah satunya adalah jumlah penduduk. Sebab, keadaan itu memengaruhi dinamika strategis. Ia mencontohkan, di bidang politik misalnya, untuk memenangi pemilu presiden, kandidat cukup menguasai tiga lokasi di Pulau Jawa, (Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah). Guna mencari data di daerah, peneliti lebih menekankan menemui pihak-pihak tertentu. "Kita paling mendatangi Perguruan Tinggi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ada juga ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," katanya.

Setelah dari daerah, tim peneliti akan menganalisis data yang terhimpun. Bagian ini menjadi tantangan tersendiri karena harus mengupas berbagai temuan sesuai dengan tujuan dari penyusunan. "Yang berat itu menganalisis lima aspek, dilihat dari lingkup global, regional, dan nasional," katanya.

Dengan berbagai tahapan yang dilewati, Endah berharap agar hasil penyusunan dapat digunakan menjadi acuan kebijakan. "Kita juga melakukannya tidak sembarangan," pungkasnya.

■ MUJAENI

MENGULIK PENANGANAN SAMPAH PLASTIK



Penanganan sampah plastik di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas. Sebab sampah jenis ini membutuhkan ratusan tahun untuk benar-benar terurai secara alamiah. Jika dibiarkan tanpa dikelola dengan baik, sampah plastik akan menimbulkan berbagai persoalan, seperti tersumbatnya aliran air, bahkan menjadi santapan bagi satwa yang hidup di darat pun di laut. Akibatnya, banjir dan kematian satwa menjadi ancaman serius dari persoalan sampah plastik.

Indonesia sebenarnya memiliki berbagai peraturan terkait persoalan sampah, seperti UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa regulasi lainnya. Meski regulasi tersebut masih mengatur sampah secara umum, belum spesifik menyoal sampah plastik. Setahun lalu Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut 2018-2025, yang mengatur tentang penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Namun berbagai regulasi yang ada dinilai masih perlu dibenahi.

Berangkat dari persoalan itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan Daerah (Puslitbang Keuda) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) melakukan kajian bertajuk *Pengelolaan Sampah Plastik: Dinamika dan Problematikanya di Daerah*. Kajian ini mengulas gambaran dan faktor pengelolaan sampah plastik di daerah, serta mengkaji strategi dan solusi dari masalah itu.

Selama 4 bulan Puslitbang Pembangunan dan Keuda melakukan kajian di beberapa kota, seperti Surabaya, Payakumbuh, Bekasi, Bogor, Banjarmasin, Bone Bolango, dan Ternate. Lokus kajian itu dipilih berdasarkan banyak pertimbangan, seperti dari segi regulasi, letak geografis, dan jumlah produksi sampah plastik yang mencapai angka persentase rata-rata nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar 15 persen. “Di beberapa daerah ada sampah plastiknya di atas 15 persen,

maka kami ambil juga menjadi lokus salah satunya Payakumbuh, Surabaya, dan Kota Bekasi,” kata Ketua Tim Peneliti Suci Emilia Fitri, Jumat (10/5).

Suci menyebutkan, meski memiliki persentase sampah plastik tinggi, beberapa daerah belum memiliki regulasi khusus menangani sampah plastik. Adapun peraturan yang diterapkan masih bersifat imbauan. Kendati demikian, ada beberapa kota yang telah menerapkan peraturan khusus, misalnya Bogor dan Banjarmasin. Sejak 1 Desember 2018, Kota Bogor menerapkan aturan pelarangan terhadap ritel dan toko modern menggunakan kantong plastik dalam transaksinya. Hal ini dibuktikan Suci saat belanja di salah satu tempat, dan tidak mendapatkan kantong plastik. Karyawannya justru menganjurkan, agar dirinya membeli *paper bag* sebagai pengganti kantong plastik.

Sementara di Banjarmasin, Pemerintah setempat menyediakan bakul purun atau tas dari anyaman daun purun (tumbuhan hidup di sungai) sebagai pengganti kantong plastik, yang dibagikan gratis ke setiap kepala rumah tangga. Program itu dilakukan secara bertahap hingga 2025. “Pemkot Banjarmasin berharap setiap kepala rumah tangga mendapat satu bakul purun sebagai pengganti kantong belanja,” kata Suci.

Sedangkan daerah lain yang belum menerapkan regulasi khusus, penanganannya masih bersifat imbauan untuk tidak menggunakan kantong plastik, kemasan berbahan plastik, serta melakukan sosialisasi pentingnya memilah jenis sampah. Selain itu, untuk menangani sampah plastik berupa botol, banyak daerah mengantisipasinya dengan memanfaatkan keberadaan bank sampah. Di bank sampah, botol-botol plastik akan dimanfaatkan menjadi biji plastik atau sejenisnya.

Kendati belum memiliki regulasi khusus, Suci mengatakan, mereka sebenarnya sadar bahwa sampah plastik merupakan persoalan serius. Ada beberapa daerah yang kini tengah belajar dengan daerah lain yang dinilai berhasil menerapkan regulasi khusus, seperti halnya Kota Bogor yang sebelumnya belajar dari Banjarmasin.

Kepala Subbidang Investasi Daerah Bidang Ekonomi Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuda Nirwana Tapiomas menjelaskan, beberapa daerah memang sudah berusaha melakukan pengurangan kantong plastik dengan memproduksi kantong ramah lingkungan. Namun, Nirwana menyayangkan sikap masyarakat yang masih enggan membawa kantong mandiri saat berbelanja. Selain itu, kesadaran mereka juga masih rendah terkait laku memilah sampah antara organik dan *non* organik di tingkat rumah tangga. “Sehingga sampah plastik yang sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) itu begitu banyak,” katanya.

Nirwana menyebutkan, sampah plastik yang menumpuk di TPA didominasi sampah kantong plastik. Kantong plastik tidak banyak dimanfaatkan masyarakat karena dianggap tidak memiliki nilai jual. Berbeda dengan botol plastik yang banyak didaur ulang oleh bank-bank sampah. Akibatnya keberadaan kantong

plastik menjadi persoalan serius di banyak tempat. “Kantong-kantong yang dari darat inilah sampai ke laut sehingga terjadi *lah* permasalahan sampah di laut,” kata Nirwana.

Selain itu, Suci menambahkan, menurut narasumbernya penyebab terjadinya longsor di TPA Leuwigajah, Cimahi, 21 Februari 2005 silam, disebabkan banyaknya kantong plastik. Peristiwa itu banyak memakan korban jiwa, dan setiap 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). “Itu juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun masyarakat, bagaimana mengatasinya, supaya kantong plastik tidak sampai ke TPA,” katanya.

Peneliti Puslitbang Pembangunan dan Keuda Ray Ferza menyebutkan, sampah plastik membutuhkan penanganan dari hulu. Dalam hal ini produsen plastik, baik dari pabrik plastik, toko modern, dan tempat lainnya yang sering memanfaatkan kantong plastik. Hal itu seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dan Bekasi yang sudah menerapkan regulasi khusus dengan semangat mengurangi jumlah plastik dari tingkat produsen. “Yang menurut kami itu karakter khusus yang membedakan dengan sampah-sampah lainnya, harus disikapi dari produsen,” katanya.

Kendala regulasi

Kendala belum semua daerah memiliki regulasi khusus plastik, salah satunya belum adanya peraturan dari Pemerintah Pusat yang mengatur secara jelas terkait penanganan sampah plastik. Suci mengatakan, Pemerintah Pusat masih menerapkan regulasi pengelolaan sampah secara umum. Meski KLHK saat ini, lanjut Suci tengah menyiapkan Peraturan Menteri tentang sampah rumah tangga. “Sekarang lagi mempersiapkan peta jalan pengurangan sampah plastik,” tambah Suci.

Nirwana menerangkan, mengacu pada UU 18 Tahun 2008, produsen sebenarnya bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksinya. Namun, dalam regulasi tersebut tidak mengatur sanksi jika yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya. Akibatnya, mereka kurang merespons keberadaan sampah yang diproduksinya. Kondisi ini juga membuat Pemerintah Daerah kebingungan ketika menerapkan peraturan dan ingin memberikan sanksi kepada pihak yang membandel. “Mereka mungkin bikin aturan tetapi *kagok*, karena peraturan khusus di atasnya belum ada,” kata Nirwana.

Ray menyebutkan, sebenarnya jika UU 18 Tahun 2008 diterapkan secara maksimal sudah mampu mengatasi persoalan sampah plastik. Sebab, sampah plastik merupakan bagian dari sampah secara keseluruhan. Selain itu, regulasi tersebut sudah mengakomodasi penanganan sampah plastik, meski untuk pengurangannya masih belum sepenuhnya terakomodasi. Senada dengan Nirwana, ia membenarkan jika produsen harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya.

Ray menjelaskan, UU 18 tahun 2008 perlu dibenahi dengan penambahan aturan. Ia mencontohkan, pelibatan produsen di daerah yang diterjemahkan sebagai ritel modern. Namun, hubungan ritel modern dengan kantong plastik yang digunakannya masih belum jelas. “Soalnya di level pelaksanaan itu ketika kita melarang *kan* dunia perindustrian misalnya pabrik plastik teriak-teriak (protes) juga sebenarnya,” katanya.

Ray menambahkan, jika dipandang dari lingkungan hidup regulasi tersebut sudah memadai, tetapi dari cara pandang industri regulasi itu belum tentu bagus. Oleh karenanya, aturan tersebut perlu ditinjau dengan melibatkan banyak pihak. Misalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berwenang mengatur jenis-jenis kemasan makanan pun obat yang bakal digunakan. Tidak hanya itu, aspek lain misalnya menyoal biaya bea cukai terhadap plastik yang masuk ke Indonesia.

Rekomendasi

Ihwal rekomendasi, Puslitbang Pembangunan dan Keuda telah menyusun naskah yang bakal disampaikan. Suci menekankan, semua hasil temuan di lapangan akan diajukan menjadi rekomendasi. Salah satu rekomendasi itu adalah perlunya harmonisasi peraturan di tingkat Pemerintah Pusat terkait pengelolaan sampah, baik secara umum maupun plastik secara khusus. Apalagi, regulasi tentang pembiayaan pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum dikeluarkan regulasinya. “Menurut data yang kami dapatkan, itu masih dibahas di Kementerian PUPR, Kemendagri menunggu penetapannya, nanti kita konfirmasi lagi,” katanya. Ia menambahkan, banyak daerah yang mengeluh tentang biaya dari pengelolaan sampah.

Rekomendasi lainnya, pentingnya menyusun strategi sosialisasi seputar sampah plastik. Suci mengatakan, banyak masyarakat yang mengaku belum mengetahui pengelolaan sampah plastik yang benar, serta paham terhadap bahaya dari sampah tersebut. Ia berharap, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dapat menyiapkan model sosialisasi yang lebih efektif dan efisien dari yang telah dilakukan. Strategi itu dapat dilakukan dengan menggendeng Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Mungkin selama ini sudah melakukan sosialisasi, tetapi belum menjangkau seluruh aspek masyarakat, bisa jadi sosialisasi hanya berupa rapat dan pertemuan di kantor,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puslitbang Keuda Horas Mauritz Panjaitan mengimbau, agar perhatian terhadap penanganan sampah plastik harus dilakukan secara serius. Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dikantonginya, Indonesia penyumbang nomor dua di dunia dengan 3,2 juta ton sampah plastik di laut. “Memang harus ada secara spesifik aturannya dan problematika serta dinamikanya di daerah boleh menjadi rekomendasi. Termasuk kebutuhan aturan yang menjadi perhatian untuk segera diterbitkan,” tegas Mauritz.

Rekomendasi itu, lanjut Mauritz, bisa berupa perbaikan regulasi, munculnya peraturan baru, atau pun langkah lainnya yang perlu diambil oleh Kemendagri. Meski begitu, ia menyayangkan beberapa daerah yang belum maksimal merespons regulasi yang ada. “Kadang-kadang di daerah, awal-awal regulasi berlaku akan dilaksanakan, tetapi setelah berjalan lama malah tidak berkelanjutan,” katanya.

■ MUJAENI

“PEMERINTAH PUSAT MASIH MENERAPKAN REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH SECARA UMUM. MESKI KLHK SAAT INI, TENGAH MENYIAPKAN PERATURAN MENTERI TENTANG SAMPAH RUMAH TANGGA

MENKAKI ADMINISTRASI PINDAH DATANG

Terbitnya Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan upaya pemerintah, salah satunya untuk meringkas proses layanan administrasi warga pindah dan datang. Lewat regulasi itu, masyarakat yang hendak mengurus KTP elektronik (e-KTP) cukup dengan membawa Kartu Keluarga (KK). Sementara, permohonan e-KTP karena pindah atau datang dapat diproses dengan mengajukan surat pindah dan KK. Semua proses dapat dilakukan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) baik Provinsi, Kabupaten/Kota tanpa harus melampirkan surat pengantar dari Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW). “Selama ini sekian puluh tahun itu pindah datang penduduk memakai surat pengantar RT/RW,” ujar Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan (Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan), Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Gatot Tri Laksono, Jumat (10/5).

Gatot menambahkan, meski proses administrasi tanpa melalui RT/RW, warga tetap dianjurkan aktif melapor ke pengurus RT/RW setempat saat proses administrasi rampung. Walaupun, regulasi tersebut tidak mengatur sanksi jika didapati warga yang melanggar. “Kalau penduduk yang mau pindah, logikanya *kan* dia harus tetap lapor, kalau yang penduduk baru kalau *nggak* lapor RT/RW-nya nanti *kan* *nggak* tahu,” katanya.

Kendati secara peran administrasi berkurang, tetapi RT/RW tetap memiliki fungsi yang signifikan. Gatot mengatakan, jika peran mereka sebagai jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Selain itu,

RT/RW memiliki fungsi sosial untuk mengontrol mobilitas penduduk di wilayahnya. “Belum lagi terkait data administrasi pendudukan dan pencatatan sipil pergerakan keluar masuk penduduk di wilayahnya harus tahu,” katanya.

Meski diterbitkan pada 18 Oktober 2018, berdasarkan hasil kajian Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan di tiga daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Cianjur sosialisasi Perpres No 96 Tahun 2018 tersebut belum massif sampai ke tingkat RT/RW. Gatot menyebutkan, ketiga tempat itu dijadikan lokus kajian karena disinyalir angka warga pindah dan datangnya cukup tinggi.

Belum massifnya sosialisasi, dibenarkan Peneliti Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan Hari Prasetyo. Menurutnya, Disdukcapil setempat masih fokus mengurus tugas lain, seperti perekaman e-KTP berkaitan dengan pemilu serentak, serta menggenjot penerapan program KIA (Kartu Identitas Anak). Akibatnya, hanya 30 persen warga yang baru mengetahui kebijakan tersebut. “Banyak yang tidak tahu, jadi birokrasinya masih panjang,” kata peneliti yang melakukan kajian di Cianjur tersebut. Meski demikian, lanjut Hari, proses pengurusan administrasi di Disdukcapil tidak mengalami kendala dan selesai diurus pada hari yang sama saat mendaftar.

Sementara itu, baik Disdukcapil maupun Kecamatan mendukung adanya Perpres No 96 Tahun 2018 karena memudahkan masyarakat dan tugas mereka. Justru yang perlu diberi pemahaman yakni perangkat RT/RW dan juga kelurahan agar pengertian terhadap penerapan regulasi tersebut. Hari menjelaskan, RT/RW masih memaknai jika regulasi itu mengurangi perannya dan

merasa dilangkahi. Padahal, mereka mengaku kerap dilibatkan dalam kegiatan di lingkup masyarakat.

Hari menyebutkan, sebenarnya kondisi itu dapat ditanggulangi jika masyarakat tertib melapor setelah rampung mengurus administrasi di Disdukcapil. Ia tidak memungkiri saat ini masyarakat masih belum tertib melapor ke Kecamatan, Kelurahan, atau pun RT/RW. “Jadi jengangnya *tuh* tidak dari bawa ke atas, tetapi dari atas ke bawah,” katanya.

Di sisi lain, sanksi bagi masyarakat yang tidak tertib melapor belum ada. Sehingga mereka masih terkesan abai terhadap pendataan penduduk. Menurut Hari, sanksi tersebut bisa saja dibuat, misalnya masyarakat yang tidak tertib diberi hukuman berupa pencabutan fasilitas

pelayanan. “Kalau kamu *nggak* lapor ke RT misal, kamu *nggak* mendapatkan fasilitas pelayanan sampah, kebersihan, atau sanksi tegas lainnya, jadi akan lebih tertib,” katanya.

Masih banyaknya masyarakat yang belum paham, membuat sosialisasi Perpres No 96 Tahun 2018 menjadi kebutuhan mendesak. Namun di lapangan, sosialisasi juga tidak mudah dilakukan, karena seringnya terbentur anggaran. Sebab, Disdukcapil merupakan perangkat kerja yang anggarannya bersumber dari pemerintah daerah. Sehingga nominalnya tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah setempat. Kalau pun anggaran sosialisasi tersedia, itu harus mewadahi seluruh program. “Konsen *nggak* dengan administrasi kependudukan, ada yang konsen dikasih mobil (sosialisasi dan layanan) keliling segala macam,” katanya.

Belum secara penuh diterapkannya

kebijakan Perpres No 96 Tahun 2018, juga terjadi di Kabupaten Bandung. Peneliti Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan Febryan Denistya Perdana mengatakan, masyarakat setempat masih melampirkan surat pengantar dari RT/RW saat mengurus pindah dan datang. Berkas itu digunakan Kecamatan untuk menerbitkan KK dan e-KTP baru. Sedangkan administrasi e-KTP pemula atau usia wajib, dapat dilakukan tanpa harus melampirkan surat pengantar dari RT/RW, cukup dengan melengkapinya KK.

Denistya menyebutkan, alasan desa masih membutuhkan pengantar RT/RW, yakni untuk aspek keamanan. Karena RT/RW dinilai sebagai ujung tombak perangkat desa yang mengetahui kondisi langsung masyarakat. Kendati demikian, secara administrasi regulasi tersebut bagus karena memangkas rantai birokrasi, tetapi dari aspek keamanan masih perlu diperhatikan. Melihat

ancaman bisa datang dari mana saja. “Jadi dia (RT/RW) mengetahui sebenarnya bahwa orang ini latar belakangnya seperti apa, jadi ini menjadi bahan pertimbangan untuk diterbitkan di desa,” katanya.

Menyikapi itu, Denistya menyarankan adanya regulasi khusus yang menjelaskan peran RT/RW di Indonesia. Dari aturan itu melahirkan batasan-batasan yang mengatur kewenangannya. Tidak seperti sekarang yang perannya masuk ke semua lini masyarakat. “Sekarang konteks kependudukan masuk, bantuan sosial masuk, pemilu masuk,” katanya.

Namun, jika regulasi RT/RW diterbitkan perlu juga memerhatikan kesiapan kab/kota untuk menerapkannya, terutama dalam persoalan upah untuk setiap perangkat tersebut. Hal itu tidak menjadi soal jika diterapkan di kota-kota besar, tetapi menjadi beban jika diberlakukan di daerah kecil. “Daerah lain seperti Madura, Ternate itu seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan Kurniasih mengatakan, saat hukum diberlakukan seperti Perpres No 96 Tahun 2018 masyarakat wajib mematuhi. Ia menekankan, jika regulasi itu memperkuat peran RT/RW bukan sebaliknya. Sejauh warga tertib melaporkan hasil administrasi dari Disdukcapil ke RT/RW. Sebagai kebijakan baru, lanjut Kurniasih, memang wajib dilakukan sosialisasi secara luas. Ia menduga sosialisasi sudah dilakukan, tetapi belum berjalan maksimal. Sebab, regulasi itu terbit bertepatan dengan kesibukan persiapan pemilu serentak.

Dengan adanya kajian yang dilakukan, permasalahan dengan adanya regulasi baru dapat dipetakan dan dicarikan solusinya. Ia menekankan, pihaknya tidak menyoroti jika regulasi ini tidak benar, tetapi lebih ingin memberikan dukungan. Ia berharap, dengan kajian yang berdasarkan pada Perpres No 96 Tahun 2018 bisa diterapkan secara baik. “Yang kita lihat aplikasi di lapangannya itu yang harus didukung oleh semua pihak,” tandasnya.

■ MUJAEANI



LAPORAN UTAMA

BERBENAH PENGINDEKS JURNAL ILMIAH

SEBAB RAWAN TERJADI KESALAHAN, DATA YANG DIHIMPUN SINTA BANYAK DIRAGUKAN. KEMENRISTEKDIKTU MENANGKALNYA DENGAN MEMBERLAKUKAN HUKUMAN, SEKALIGUS MENDORONG INSTANSI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN AGAR MEMILIKI VERIFIKATOR INTERNAL.



Lahirnya portal pengindeks Sinta (*Science and Technology Index*) pada 2017 merupakan ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dalam memberikan jalan alternatif untuk mengukur karya dosen, peneliti, serta pegiat iptek lainnya di Indonesia. Jalan ini ditempuh karena sebelumnya pemerintah merasa kesulitan untuk memetakan sebaran hasil kajian di Indonesia. Sebelum adanya Sinta, yang termudah untuk menelusuri sebaran publikasi yakni melalui pengindeks Scopus atau pun Web of Science. Namun, tidak semua hasil penelitian mampu menembus kedua layanan itu karena syarat kualifikasinya begitu ketat. Di sisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan banyak biaya untuk mengongkosi kegiatan penelitian.

Awalnya, portal Sinta hanya diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi (PT) melalui Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang dikelola Kemenristekdikti. Namun, sejak berlakunya Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, menjadikan Sinta juga turut mengindeks jurnal di bawah pengelolaan litbang kementerian/lembaga. Sebelumnya, jurnal dari dua perangkat itu ditangani Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan pengindeks *Indonesia Science & Technology Index* (Inasti).

Dengan kebijakan itu, Sinta menjadi satu-satunya portal indeks yang digunakan pemerintah. Melalui Sinta, pemerintah berupaya menghimpun publikasi yang dihasilkan akademisi atau pun peneliti di Indonesia, baik yang terindeks internasional, nasional, maupun lokal. Guna mempermudah pengumpulan data publikasi dan sitasi, peneliti dianjurkan memiliki akun Google Scholar dan/atau ID Scopus—bagi yang memiliki publikasi internasional terindeks Scopus. Google Scholar menjadi acuan, karena



asumsinya hampir semua dosen dan peneliti familiar dengan layanan tersebut. Sampai dengan 22 Mei 2019, jumlah dosen dan peneliti yang mendaftar di portal Sinta sebanyak 161.447 dari 4.703 institusi, sementara jurnal yang terakreditasi berjumlah 2.540 yang masuk kategori Sinta 1 sampai dengan 6.

Keberadaan Sinta dinilai sebagai angin segar bagi dunia penelitian di Indonesia. Dosen Universitas Paramadina **Luthfi Assyauckanie** mengatakan, terbitnya Sinta perlu diapresiasi dan

didukung karena berangkat dari niat ingin memajukan penelitian di Indonesia. Ia menilai, layanan itu sebagai langkah awal untuk melihat kualitas dosen, peneliti, maupun instansi penelitian di dalam negeri. Meski ia menyebutkan, tidak sedikit pihak yang mengkritisi kinerja Sinta. Namun, kritikan itu sebagai hal yang lumrah melihat perannya sebagai pengindeks. “Yang namanya orang bikin indeks, indeks apa pun biasanya selalu ada pro kontra,” katanya saat ditemui *Media BPP*, Kamis (4/4).

Kritik banyak diarahkan pada penggunaan Google Scholar sebagai acuan indeks Sinta. Sebab, kerja Google

Scholar tidak dapat menyeleksi secara khusus keabsahan suatu data karena mengandalkan sistem mesin. Sehingga, peran aktif pengguna Google Scholar dibutuhkan untuk memastikan validitas datanya. Selain itu, Google Scholar juga memasukkan karya berdasarkan nama penulis, terlepas dari benar tidaknya karya tersebut. Sehingga, penulis dengan nama yang cukup populer dimungkinkan memasukkan data yang salah, baik disengaja atau pun tidak. Ada beberapa oknum yang memanfaatkan celah ini dengan memasukkan karya yang sebenarnya bukan buah dari kerjanya. Padahal, data yang terhimpun Google Scholar akan dia-

dopsi sebagai salah satu bahan indeks Sinta selain dari Scopus—belakangan ditambahkan Web of Science. “Scopus sih oke, karena orang *nggak* bisa ikut campur, sistem Scopus itu tertutup,” katanya.

Dengan kondisi itu, lanjut Luthfi, Sinta perlu dilakukan pembenahan. Ia menyarankan, agar pemerintah membuat sistem pendeteksi kesalahan sedini mungkin untuk menangkal berbagai kemungkinan kecurangan. Salah satunya dengan memantau laju angka indeks pengguna Sinta yang mencurigakan. “Misalnya, kalau dalam satu tahun terjadi peningkatan (indeks

Sinta) dramatis, itu *kan* perlu dicurigai,” katanya.

Selain itu, Sinta juga perlu membangun pangkalan data mandiri, tidak seperti sekarang yang hanya bergantung pada data dari portal indeks lainnya. Meski menurut Luthfi, hal itu tidak mudah dan membutuhkan upaya yang besar.

Luthfi mengaku, dua tahun lalu dirinya pernah menerima surat dari Kemenristekdikti. Isinya berupa imbauan untuk mendata ulang daftar karyanya, karena ditengarai ada karya ilmiah orang lain yang masuk ke akunnya. Hasilnya, ia mendapati beberapa tulisan kata pengantar terhimpun Google Scholar. Padahal, kata pengantar yang biasa ditulisnya untuk buku karya orang lain, tidak dapat disebut sebagai karya ilmiah.

Setelah dilakukan penghapusan, dalam jangka waktu tertentu ternyata data yang keliru tadi kembali muncul di Google Scholar. Dosen Hubungan Internasional ini, mengaku kesulitan untuk menangani kondisi itu. Kini setiap beberapa bulan sekali, dirinya rutin mengecek daftar karya yang terhimpun dan bakal mengeluarkan data yang bukan karyanya.

Perihal data karya ilmiah yang dimasukkan para dosen Universitas Paramadina yang memiliki akun Sinta, Luthfi mengklaim mereka telah mengisi data secara objektif. Hal itu dibuktikan dengan angka Sinta yang sesuai dengan kinerja masing-masing dosen. “Dosen yang punya karya ilmiah yang tersebar di mana-mana indeks Sinta yang tinggi,” katanya.

Verifikator internal

Adanya kemungkinan ketidakvalidan data yang terinput Sinta, menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Kemenristekdikti telah menerapkan beberapa langkah untuk menangkalnya, seperti penerapan sanksi bagi pihak yang dengan sengaja memasukkan data palsu. Dengan harapan, sanksi itu dapat menimbulkan efek jera bagi para



sari-mutiara.ac.id

pelaku. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti Lukman mengatakan, tahun lalu ada dosen yang mendapat sanksi, karena dengan sengaja memasukkan data palsu. Sanksi disesuaikan dengan kadar pelanggaran, ada yang diberhentikan dari tugas, diturunkan jabatan, diberhentikan beasiswanya, atau diberhentikan dana hibahnya. Namun, jika kesalahan data itu dibuat karena ketidaktahuannya, maka pihaknya hanya memberikan imbauan dan arahan.

Selain itu, untuk menjaga keabsahan data, Kemenristekdikti juga menganjurkan setiap instansi memiliki verifikasi internal. Mereka bertugas memvalidasi data yang dimasukkan anggotanya ke dalam Sinta. Lukman mengatakan, untuk menyediakan verifikasi internal, setiap tahun Kemenristekdikti menggelar pelatihan. Tahun lalu tercatat ada 1480 verifikasi yang telah dilatih. Sedangkan tahun ini, pemerintah menargetkan melatih 1500 verifikasi. Sehingga, targetnya pada 2019 sudah ada 3500 verifikasi dari jumlah 4500 PT.

Belum terpenuhinya verifikasi di sejumlah PT akibat terbatasnya anggaran dan waktu pelatihan. Sebab, menurut Lukman untuk menggelar pelatihan dibutuhkan berbagai tahapan. Namun agar pelatihan tetap berjalan maksimal, Kemenristekdikti memprioritaskan PT yang memiliki rasio dosennya lebih banyak. Selanjutnya, semua PT bakal tetap didorong untuk menyediakan verifikasi internal. "Sampai akhirnya dosen yang sedikit pun tetap kita akan siapkan verifikasi," katanya saat ditemui *Media BPP* di Jakarta, Kamis (11/4).

Namun, bagi instansi yang ingin segera memiliki verifikasi internal dapat menyurati Kemenristekdikti. Lukman menjelaskan, permohonan itu akan direspons dengan penyerahan akun verifikasi ke instansi terkait. Meski demikian, kinerja verifikasi tetap dipantau, mengingat sebelumnya tidak mengikuti pelati-



han khusus. Ia menyebutkan, keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi verifikasi memiliki pemahaman di bidang komputer dengan berbagai tampilan data. "Kalau hasilnya *enggak* bagus, ya kita peringatkan (verifikasi)," katanya.

Untuk di litbang kementerian/lembaga, lanjut Lukman, mestinya sudah memiliki verifikasi internal. Sebab, pihaknya sudah menggelar pelatihan keahlian. "Rata-rata kalau di Kementerian kita sudah lakukan pelatihan verifikasi, cuma tinggal verifikasi memahami atau tidak tugasnya yang terus kita lakukan pembinaan," katanya.

Dengan tidak meratanya keberadaan verifikasi di setiap instansi, Kemenristekdikti mengantisipasinya dengan layanan *help desk*. Data yang masuk akan diverifikasi oleh Lembaga Layanan Dikti di wilayah terkait, atau juga ditangani langsung oleh *help desk* pusat. Hanya saja, proses

verifikasi melalui mekanisme ini berlangsung lama. Sebab, setiap hari ada ribuan pemohon yang meminta untuk diverifikasi datanya. "Jadi memang kalau bukan verifikasi di perguruan tinggi agak lambat, tergantung jumlah antreannya," kata Lukman sambil menunjukkan jumlah antrean *help desk*.

Namun Lukman meyakinkan, jika proses verifikasi pendaftar akun Sinta, dan persoalan keberadaan verifikasi internal, akan rampung pada akhir 2020. Sementara itu, untuk menjamin kualitas karya ilmiah pihaknya akan terus melakukan pemantauan. "Yang bekerja adalah mesin, kita terus mengedukasi," katanya.

Terkait dengan usulan agar Sinta menggunakan *database* mandiri, menurut Lukman kebijakan itu justru akan membuat sistem indeks di Indonesia tertinggal. Ia menjelaskan, hal itu tidak perlu dilakukan, karena cukup dengan mengembang-

kan sebaran data dari portal indeks nasional maupun internasional. Skema tersebut disebut dengan komposit indeks, yakni metode mengintegrasikan seluruh sebaran data. "Daripada kita bikin lagi, kita tinggal meramu saja, integrasikan semuanya, jadi semua datanya lengkap," katanya.

Ihwal verifikasi internal, Universitas Paramadina belum memilikinya. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Paramadina Sunaryo menjelaskan, pihaknya belum pernah diajak Kemenristekdikti untuk melakukan verifikasi keabsahan karya ilmiah dosen. Hanya saja, proses *review* karya ilmiah dosen secara internal tetap dilakukan jika bertepatan dengan momen kenaikan jabatan dan sejenisnya.

Kondisi itu berbeda dengan yang dialami Universitas Negeri Semarang (Unnes). Pemimpin Editor Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Unnes Cahyo Setyono mengatakan, tidak lama setelah Sinta terbit, kampus ini membentuk tim khusus menangani Sinta termasuk verifikasi internal. Cahyo mengatakan, tim tersebut terdiri dari dua tugas, yaitu menangani persoalan di bidang teknologi informatika dan juga verifikasi karya ilmiah. Mereka terbentuk atas kolaborasi dengan pengelola jurnal termasuk tim IT Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. Tim ini juga bertugas mendaftarkan dosen atau peneliti internal dengan menggunakan *email* institusi dan memverifikasi semua publikasi di Google Scholar, Scopus, maupun lembaga pengindeks lainnya.



Cahyo menjelaskan, di lapangan memang masih banyak instansi yang belum memiliki verifikasi internal. Salah satu kendala belum adanya verifikasi adalah sumber daya termasuk anggaran dana yang dimiliki suatu instansi. "Yang belum ada verifikasi internal itu di kampus yang kecil, akreditasinya C misalnya. Kemarin saya sempat ke salah satu kampus di Jawa Timur, di sana bahkan tidak ada yang mendampingi," katanya.

Ia menyebutkan, tugas verifikasi tidak mudah dilakukan oleh sembarang orang. Mereka harus bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Sehingga, perlu ditunjang tenaga yang andal di bidangnya. Meski tidak menutup kemungkinan, beberapa instansi memanfaatkan tenaga yang sudah ada, seperti melibatkan petugas tata usaha. Namun sekali lagi, tidak semua instansi memiliki tenaga yang kompeten. Berdasar data di lapangan, lanjut Cahyo, pihak yang mengalami kesulitan mengurus pengelolaan seperti itu adalah dosen

yang keilmuannya di bidang sosial. Kondisi itu berbeda dengan yang dialami dosen di bidang sains dan teknologi, yang dinilai lebih bisa beradaptasi.

Selain adanya verifikasi di tingkat universitas, Unnes juga menerapkan skema verifikasi di ranah pengelolaan jurnal. Seperti yang diterapkan Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review dalam menyaring karya ilmiah baik dari sivitas akademika Unnes maupun dari luar institusi. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang bertugas mengurus IT, korespondensi. Cahyo menyebutkan, anggota tim Jurnal Politik Indonesia yang terlibat tidak sepenuhnya bekerja secara profesional, tetapi sedikit mengadopsi semangat relawan. Hal itu untuk mengantisipasi minimnya ketersediaan anggaran.

Cahyo menjelaskan, jurnal dengan peringkat Sinta 2 ini melakukan beberapa mekanisme dalam memverifikasi naskah. Seperti saat menemui karya ilmiah dengan persentase plagiarisme di atas 20 persen berdasarkan layanan *turnitin* misalnya. Tim ini tidak langsung menolak naskah tersebut, tetapi menelaah lebih dalam penyebab angka itu lebih dari 20 persen. Sebab, berbagai kemungkinan bisa terjadi, seperti naskah yang sebenarnya karya kontributor, tetapi karena pernah dimuat di blog pribadi atau terbit di medium lainnya secara informal sehingga dinyatakan plagiat.

Bisa saja naskah itu terbit di dalam karya ilmiah seperti skripsi sewaktu yang bersangkutan sekolah. Jika menemui kasus seperti itu, naskah yang diajukan tetap bakal diterbitkan dengan mencantumkan keterangan riwayat penerbitan. "Itu akan memberikan keterangan, artikel ini pernah diterbitkan sebagai apa, di tempat mana. Jadi jika hasil *turnitin* tinggi (melebihi 20 persen) itu ada sebabnya, bukan karena mengambil dari orang lain," katanya.

■ MUJAJENI



LAPORAN UTAMA

LANGKAH TINGKATKAN KUALITAS JURNAL

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal, Indonesia banyak terbantu oleh keberadaan organisasi masyarakat yang konsen pada isu penerbitan jurnal ilmiah seperti Relawan Jurnal Indonesia (RJI), misalnya. Mereka berperan membantu pengelola jurnal untuk meningkatkan produknya agar terakreditasi dan terindeks di situs tertentu, termasuk layanan Akreditasi Jurnal Ilmiah (Arjuna) dan pengindeks *Since and Technology Index* (Sinta).

Pemimpin Editor Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Universitas Negeri Semarang (Unnes) Cahyo Setyono mengatakan, tidak banyak negara yang memiliki wadah serupa RJI dan sejenisnya. Bah-

kan negara di tingkat ASEAN pun tidak memilikinya. Kondisi ini perlu dimanfaatkan, untuk memperbaiki penerbitan karya ilmiah di Indonesia. “Jadi perlu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, tidak jalan masing-masing,” kata Cahyo saat dihubungi *Media BPP*, Jumat (5/4).

Dosen mata kuliah Kebijakan Publik tersebut menekankan, pengelolaan Sinta mestinya tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah, tetapi perlu juga bersinergi dengan wadah serupa RJI. “Jangan seperti sekarang, negara jalan sendiri, *civil society* jalan sendiri, akhirnya ketika banyak celah itu kesulitan untuk menanganinya,” katanya.



Ia menduga, urung terwujudnya sinergi antara pemerintah dan wadah akademik *civil society* diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, interaksi yang dibangun kedua pihak itu belum intens. Kedua, ada kemungkinan beberapa oknum yang memanfaatkan publikasi ilmiah sebagai lahan bisnis sehingga tidak menghendaki terwujudnya sinergi kedua belah pihak. Namun, berbagai kendala itu bisa diminimalisasi dengan mengedepankan cara berpikir dalam kerangka kebangsaan.

Koordinator Pusat RJI Andri Putra Kesmawan menyebutkan, posisi RJI dengan Kementerian Riset, Teknolo-

gi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) hanya berperan membantu pengelola jurnal dalam meningkatkan akreditasi jurnal atau indeks di portal Sinta. Selain itu, lanjut Andri, beberapa anggota RJI pernah dilibatkan menjadi evaluator jurnal, ada pula yang ditugaskan menjadi tim ahli atau narasumber saat Kemendikbud menggelar forum terkait publikasi ilmiah.

Andri mengatakan, saat proses penyusunan Sinta, RJI tidak banyak terlibat karena Kemendikbud pun memiliki timnya sendiri. RJI hanya memantau, dan memberi masukan secara tertulis kepada tim Sinta jika dirasa perlu. Saran itu pernah dilakukan berkaitan dengan pengembangan tampilan Sinta. RJI menyarankan, agar Sinta memuat informasi jumlah jurnal di sebuah instansi dan berapa jurnal yang masuk ke portal Sinta. Sebab, selama ini Sinta hanya menampilkan nama sekaligus jumlah penulis di suatu instansi. Saran itu disambut baik oleh tim Sinta, dengan menerapkan usulan, meski kemungkinan bukan sepenuhnya karena peran RJI. “Kalau kita lihat di websitenya (Sinta) sudah muncul informasi, jurnal ini dari kota ini sekian, dari provinsi ini sekian, dari kampus ini sekian,” ujarnya.

Terkait dengan pendapat perlunya pemerintah menggandeng organisasi sejenis RJI, Andri mengatakan, selama ini RJI tidak ingin bertindak berlebihan dengan meminta dilibatkan oleh pihak manapun. RJI tetap berjalan sesuai dengan semangat lahirnya organisasi yang berdiri pada Juni 2016 tersebut. Meski begitu, Andri menilai saat ini pemerintah sudah cukup melibatkan RJI dengan menjadikannya evaluator atau narasumber kegiatan. Kendati awalnya, baik RJI maupun Kemendikbud berjalan di koridornya masing-masing. “Yang penting jurnal di Indonesia bisa naik kelas, yang dulu belum bisa *online* sekarang *online*, yang sudah *online* bagaimana bisa menggunakan *electronic publishing* dan menggunakan sistem OJS (*Open Journal System*) atau lainnya,”

katanya.

Saat ini RJI memiliki sejumlah 198 tutor yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Selain itu, RJI juga menyenangi kepengurusan di 30 provinsi. Dengan adanya pelayanan semacam itu, diharapkan memudahkan instansi yang berkenan didampingi RJI. “Yang belum terjangkau itu Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara,” katanya.

Dengan visi misi membentuk pengelola jurnal bereputasi nasional, RJI melakukan pendampingan secara daring maupun *on the spot* dengan men-

“

DENGAN VISI MISI MEMBENTUK PENGELOLA JURNAL BEREPUTASI NASIONAL, RJI MELAKUKAN PENDAMPINGAN SECARA DARING MAUPUN ON THE SPOT DENGAN MENDATANGI LANGSUNG INSTANSI-INSTANSI TERKAIT

datangi langsung instansi-instansi terkait. Pendampingan daring biasanya dilakukan melalui layanan *WhatsApp* atau *email*. Pendampingan dilakukan sesuai dengan proyeksi target pengelola jurnal yang ingin mencapai akreditasi atau indeks tertentu.

Ia menjelaskan, untuk mendapat pendampingan RJI, pengelola jurnal tidak dipungut biaya. Hanya saja, pihak pengundang biasanya memberikan ongkos akomodasi anggota RJI. “Jadi misal ada kampus di Bogor yang meminta pendampingan RJI, maka saya arahkan untuk menghubungi tim RJI yang ada di Jawa Barat atau Jakarta, agar ongkosnya lebih murah,” katanya.

Belum terakreditasi

Meski keberadaan organisasi sejenis RJI banyak membantu pengelola jurnal, tetapi di lapangan masih banyak jurnal yang belum terakreditasi. Andri mengatakan, kondisi itu diakibatkan beberapa faktor. *Pertama*, pengelola jurnal terlalu takut untuk memproses akreditasi. Mereka beranggapan akreditasi merupakan sesuatu hal yang sulit karena dituntut tampil sempurna. Anggapan itu perlu dihilangkan, karena sudah ada peringkat akreditasi yang disesuaikan dengan kondisi jurnal. “Apakah nanti terakreditasi peringkat 3, 2, peringkat 1, atau peringkat 6, yang jelas dengan syarat jurnalnya sudah sesuai dengan ketentuan syarat minimal maju akreditasi,” katanya.

Kedua, lanjut Andri adalah paradigma pengelola yang masih nyaman mengelola jurnal secara cetak. Padahal, kebijakan terbaru mewajibkan pengelolaan jurnal dilakukan secara elektronik, jika hendak mengajukan akreditasi. Dua hal itu menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. “Padahal, jumlah jurnal di Indonesia sekira 6 ribuan lebih. Sementara yang terakreditasi di Sinta baru 2330 jurnal,” katanya.

Ketiga, anggaran serta sumber daya manusia juga turut menyumbang pengelolaan jurnal belum maksimal. Dwi Fajar anggota RJI mengatakan, banyak pengelola yang kesulitan memenuhi berbagai persyaratan akibat minimnya anggaran. Ia mencontohkan, seperti pemenuhan *Digital Object Identifier* (DOI) yang menjadi bagian kualifikasi akreditasi. Dari total pengelola jurnal, baru 450 instansi yang memiliki DOI.

Pada aspek sumber daya manusia, perguruan tinggi (PT) banyak mengandalkan peran dosen. Padahal dosen sudah disibukkan dengan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi. Selama ini, keterlibatan dosen baru sebatas suka rela atau ditunjuk oleh atasannya. Di sisi lain, apresiasi dosen yang terlibat mengelola jurnal pun masih minim. Fajar mengusulkan, guna meningkatkan minat dosen, perlu instrumen atau regulasi

yang mengatur pemberian bobot nilai bagi dosen yang aktif mengelola jurnal. Selain itu, perlu juga memasukkan jurnal terakreditasi sebagai instrumen penilaian akreditasi prodi atau PT. Sebab, selama ini menurutnya jurnal belum menjadi instrumen penilaian akreditasi PT. Akibatnya, ketertarikan PT mengelola jurnal lebih maksimal pun masih rendah. “Sekarang pengelola jurnal seperti pahlawan tanpa tanda jasa saja *gitu*, ada *idiom* seperti itu,” katanya.

Kejar target akreditasi jurnal

Berdasarkan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan mahasiswa magister dan doktor yang hendak lulus agar mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal. Selain itu, Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, mewajibkan bagi dosen yang ingin mempertahankan tunjangan kinerjanya mesti publikasi jurnal. **Kepala Subdirektorat Fasilitas Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti Lukman** mengatakan, kondisi itu membutuhkan jumlah jurnal yang banyak. Oleh karenanya, tahun ini Kemenristekdikti menargetkan 8 ribu jurnal terakreditasi.

Target itu diyakini dapat tercapai berdasarkan hasil hitungan jumlah jurnal. Lukman menjelaskan, Indonesia memiliki sebaran angka jurnal yang signifikan dengan berbagai kondisi. Indonesia memiliki 57 ribu jurnal dengan *International Standard Serial Number* (ISSN), dari angka itu yang dikelola dengan *Open Journal System* (OJS) ada 37 ribu, sedangkan yang konsisten terbit selama dua tahun ada 10 ribu jurnal. Sedangkan jurnal yang terakreditasi baru sekira tiga ribuan.

Guna mewujudkan target itu, tahun ini pemerintah telah menerapkan program penandatanganan kontrak kinerja dengan PTN. Penandatanganan itu dilakukan antara Menristekdikti de-

ngan para rektor. Perjanjian itu berisi kewajiban setiap PTN untuk mengakreditasi jurnal dalam jumlah tertentu. Angka target itu ditentukan berdasarkan jumlah jurnal di masing-masing PTN yang belum terakreditasi. Dari total PTN nantinya akan terhimpun sebanyak 1400 jurnal terakreditasi.

Lukman menuturkan, keberadaan jurnal terakreditasi merupakan bagian dari borang akreditasi program studi. Sehingga keberadaannya menjadi nilai tambah bagi perguruan tinggi. Selain itu, Dosen yang aktif mengelola jurnal juga akan mendapat tambahan nilai angka kredit yang bisa digunakan sebagai syarat kenaikan jabatan.

Meski telah menerapkan program penandatanganan kontrak kinerja dengan PTN, diakui jumlah jurnal terakreditasi masih belum memenuhi target. Oleh karenanya, dibutuhkan penerapan strategi lainnya. Lukman menyebutkan, tahun kemarin pemerintah memiliki anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) guna percepatan akreditasi jurnal. Anggaran itu digunakan untuk membina asosiasi jurnal seluruh Indonesia. Saat ini pihaknya telah membina 40 asosiasi jurnal. Asosiasi itu masing-masing ditugaskan mendampingi 40 jurnal, agar terakreditasi dengan pemberian nilai lebih cepat. Sedangkan sisa jumlah target akan terpenuhi dari jurnal yang masuk melalui akreditasi reguler. “Saya optimis akhir tahun ini 8 ribu jurnal terakreditasi itu bisa tercapai,” katanya.

Ihwal kerja sama dengan wadah masyarakat yang konsen pada isu publikasi ilmiah, Lukman menjelaskan, Kemenristekdikti sudah melakukannya dengan mekanisme kontrak penguasaan. Kerja sama itu seperti saat mengatasi persoalan manajemen pengelola jurnal, yang banyak dibantu RJI. Ia menyebutkan, berkat kerja sama dengan RJI saat ini 85 persen dari jumlah jurnal manajemen pengelolaannya sudah tertata. “Itu tidak lepas dari peran RJI,” katanya.



FOTO BKKP KEMENRISTEKDIKTI / ADN

Kerja sama dengan RJI ini melibatkan perguruan tinggi yang menjadi mitra wadah tersebut. Hal itu karena anggaran yang dimiliki Kemenristekdikti berupa BOPTN sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Selain itu, kerja sama hanya dilakukan dengan anggota RJI bukan secara kelembagaan, sebab RJI belum berbadan hukum. Saat ini sebanyak 14 wilayah yang ditunjuk untuk dikelola anggota RJI. Mereka ditugaskan melatih 40 jurnal agar terakreditasi.

Sementara untuk meningkatkan kualitas substansi jurnal, Kemenristekdikti juga menggandeng Himpunan Editor Berkala Ilmiah (HEBI). Lukman mengatakan, sudah dua tahun terakhir HEBI dilibatkan untuk melakukan *workshop* pendampingan internasionalisasi jurnal. Kegiatan itu terbuka untuk umum dengan memberlakukan syarat dan ketentuan. Mereka dijadikan *event organizer* dari pelaksanaan tersebut. “Menyiapkan tempat, narasumber, HEBI itu yang mempersiapkan,

karena mereka sudah tahu kondisi di lapangan yang siap untuk diinternasionalisasi,” katanya.

Selain itu, guna menyajikan naskah penelitian yang berkualitas, pemerintah telah berlangganan data dasar jurnal-jurnal internasional. Program yang dianggarkan 15,5 miliar itu, dapat menjadi bahan penulisan bagi seluruh peneliti di Indonesia. Agar banyak digunakan peneliti, Kemenristekdikti bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) dalam persoalan sosialisasi.

Lukman mengapresiasi atas capaian pengelolaan manajemen pengelolaan jurnal yang dimilainya cukup memuaskan. Namun dirinya mengimbau agar pengelola jurnal juga memerhatikan kualitas naskah yang diterbitkan, sebab masih banyak hal yang perlu dibenahi. “Mohon sekarang pengelola jurnal ini tingkatkan terus substansinya, parameternya (dalam menyeleksi naskah) jadi bisa berada di peringkat satu atau peringkat dua,” katanya.

Penambahan instrumen penilaian

Selain sebagai anggota RJI, **Dwi Fajar** juga aktif menjadi evaluator jurnal yang digandeng Kemenristekdikti sejak 2017 sampai sekarang—meski sempat vakum pada 2018. Sebagai penilai jurnal, Fajar mengatakan, perlunya penambahan instrumen penilaian bagi jurnal yang ingin terakreditasi Arjuna. Penambahan itu berupa kajian lebih lanjut terhadap proses *editing*, *review*, yang dilakukan pengelola jurnal. Secara teknis kajian itu dilakukan melalui wawancara dengan pengelola jurnal. Hal itu berguna untuk mengetahui apakah proses berkala yang ditampilkan OJS dilakukan oleh pengelola internal atau melibatkan pihak luar. Sebab lanjut Fajar, saat ini masih ada jarak antara tampilan OJS dengan pengerjaan di lapangan. Tidak menutup kemungkinan hasil konsisten di OJS dikerjakan oleh mahasiswa atau pihak luar. Di sisi lain, saat ini tampilan OJS menjadi satu-satunya acuan utama penilaian. “Dalam hal ini saya tidak mengatakan proses yang dilakukan sekarang tidak baik, atau bagaimana, tetapi sebatas untuk pengembangan saja, mungkin jadi salah satu opsi,” katanya.

Ia menyebutkan, jika semua proses pengerjaan dilakukan oleh mahasiswa atau pihak luar, peran editorial profesional perlu dipertanyakan. Usulannya lebih mengarahkan pada peran pengelola jurnal secara profesional. Fajar menjelaskan, ide telaah lebih dalam melalui wawancara ini terinspirasi dari proses akreditasi program studi atau PT oleh pemerintah. Meski menjadi sesuatu yang asing bagi akreditasi jurnal, tetapi bisa saja instrumen itu diterapkan. Terlebih akreditasi dilakukan oleh pemerintah yang cakupannya hanya di lingkup nasional.

Guna memastikan kebenaran pernyataan saat proses wawancara, menurutnya perlu adanya kesepakan borang akreditasi. Ia men-

contohkan, saat proses wawancara pengelola jurnal mengatakan, proses *editing* dilakukan oleh nama yang tersusun di daftar pengelola. Tetapi, saat yang bersangkutan berhalangan, pihak pengelola mencari editor sesuai bidang yang dibutuhkan. Menurutnya, keterangan itu menunjukkan kejujuran dan keterbukaan pengelola. Namun, jika pengelola memberi keterangan palsu, nantinya bisa dijadikan bahan awal untuk ditindaklanjuti lebih lanjut sebagai pertimbangan proses asesmen. “Dari situ *kan* ada poin bahwa yang bersangkutan menyatakan ada kejujuran, di situ mungkin ada nilai kejujuran, keterbukaan,” katanya.

Meski sebagai evaluator, Fajar mengaku usulannya hanya baru bergulir di ruang diskusi kecil. Terlebih saat ini pemerintah sedang fokus mengejar 8 ribu jurnal terakreditasi. Sehingga, usulannya belum bisa disampaikan secara maksimal. Namun selanjutnya, ia berharap pemerintah tidak hanya memerhatikan kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas. “Dari segi kuantitas saja dulu, yang pasti nanti bertahap tidak bisa secara langsung kualitas juga ditingkatkan,” katanya.

Namun, menurut Lukman skema wawancara tidak perlu dilakukan, karena tampilan di OJS hanya menjadi bagian kecil parameter penilaian akreditasi jurnal. Ia menyebutkan, proses akreditasi bukan melihat hasil akhir pengerjaan jurnal, melainkan menilai proses pengerjaan apakah sesuai dengan kaidah penerbitan jurnal elektronik atau tidak. Berbagai langkah itu dilakukan dengan memasuki langsung ke situs jurnal terkait dan memastikan kerja yang dilakukan sudah sesuai aturan. “Ada *nggak* dia editornya, ada *nggak* dia *reviewer*-nya, kalau ada buktinya seperti apa, keterlibatannya sejauh mana, kualifikasi editornya dan *reviewer*-nya seperti apa, itu semua ada di borang akreditasi yang ada di Arjuna,” katanya.

■ MUJAEINI

LAPORAN UTAMA

MEMBANGUN CARA
PANDANG KOLABORASI

Guna memberikan apresiasi sekaligus mengembangkan portal Sinta (*Science and Technology Index*) terhadap pegiat penelitian di Indonesia, Kemenristekdikti menggelar Sinta Award. Berbagai penghargaan diberikan dengan merujuk data Sinta yang merupakan akumulasi data dari Google Scholar dan Scopus—belakangan ditambah Web of Science. Menurut pemberitaan *Media BPP* edisi Agustus 2018, Sinta Award memberikan penghargaan dengan kategori tertentu. Pertama, penghargaan untuk institusi litbang Kementerian/Lembaga (K/L) dan Perguruan Tinggi (PT). Kedua, penghargaan diberikan untuk individu peneliti termasuk dosen. Ketiga, penghargaan untuk pengelola jurnal, yang mencakup 20 rincian sub kategori berdasarkan pelaksanaan kebijakan *stakeholder*, baik di PT maupun litbang kementerian/lembaga.

Meski berangkat dari tujuan untuk meningkatkan dunia penelitian di Indonesia, jalannya Sinta Award perlu dikoreksi. Pangkal persoalannya adalah kontroversi keabsahan data yang dihimpun Sinta. Sehingga, menjadikan indeks Sinta sebagai satu-satunya data rujukan untuk memberi penghargaan perlu ditinjau ulang. Dosen Universitas Paramadina Luthfi Assyaukanie mengatakan, sebaiknya indeks Sinta hanya dijadikan data awal guna menyinggung peserta dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, hasil penyaringan itu dilakukan kajian mendalam. “Apakah karya itu

layak atau tidak, punya pengaruh di dunia akademik tidak?” katanya saat ditemui *Media BPP*, Kamis (4/4).

Luthfi menyinggung peneliti yang kerap melakukan penulisan karya ilmiah secara kolaborasi dengan banyak peneliti. Secara indeks, mungkin namanya memiliki angka yang tinggi karena tulisannya tersebar di banyak tempat. Namun, ia meragukan penguasaan materi karya ilmiah yang dihasilkan, karena perannya bisa saja tidak terlalu signifikan. Oleh karenanya, perlu kriteria lainnya selain merujuk indeks Sinta. Ia menyebutkan, dalam menentukan penghargaan dapat menggunakan beberapa pengindeks yang kualitasnya serupa Scopus, yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

Senada dengan Luthfi, Pemimpin Editor Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Universitas Negeri Semarang (Unnes), Cahyo Setyono mengatakan, data yang terhimpun Sinta jangan dulu dijadikan acuan penghargaan. Sebab, masih banyak celah data pada sistem Sinta yang perlu diperbaiki. Ia mengatakan, sebelumnya terungkap kasus kecurangan pengguna Sinta, yang ditindaklanjuti dengan menghukum pelaku. Hal itu membuktikan Sinta masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Ciptakan semangat kolaborasi

Kemunculan Sinta Award seringkali dijadikan ajang persaingan bagi pegiat penelitian di Indonesia. Menurut Ca-



hyo, kondisi ini mereduksi semangat awal terbitnya Sinta. Padahal lanjut Cahyo, Malaysia yang diduga sebagai negara inspirasi lahirnya Sinta banyak menggunakan sistem serupa untuk meningkatkan kolaborasi. Sedangkan terkait merangking hasil penelitian, Malaysia lebih menggunakan portal indeks internasional. “Mereka tidak pernah menggunakan indeksasi nasional untuk membuat peringkat, saya hampir tidak pernah mendengar ada kolega di Malaysia menggunakan pemeringkatan ala nasional itu untuk ditonjolkan,” katanya.

Sedangkan di Indonesia, Sinta dengan segala kekurangannya dijadikan instansi seperti kampus sebagai alat legitimasi prestasi. Ia menyarankan, agar Sinta dikembalikan ke semangat

awal untuk menunjukkan jejak publikasi karya ilmiah di Indonesia, yang muaranya membentuk cara pandang kolaborasi antarpeleliti dan instansi. “Diarharkannya ke kolaborasi bukan ke rangking-rangkingan,” katanya.

Cahyo menjelaskan, tidak semua instansi dengan rangking terbaik menurut Sinta menguasai semua bidang keilmuan. Tidak menutup kemungkinan satu kampus hanya menguasai keilmuan tertentu. Lewat Sinta, fokus keilmuan itu dapat dilihat, dengan harapan menjadi rujukan kolaborasi antarpeleliti. “Misalnya untuk studi *social science*, paling tinggi kampus ini, jadi tidak hanya berhenti pada perankingan,” katanya.

Ia menekankan, jika Sinta hanya berhenti pada pemeringkatan bakal

merugikan kampus-kampus dengan kapasitas sumber daya dan finansial yang minim. Akibatnya, mereka tidak mampu bersaing, dan akan membuatnya semakin tertinggal. Berbeda dengan kampus yang memiliki ongkos tebal untuk menunjang penelitian, yang kemungkinan dapat bertengger di posisi teratas. Selain itu, semangat kampus untuk menggandeng pihak lainnya agar bersama-sama maju pun berkurang. “Kemenristekdikti perlu menyusun strategi, agar Sinta tidak menimbulkan jarak antarinstansi,” katanya

Unnes sendiri, lanjut Cahyo, memiliki lembaga yang bertugas mendampingi kampus-kampus dengan kapasitas sumber daya minim. Namun, lembaga itu dinilai masih belum berjalan

maksimal, karena tersandung anggaran. Sehingga, perlunya dukungan Kemenristekdikti untuk mendorong pendampingan ketimbang mengapresiasi perankingan. “Kemenristekdikti belum fokus ke sana, akhirnya kampus-kampus besar tetap hanya memperebutkan posisi puncak,” terangnya.

Namun menurut Kepala Subdirektorat Fasilitas Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Lukman, pemeringkatan merupakan dampak atas prestasi dari berbagai hasil penelitian. Terkait munculnya pandangan kompetisi, lanjut Lukman, tidak menjadi soal jika dilakukan dengan cara sehat, seperti tidak melakukan kecurangan dan sejenisnya. Lain halnya jika menghalalkan segala cara untuk

mencapai posisi tertentu. “Tahun lalu, yang terjadi ada kecurangan, dia memanipulasi yang kita sebut mafia publikasi, kartel sitasi, sama yang disebut calo akademik,” katanya.

Lukman menambahkan, tampilan Sinta sebenarnya sudah mengondisikan pengguna agar terdorong melakukan kolaborasi antarpihak. Seperti tampilan yang menyajikan daftar PT dari kondisi kualitas penelitiannya terendah hingga yang tertinggi. Dengan demikian, lewat data itu diharapkan menumbuhkan semangat meningkatkan kualitas penelitian bagi instansi tertentu, termasuk dengan cara berkolaborasi dengan pihak lainnya. Tidak hanya itu, untuk mendorong PT agar saling membantu, Kemenristekdikti menerapkan beberapa skema, salah satunya lewat pemberian dana insentif. “Dia harus menarik perguruan tinggi yang jurnalnya belum mapan supaya bisa terakreditasi juga, perguruan tinggi tersebut juga diberikan bantuan berupa pemberian dana, pendampingan, dan kegiatan lainnya,” katanya.

Meski dengan berbagai kondisi, tahun ini Sinta Award tetap bakal dilakukan. Rencananya ajang ini akan berlangsung pada Oktober 2019. Lukman menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyusun kriteria Sinta Award, yang nantinya bakal disebar ke PT maupun litbang K/L. Dengan harapan setiap instansi melakukan perbaikan, untuk memenuhi kualifikasi penghargaan.

Belajar dari gelaran tahun lalu yang diakui banyak kelemahan, tahun ini Sinta Award hadir dengan skema penilaian lebih ketat, yakni berdasarkan kualitas penelitian. Salah satu aspek penilaian itu misalnya rekam jejak di Sinta. Lukman mencontohkan, seorang peneliti yang tiga tahun terakhir

memiliki angka prestasi yang tinggi tidak langsung diberikan nilai maksimal. Namun, data itu dijadikan bahan awal untuk dilakukan pengkajian apakah prestasi tersebut linear selama tiga tahun, atau hanya kurun waktu tertentu. “Apakah dia konsisten dari tahun ke tahun melakukan penelitian, kemudian *output* capaiannya sampai apa, terus penelitiannya berkolaborasi *nggak* dengan yang lainnya, kemudian dia didukung pendanaannya dari mana saja,” kata Lukman. Dengan mekanisme demikian, pihak yang memiliki peringkat tinggi di situs Sinta tidak secara otomatis dijadikan sebagai peraih Sinta Award.

Nasib BPP Kementerian/Lembaga

Tanggung jawab Kemenristekdikti mestinya tidak hanya berhenti pada apresiasi penghargaan tetapi juga mendorong peningkatan pengelolaan jurnal, termasuk yang dikelola K/L. Berlakunya Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, memberikan kewenangan kepada Kemenristekdikti untuk menangani seluruh jurnal di Indonesia. Termasuk jurnal-jurnal dari K/L, yang sebelumnya dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Akibatnya, jurnal yang diakomodasi Kemenristekdikti kian melimpah, karena sebelumnya kementerian ini telah menangani banyak jurnal dari perguruan tinggi (PT). Itu artinya, Kemenristekdikti membutuhkan tenaga lebih dan melakukan banyak koordinasi dengan pihak lain untuk mengurusnya.

Kepala Bidang Publikasi dan Fasilitas Penelitian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Hukum dan HAM Fitriyani mengatakan, dengan kebijakan pengelolaan jurnal satu pintu membuat penilaian menjadi mudah,

karena dilakukan secara daring. Namun Fitriyani menyebutkan, kebijakan satu pintu mestinya tidak hanya memudahkan proses penilaian. Tetapi, perlu juga diimbangi dengan pembinaan yang dilakukan Kemenristekdikti khususnya pada jurnal yang dikelola K/L. Misalnya, menerapkan strategi untuk meningkatkan peringkat jurnal di Sinta agar lebih baik. BPP Kementerian Hukum dan HAM sendiri, saat ini memiliki tiga jurnal yang dua di antaranya terakreditasi Sinta 2 dan sisanya Sinta 3. Seperti diketahui, peringkat Sinta terdiri dari 1 sampai 6, sehingga upaya peningkatan kualitas jurnal masih diperlukan.

Fitriyani mengaku, selama ini belum ada komunikasi intens dengan Kemenristekdikti untuk meningkatkan kualitas jurnal. Berbagai langkah yang dilakukan justru lebih aktif dilakukan pihaknya, seperti mengundang Kemenristekdikti menjadi narasumber pada suatu diskusi. “Kami mengundang narasumber dari Kemenristekdikti untuk memberikan informasi-informasi terkini terkait pengelolaan jurnal,” katanya saat dihubungi *Media BPP*, Kamis (11/4).

Meski Kemenristekdikti sudah melakukan banyak upaya, tetapi Fitriyani merasa langkah itu lebih ditujukan ke perguruan tinggi (PT). Ia sem-

“PIHAK YANG MEMILIKI PERINGKAT TINGGI DI SITUS SINTA TIDAK SECARA OTOMATIS DIJADIKAN SEBAGAI PERAIH SINTA AWARD

pat beberapa kali mengikuti kegiatan pembinaan jurnal dari Kemenristekdikti. Namun, ia melihat komposisi peserta lebih didominasi PT ketimbang pengelola jurnal K/L. Beberapa program insentif yang digelar Kemenristekdikti juga pernah diikutinya, tetapi info awalnya justru bergulir dari PT. Ia menilai, Kemenristekdikti belum aktif melakukan komunikasi serta memetakan kondisi kualitas jurnal yang dikelola K/L. “Saya belum melihat perhatian ke pengelola jurnal K/L ini, sampai sekarang belum melihat dari Kemenristekdikti,” katanya.

Ia berharap, Kemenristekdikti dapat memberikan perhatian ke K/L sama besarnya seperti yang diberikan ke PT. Sebab menurutnya, saat ini program untuk PT terlihat lebih jelas ketimbang ke K/L. “Karena satu pintu saja yang melakukan penilaian, harusnya *kan* termasuk pembinaannya,” katanya.

Ihwal minimnya perhatian Kemenristekdikti kepada jurnal yang dikelola K/L juga turut dirasakan pengelola Jurnal Sosio Konsepsia Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Sosial. **Habibullah** tenaga teknologi informasi dan editor Jurnal Sosio Konsepsia menyebutkan, saat ini ikhtiar meningkatkan kualitas jurnal lebih ditekankan pada internal pengelola. Habibullah menyebutkan, belum ada pendampingan khusus yang dilakukan Kemenristekdikti. Jika dibandingkan saat masih dikelola LIPI, pendampingan yang dilakukan Kemenristekdikti terhadap K/L masih dinilai kurang.

Ia menduga, hal itu dampak dari kebijakan satu pintu yang membuat jumlah jurnal yang dikelola Kemenristekdikti melimpah. Di sisi lain, sumber daya Kemenristekdikti juga terbatas. Berbeda saat masih ditangani LIPI, yang secara spesifik hanya mengurus jurnal K/L. “Kalau dulu *kan* di LIPI ada semacam pembinaan ke jurnal-jurnal, LIPI sendiri



kadang setiap tahun mengundang pengelola jurnal, kita juga sering mengundang narasumber dari LIPI untuk datang ke kantor melakukan pembinaan ke kita” katanya.

Habibullah menjelaskan, saat ini tidak ada komunikasi khusus yang dibangun dengan Kemenristekdikti, terlebih penilaian jurnal pun dilakukan secara daring, yang meminimalisasi komunikasi langsung. Dirinya mengaku tidak mengetahui siapa *reviewers* jurnal Kemenristekdikti dan kontak yang dapat dihubungi. “Kalau dulu *kan* di LIPI kita tahu yang menilai secara teknis dan substansi, dan kita bisa meminta sumbang saran dari mereka untuk akreditasi itu, kalau sekarang *kan* lewat daring dan tidak ada kontak personnya Kemenristekdikti,” katanya.

Selain itu, ia merasa jika K/L hanya menjadi pelengkap peserta dari gelaran Kemenristekdikti karena lebih banyak melibatkan PT. Ada beberapa kegiatan *workshop* yang terkesan hanya dikhususkan untuk

PT. Habibullah berharap, Kemenristekdikti bisa intens melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap jurnal yang dikelola K/L. Ia mengaku, jurnal yang dikelolanya masih perlu pembenahan di wilayah tata kelola penanganan jurnal. Seperti penggunaan sistem *Open Journal System* (OJS) yang tidak semua bagian redaksi bisa mengoperasikannya. Sehingga untuk mengatasi hal itu, terkadang dirinya dan juga manajer jurnal turut membantu tugas redaksi. Kondisi ini menurutnya cukup membuat repot pengelolaan dan perlu adanya pembenahan. “Terutama anggota redaksi yang sudah berumur,” katanya. Saat hendak melakukan pembinaan, pihaknya terbentur anggaran yang minim.

Selain persoalan tata kelola, pembinaan juga perlu dilakukan untuk mendorong kenaikan peringkat Sinta agar lebih baik. Terutama untuk memenuhi keberadaan mitra bestari, ia mengaku masih mengalami keterbatasan untuk memenuhinya. Habibullah berharap, Kemenristekdikti dapat memberikan rekomendasi daftar mitra bestari yang sesuai dengan jurnalnya.

Meski perhatian yang diberikan kurang, Habibullah mengaku kerap mengikuti berbagai gelaran yang diadakan Kemenristekdikti, seperti Geliat Arjuna yang diadakan beberapa waktu lalu. Selain itu, Kemenristekdikti pernah mengadakan program dana hibah untuk pengelola jurnal. Namun, karena tidak memenuhi syarat skema pemberian, jurnalnya tidak mendapatkan. Pemberian dana hibah oleh Kemenristekdikti memang ditekankan pada standar kompetitif.

Pendampingan pengelolaan jurnal secara khusus memang belum dilakukan oleh Kemenristekdikti. Hal ini juga dialami Jurnal Baca; Jurnal Dokumentasi dan Informasi Pusat Data dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI. Meski demikian Manajer Jurnal **Wahid Nasihuddin** menyebutkan, lebih banyak mengandalkan jaringan di Kemenristekdikti, ketika menemui persoalan yang mengganggu kualitas jurnal. “Melalui personal, soalnya kayak pejabat seperti Bapak Lukman kan alumni PDII juga,” katanya.

Wahid menyebutkan, belum adanya perhatian khusus Kemenristekdikti terhadap jurnal yang dikelola K/L, merupakan persoalan yang mesti segera diselesaikan. Ia menyarankan agar K/L saling bekerja sama dengan membentuk konsorsium. Dari wadah itu minimal menggelar program tahunan yang mengundang Kemenristekdikti sebagai fasilitator untuk menstandarkan jurnal-jurnal yang ada di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. “Perlu ada kerja sama dengan Kemenristekdikti dalam hal peningkatan kualitas jurnal terakreditasi nasional dan internasional,” pungkasnya.

Ihwal perhatian Kemenristekdikti ke K/L, Lukman menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan beberapa program yang juga diperuntukan bagi K/L. Salah satunya membangun Sistem Informasi Iptek Nasional (SIIN) yang berfungsi memetakan kekuatan wadah penelitian di K/L. Melalui layanan itu kapasitas penelitian K/L mulai dari anggaran, sarana prasarana sumber

daya manusia, dan beberapa aspek lainnya dapat diketahui. Lukman menuturkan, SIIN menghubungkan hasil penelitian dengan Sinta. Sedangkan sumber daya manusia K/L nya akan dihubungkan ke Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat), dan peneliti perekayasa.

Selain itu, dengan banyak informasi dari masing-masing K/L memungkinkan terjalannya kerja sama. Ia mencontohkan, salah satu kementerian yang membutuhkan alat tertentu yang sebenarnya terdapat di kementerian lainnya, dengan terhubung keduanya dapat berkerja sama. Sehingga anggaran pengadaan alat di kementerian tersebut bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya. “Makanya Presiden mengingin-

“

BELUM ADANYA PERHATIAN KHUSUS KEMENRISTEKDIKTI KEPADA JURNAL YANG DIKELOLA K/L, MERUPAKAN PERSOALAN YANG MESTI SEGERA DISELESAIKAN.

kan adanya Badan Riset Nasional dan macam tujuannya itu untuk menyatukan semua, salah satu jembatannya melalui program ini,” katanya.

Meski bakal diluncurkan pada 10 Agustus 2019 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, tetapi Lukman mengaku telah bergerilya mengimbau K/L untuk mengisi data SIIN. “Perjuangan terbesar adalah mengumpulkan data ini, sebetulnya mengumpulkan data mudah karena masing-masing K/L sudah mempunyai data dasar sendiri, kita tinggal integrasikan saja,” katanya.

Selain SIIN, Kemenristekdikti juga mempunyai Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Simlitabmas). Meski awalnya dibangun untuk mewadahi PT, tetapi saat ini layanan tersebut juga diperuntukan bagi K/L.

“Ada skema yang untuk PT, ada juga skema untuk K/L,” katanya.

Melalui Simlitabmas Kemenristekdikti dapat membantu kegiatan penelitian yang ada di PT dan K/L. Lukman mencontohkan, seorang peneliti yang akan mengikuti kegiatan seminar di luar negeri tetapi tersandung anggaran. Pihaknya bakal memberikan dana bantuan selama syarat dan ketentuan terpenuhi. Selain itu, peneliti yang memiliki publikasi internasional juga diberikan dana apresiasi. “Cuma memang kita tidak mungkin memberitahu semuanya, mungkin saling pro aktif juga,” katanya.

Jika terdapat jurnal K/L yang belum terakreditasi, Kemenristekdikti juga memiliki program pembinaan dan pendampingan. Dia menyebutkan, beberapa K/L yang kekurangan infrastruktur dan keahlian khusus telah diikuti program tersebut. “K/L yang memiliki jurnal tetapi belum terakreditasi, kita ikutkan pelatihan pendampingan akreditasi, sampai ke peringkat internasional kita punya program,” kata Lukman.

Bagi mereka yang terlewat dari kegiatan pelatihan, dapat menggelar forum mandiri. Biayanya bisa bersumber dari internal K/L atau pun dari Kemenristekdikti. “Biaya bisa dibicarakan tinggal komunikasi saja,” katanya. Ia mencontohkan salah satu kementerian yang menggelar forum mandiri karena memiliki banyak satuan kerja.

Sementara untuk komunikasi yang belum intens ke K/L, Lukman mengaku berbagai sosialisasi itu baru dilakukan dengan unit kerja utama. Harapannya, unit tersebut dapat membagikan ke unit kerja di bawahnya, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) yang memiliki unit kerja tersebar di banyak daerah. “Kayak PT pun ada LL Dikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi), kita komunikasikannya kepada empat belas LL Dikti. Mereka yang menyebarkan informasinya ke seluruh PT, jadi berjenjang,” pungkasnya.

■ MUJAENI

Upaya Jayapura Agar Terus Berdaya



Kota Jayapura memiliki posisi penting, karena mampu agenda strategis pembangunan pada skala nasional maupun internasional. Ibu Kota Provinsi Papua ini menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan sebagai kota perbatasan antara negara Indonesia dengan Papua New Guinea.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura mencatat, daerah tersebut berpenduduk sekira 293.690 jiwa. Angka itu menempatkan Jayapura sebagai daerah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Papua. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, urbanisasi di kota itu begitu pesat. Tingkat perkembangan penduduk mencapai 2,61 persen per tahun. Angka migrasi ke Jayapura mencapai 40,1 persen pada 2017 dari total jumlah penduduk (BPS Papua).

Selain menjadi pusat pemerintahan, Jayapura juga menjadi sentra perekonomian di Provinsi Papua. Hal ini ditunjang dengan keberadaan pelabuhan, pelayanan publik, dan fasilitas lainnya. Berbagai institusi, lembaga, atau pun entitas bisnis berkembang dengan memanfaatkan ruang kota. Selain itu, dalam bidang pertahanan dan keamanan, kota ini menjadi lokasi strategis, baik skala nasional dan regional dengan menjadi markas regional bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi.

Pelabuhan Jayapura menjadi tempat paling aktif di Papua dengan melayani pergerakan penumpang, barang, dan jasa antarwilayah di Indonesia. Beragam fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan, infrastruktur transportasi, kebutuhan dasar, perekonomian, hingga rekreasi dan sosial budaya berada di kota tersebut. “Kota Jayapura merupakan tolok ukur kesejahteraan dan kemajuan di Provinsi Papua dan Kawasan Timur Indonesia,” kata Benhur Tomi Mano Walikota Jayapura, Senin (29/4).

BPS Kota Jayapura mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota tersebut tertinggi di Provinsi Papua, dengan angka 79,23 persen. Angka itu berada di atas rata-rata Provinsi Papua 59,09 persen dan IPM nasional 70,81 persen.

Melihat potensi dan peran Kota Jayapura, Tomi menyebutkan, pengembangan kota ini menjadi simpul utama bagi pembangunan ekonomi regional, dan perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di kawasan itu. Ditambah situasi pembangunan di wilayah Timur Indonesia masih jauh tertinggal ketimbang daerah lainnya.

Adakan JIC

Salah satu langkah untuk meningkatkan potensi daerah, Pemerintah Kota Jayapura menggelar *Jayapura International Conference* (JIC) 2019. Kegiatan ini merupakan wadah untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan Kota Jayapura sebagai *partner* utama dalam kolaborasi antara daerah di Papua dengan berbagai perguruan tinggi, kementerian/lembaga, entitas bisnis, pelaku usaha, komunitas kreatif, lembaga donor, pusat-pusat penelitian, baik tingkat nasional maupun regional Asia-Pasifik.

Tomi berharap, lewat kegiatan tersebut dapat mendorong publikasi dan produktivitas berbagai hasil penelitian dan pengembangan akademik maupun ilmiah, yang dilakukan di Kota Jayapura. “Hal itu untuk menjadi dasar pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, khususnya di bidang ekonomi, pariwisata, dan pengembangan kawasan perbatasan,” terangnya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari 29-30 April 2019, dengan menghadirkan narasumber utama dari berbagai latar belakang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Narasumber itu di antaranya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Direktur Program Perencanaan Kota dan Wilayah, Sekolah Arsitektur, Desain dan Perencanaan, University of Sydney, Australia Paul Jones, serta beberapa narasumber lainnya.

Adapun undangan dan peserta JIC berjumlah sekira 300 orang. Mereka terdiri dari jajaran Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua, Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penelitian dan Pengembangan se-Propinsi Papua, Perguruan Tinggi se-Kota Jayapura, pelaku bisnis se-Papua, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Distrik, Kelurahan dan Kampung se-Kota Jayapura, komunitas ekonomi kreatif dan sanggar seni budaya, asosiasi profesi bidang pariwisata dan budaya, media massa, serta peneliti dan akademisi ekonomi regional, pariwisata dan bidang perkotaan.

Tomi menyebutkan, dengan adanya JIC telah menghadirkan berbagai kegiatan positif bagi daerahnya. Seperti terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, termasuk dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negara (BPP Kemendagri), salah satunya terkait dengan inovasi daerah.

■ MUJAENI

BPP DAERAH

Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi

MINIM STRUKTUR
KAYA FUNGSI

Sejak dibentuk pada 2016 berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi No 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bidang Litbang) Bappeda Kota Sukabumi langsung tancap gas. Dengan usia yang terbilang baru, Bidang Litbang menjadi OPD yang bisa dikatakan paling sibuk di antara OPD lain di Bappeda Kota Sukabumi. Jika melihat beberapa program Bidang Litbang selama dua tahun terakhir, cukup disebut sebagai lembaga kaya fungsi. Di sisi lain, banyak lembaga kelitbang sekelas Badan namun masih kebingungan menentukan kegiatan.

Minimnya struktur tidak menjadi alasan. Bidang Litbang Kota Sukabumi melihat masih banyaknya masalah perkotaan yang perlu dikaji, sebagai rekomendasi bagi pembangunan Kota Sukabumi yang berkelanjutan. Dengan beberapa ide program yang digagas, juga perhatian pemerintah terhadap lembaga penelitian, Bidang Litbang Kota Sukabumi tidak menghadapi kesulitan berarti dalam pendanaan. Pada 2017, Bidang Litbang tersebut mendapat anggaran sekira Rp 700 juta dan bertambah menjadi sekira Rp 2 miliar. Dan itu relatif stabil setiap tahun anggaran.

Rencana aksi smart city

Salah satu program yang digagas pada 2017 di antaranya adalah rencana

aksi *smart city*. Ditemui di Bappeda Sukabumi Mei 2019 lalu, Kepala Bidang Litbang Bappeda Sukabumi Eneng Rahmi mengatakan penggunaan teknologi informasi saja tidak cukup untuk membangun kota cerdas. Dibutuhkan pendekatan yang optimal terhadap suatu masalah yang terjadi pada sebuah kota.

Konsep *smart city* pada umumnya bisa disebut kemandirian kota dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Sehingga *smart city* akan lebih tersistem dan dapat memberikan kemudahan bagi warganya.

“Tujuannya untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman bagi warganya, memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, dan untuk menciptakan aparatur yang profesional. Di sisi lain tujuan *smart city* untuk menunjang kota dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan) guna membentuk kota yang *sustainable*,” terang Rahmi.

Pada 2017, konsep *smart city* hanya sebatas kajian. Namun pada tahun berikutnya dilakukan beberapa program untuk mencapai indikator *smart city*, salah satunya adalah *updating database*. *Database* ini nantinya akan memastikan tidak ada kajian yang sama yang dilakukan perangkat daerah. Pasalnya, selama ini kajian yang



dilakukan tidak terfokus hanya di lembaga kelitbang. Beberapa OPD juga melakukan kajian sebagai salah satu programnya.

Bidang Litbang Kota Sukabumi kemudian berinisiatif untuk memperbaiki basis data kajian yang dilakukan setiap OPD yang ada. *Database* tersebut sekaligus menjadi rumusan bahan perencanaan dan pembangunan Kota Sukabumi. Semua data kajian yang masuk akan terhimpun di sebuah aplikasi *e-litbang*. “Dan ini bermanfaat untuk data agar terjadi efisiensi kegiatan dan anggaran. Selain itu aplikasi ini juga bisa digunakan oleh semua OPD, lebih spesifik lagi Bappeda, juga oleh kelompok masyarakat unsur akademisi,” ucap Rahmi.

Menurut Rahmi, pengembangan *smart city* juga memerlukan sebuah *branding* kota. Untuk itu, pada 2017 pula Bidang Litbang menggagas program penelitian *city branding*, sebagai upaya untuk membentuk daya saing kota. Beberapa kota di Indonesia menjadikan branding sebagai fokus utama dan kebutuhan yang cukup mendesak. Dengan *branding*, sebuah kota memiliki *positioning* yang kuat khususnya dalam bidang pariwisata. *City branding* membutuhkan peran aktif pemerintah dan *stakeholder* untuk mengemas kota dengan baik. Citra kota memiliki kekuatan dalam membentuk merk sebuah kota bahkan memengaruhi kota itu sendiri. Beberapa kota yang sudah lebih dulu menerapkan *city branding* misalnya Kota Bandung dengan *brand*

“bdg” atau Yogyakarta dengan “Istimewanya”.

Begitu juga dengan Kota Sukabumi yang mulai mencontoh beberapa kota yang lebih dulu menerapkan *city branding* yang dinilai sukses mengangkat citra dan karakter kota kepada masyarakat. Namun, *brand* Kota Sukabumi yang semula dibuat sebagai “Kota Kamonesan” menurut Rahmi belum disetujui, dan akan dianalisis kembali mengingat kata tersebut tidak terlalu familiar di telinga masyarakat. “Ide ini sebenarnya muncul dari beberapa kota yang sukses menerapkan *branding*. Tujuan kita membuat *brand* semakin besar dan bersinar. Karena ekuitas *city branding* menyangkut *awareness, image, maupun loyalty*,”

ucapnya.

Memaksimalkan pembangunan kota

Selain *smart city* memerhatikan pemanfaatan ekonomi lokal menjadi penting. Menurut Barlian Hady Kasubid Litbang Ekonomi dan Pembangunan, luas Kota Sukabumi yang hanya 48,42 kilometer persegi sebenarnya memiliki banyak potensi yang belum dimaksimalkan. Peluang juga semakin besar jika melihat letak geografis Kota Sukabumi yang berada di antara pusat pertumbuhan ekonomi seperti metropolitan Jakarta dan Bandung Raya. “Ini menjadi modal dasar. Di waktu yang akan datang, juga akan ada tol dan akan semakin menggerakkan arus orang dan barang keluar masuk kota ini, pemanfaatan potensi apa saja, itu yang akan kita kaji,” ucapnya.

Untuk itu, pada tahun ini, Bidang Litbang juga membuat beberapa program yang mendukung ke arah tersebut, terutama dalam hal pengembangan wisata. Sebelumnya pemetaan potensi ekonomi daerah juga dilakukan oleh Bidang Litbang dengan mengidentifikasi potensi PAD di Kota Sukabumi. Pemetaan tersebut juga menghasilkan beberapa informasi seperti data target pajak eksisting, potensi ekonomi yang belum terdata, serta data komunitas yang memiliki potensi daerah. Pemetaan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan PAD.

Memanfaatkan alam Sukabumi yang masih asri, pengembangan wisata lebih diarahkan pada alam terbuka, seperti pengembangan potensi wisata daerah aliran sungai (DAS) Cimandiri. Penelitian ini, selain untuk meningkatkan ekonomi juga memberikan rekomendasi model kebijakan pengelolaan DAS secara partisipatif dan *sustainable*. Rahmi mengatakan dengan penelitian tersebut akan didapatkan beberapa data seperti kondisi hidrologi dan *landscape*, kondisi keanekaragaman hayati, proyeksi potensi



pariwisata dan kelembagaan, serta kondisi sosial ekonomi. “Pengelolaan DAS Cemandi juga melibatkan berbagai unsur/pihak dalam rangka menggalakan potensi sumber daya alam di Kota Sukabumi yang mendukung sektor pariwisata,” tutur Barli.

Tujuan pariwisata lain yang dikembangkan adalah pariwisata berbasis *heritage*, yakni pariwisata cagar budaya. Saat ini menurut Rahmi, Sukabumi memiliki nilai sejarah yang cukup bagus untuk dijadikan wisata sejarah yang bisa dijual kepada masyarakat.

Dari hasil penelitiannya, Sukabumi memiliki lorong bawah tanah yang cukup lebar yang terdapat di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Warudoyong yang dibangun sekira tahun 1900-an. Lorong bawah tanah tersebut adalah *drainase* perkotaan pada masa kolonial Belanda. Lorong tersebut tengah dikaji terkait kesiapannya jika seandainya dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Sukabumi.

Penelitian lorong bawah tanah merekomendasikan sebuah kebijakan pemerintah Kota Sukabumi dalam upaya

pengembangan wisata cagar budaya atau pemanfaatan kembali lorong bawah tanah sesuai fungsinya. Namun rencana tersebut hingga saat ini belum ditindaklanjuti, mengingat kualitas air di lorong bawah tanah tidak cukup baik. “Selain air, kandungan udara di dalam juga harus dipastikan aman untuk pariwisata,” tambah Rahmi.

Objek wisata lain yang bisa dikembangkan diakui Rahmi adalah pemanfaatan kawasan wisata Cikundul di Kecamatan Lembur Situ. Beberapa spot wisata yang ada di kawasan tersebut saat ini sudah digarap. Seperti wisata arung jeram, wisata pemandian air panas, hingga agroeduwisata yang tengah bergeliat.

Agroeduwisata Cikundul memiliki konsep menggabungkan wisata dengan edukasi pertanian. Ditemui di kantornya Mei 2019 lalu di Jalan Kapitan, Cikundul, Kecamatan Lembur Situ Muhammad Irvan Zaeni Lukman seorang staf Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC) mengatakan kawasan tersebut dikelola langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Peri-



kanan (DKP3) Kota Sukabumi.

Pengembangan wisata tersebut sudah dimulai sejak 2015. Awalnya hanya tempat pengembangan tanaman hortikultura serta laboratorium kultur jaringan DKP3. Kawasan mengalami perkembangan ketika Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan program PSD-KU-nya (Program Studi di Luar Kampus Utama) membuat kandang ternak di kawasan tersebut. Sehingga lahan seluas 4,3 hektare itu saat ini memiliki empat fungsi yaitu edukasi, produksi, wisata, dan konservasi.

Setiap hari KAC didatangi pengunjung yang tertarik dengan pengembangan berbagai tanaman seperti sayuran, buah-buahan, peternakan ikan, dan sapi. Pengunjung yang datang pun dari mulai anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), SD, SMP, SMP, Perguruan Tinggi, hingga masyarakat umum. “Pengunjung bisa berwisata sambil mendapatkan pengetahuan mengenai cara menanam sayuran, pembenihan ikan, dan penggemukan sapi,” ucapnya.

KAC juga memproduksi berbagai sayuran yang dipasok langsung ke swalayan yang ada di Kota Sukabumi, dilakukan selama 3 kali seminggu. Beberapa sayuran yang dipasok seperti kangkung dan selada yang ditanam secara hidroponik.

Di kawasan tersebut juga tengah dikembangkan wisata arung jeram, yang mulai ramai. Sungai Cikundul memiliki arus air yang tidak terlalu besar, dan cocok bagi segala usia. Namun, beberapa spot dianggap cukup mengganggu, misalnya, masih adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa titik aliran sungai. Pada masa mendatang Tim Bidang Litbang diharapkan bisa memberikan rekomendasi terkait sampah dan TPA agar kekurangan-kekurangan tersebut terus diperbaiki.

Kerja sama berbagai pihak

Permasalahan sampah di Kota Sukabumi memang tengah menjadi sorotan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, volume produksi sampah masyarakat di kota itu

rata-rata mencapai 165 ton perhari. Berbagai upaya telah dilakukan dinas setempat untuk mengurangi produksi sampah di antaranya daur ulang sampah oleh masyarakat serta bank sampah. Bidang Litbang pun harus turun tangan mencari alternatif pengurangan sampah rumah tangga. Mengingat target pemerintah adalah mengurangi sampah keluarga hingga di bawah 2 kg perhari dari setiap orang.

Pada tahun ini, Bidang Litbang membuat program manajemen sosial budaya persampahan. Program tersebut juga menganalisis pola budaya masyarakat dan bentuk partisipasinya dalam pengelolaan sampah. Salah satu yang menjadi perhatian Bidang Litbang adalah daur ulang sampah rumah tangga menjadi belatung atau larva (maggot) untuk pakan ternak berprotein tinggi seperti lele.

Salah satu aktivis lingkungan Kota Sukabumi dalam sebuah forum di Bappeda Kota Sukabumi bercerita, sampah organik akan sangat bermanfaat bahkan bernilai ekonomi, jika dikelola dengan benar. Menurutnya jika dikembangkan dengan baik, maggot selain akan mengurangi timbunan sampah juga bagus untuk pakan ternak terutama lele. Selain itu, menurutnya pembiayaan maggot dinilai cukup ekonomis, dan tidak berbabu. “Cukup menyediakan baskom sebesar 60 cm, 1 kg maggot mampu mengurai 1kg sampah, itu sudah berubah menjadi kompos dan tidak bau,” ucapnya ketika mempresentasikan pengembangan budidaya maggot.

Namun dalam mengembangkan maggot, Menurutnya masih terkendala masalah. Kepercayaan masyarakat kepadanya tidak murni 100 persen. Pemerintah diminta turun tangan untuk meyakinkan dan membimbing masyarakat di mana ia mengembangkan maggot. Untuk mengembangkan budidaya maggot dan meminimalisasi sampah kota, ia tidak butuh teknologi. Namun, menurutnya peran serta pemerintah untuk masyarakat sangat

penting, mengingat masyarakat tidak terlalu mendengar jika dia sendiri berbicara.

Selain itu, pemerintah juga tengah menjalin kerja sama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dalam mengembangkan budidaya maggot. Program yang digagas UMMI dianggap cukup berhasil dalam mengembangkan maggot yang sudah dilakukan di 4 Kecamatan di Kota Sukabumi dan 2 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Pengembangan maggot oleh UMMI mulai sejak 2017, ketika mengembangkan budidaya lele sejak 2014 memanfaatkan lubang bekas galian pasir. Pada masa mendatang budidaya maggot akan dirangkul dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. “Kita punya ide, agar sampah organik bermanfaat, untuk budidaya maggot, selain itu juga pemanfaatan sampah sebagai bagian dari estetika kota. Maggot nantinya menciptakan protein hewani, dan bermanfaat untuk budidaya lele, pengganti pakan lele. Maggot dapat menciptakan protein untuk ikan. Ini solusi di tengah mahalnya harga pakan ikan,” jelas salah seorang perwakilan dari UMMI.

Pertemuan dengan beberapa pihak bisa menjadi salah satu bentuk kerja sama pemerintah dengan akademisi, masyarakat, dan pelaku bisnis. Pertemuan tersebut diharapkan bisa menghasilkan tindaklanjut dan *output* yang baik bagi pembangunan Kota Sukabumi di masa mendatang.

Beberapa program yang digagas Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi di atas menjadi contoh baik bagi Lembaga kelitbang di daerah lainnya. Program-program yang digagas tersebut menunjukkan, bahwa besar kecilnya lembaga tidak berpengaruh terhadap kinerja. Selama ada masalah maka lembaga kelitbang adalah yang pertama yang memberi rekomendasi bagi kebijakan pemerintah setempat.

■ SAIDIRIFKY

Payakumbuh, Sumatera Barat

Geliat Payakumbuh Tangani Sampah

Sampah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berbagai strategi digalakkan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, termasuk di tingkat daerah. Salah satu daerah yang fokus pada penanganan isu sampah adalah Kota Payakumbuh. Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat ini, setiap hari dapat menghasilkan sampah hingga 78 ton. Dari jumlah tersebut, sekira 65 persen atau 50,7 ton merupakan sampah rumah tangga dan 35 persen atau 14,3 ton adalah sampah plastik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan, tahun ini ditargetkan sampah yang terkelola sekira 30 persen. Target itu tercantum dalam indikator kinerja tentang kebijakan dana insentif daerah, pada poin ke-11. Jika target terpenuhi, Payakumbuh bakal menerima dana insentif sebesar Rp 9 miliar untuk pengelolaan sampah. “Jadi untuk tahun ini kalau sampah terkelola 30 persen maka baru bisa dapat (dana insentif), maka dari itu kami kejar,” kata Yunimar Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup DLH Kota Payakumbuh, saat ditemui *Media BPP*, Selasa (19/3).

Meski menghasilkan berbagai jenis sampah, Dafrul mengaku, saat ini Payakumbuh belum intens melakukan pemilahan antara sampah plastik dengan sampah organik. Padahal, salah satu kunci pengelolaan sampah adalah disiplin melakukan pemilahan. Oleh karenanya, salah satu fokus utama Payakumbuh saat ini, yakni membina

sekolah-sekolah dan kelurahan agar disiplin melakukan pemilahan, sehingga sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak tercampur. Selain itu, dengan adanya pemilahan akan diketahui mana saja sampah yang dapat di-*reuse*, *reduce*, atau pun *recycle*.

Guna memberikan kesadaran masyarakat ihwal pentingnya memerhatikan sampah, DLH Payakumbuh meningkatkan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan di berbagai tempat umum, seperti pasar, jalan raya, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) aktif yang jumlahnya 112 lokasi. Beragam strategi sosialisasi digunakan, misalnya dengan memanfaatkan siaran radio di pasar, termasuk memasang pengeras suara di becak motor pengangkut sampah yang tersebar di 47 kelurahan. “Jadi rencananya becak itu sambil berputar mengangkut sampah juga sekalian melakukan sosialisasi,” kata **Hepi Kabid Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Pakayumbuh**.

Pengadaan becak tersebut berasal dari anggaran DLH Kota Payakumbuh serta masing-masing kelurahan. Kota Payakumbuh menyediakan 19 becak, sedangkan sisanya dibebankan pada setiap kelurahan. Meski terdapat dua sumber pendanaan, sampah yang terangkut tetap ditaruh di dua transit depo. Namun, ada pula sampah yang langsung diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebanyak 18 truk dikerahkan pemerintah untuk melancarkan tugas pengangkutan.

Hepi menyebutkan, pemilahan sampah



masih dilakukan di kelurahan yang ditunjuk sebagai *pilot project* pengelolaan sampah. Di kelurahan binaan itu, DLH Payakumbuh rutin melakukan pendampingan, termasuk soal pemilahan sampah.

Yunimar menerangkan, saat ini masih segelintir keluarga yang melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang. Itu artinya, kesadaran masyarakat memerhatikan sampah belum terbentuk. Menyikapi kondisi itu, selain sosialisasi DLH Payakumbuh melakukan beberapa langkah, salah satunya lewat kerja sama dengan wadah Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membentuk bank sampah. “Kalau dari Dasa Wisma itu nanti 1 kelompok itu *kan* maksimal 20 rumah, jadi nanti ada pengurusnya, *nah* pengurusnya itu yang mengolah itu (bank sampah),” katanya.

Yunimar sendiri mengaku telah menerapkan pemilahan sampah di lingkup keluarganya. Bahkan, ia juga memiliki komposter untuk melakukan pengelolaan sampah. Alat itu juga sudah dibagikan kepada beberapa lokasi percontohan. Saat ini jumlah total komposter yang diberikan, sebanyak 250 unit

tersebar di tujuh kelurahan binaan. “Kenapa baru ke daerah binaan? Karena kembali lagi keterbatasan dana,” terangnya.

Tidak hanya di kelurahan, sebelumnya komposter juga diberikan di beberapa sekolah. Tujuannya agar dijadikan alat pembelajaran bagi siswa dalam membuat pupuk kompos. Meski sekarang program tersebut lebih fokus diberikan kepada kelurahan sebagai *pilot project* pengolahan sampah. Untuk menangani persoalan sampah rumah tangga, DLH Payakumbuh telah melakukan sosialisasi pembuatan lubang biopori dari

satu rumah ke rumah lainnya. Menurut Yunimar, pengadaan biopori cukup efektif dalam menangani sampah organik. Selain ampuh, biaya yang dikeluarkan juga minim karena satu alat bisa digunakan beberapa kali. “Sampai saat ini, sudah 17 kelurahan yang memiliki lubang biopori,” katanya.

Salah satu daerah yang memanfaatkan lubang biopori adalah Kelurahan Kuto Tuo. Sebanyak 97 lubang tersebar di kelurahan ini. Tidak hanya memfasilitasi pembuatan lubang, pihak kelurahan juga membantu proses pengangkutan hasil pengelolaan. Masyarakat

yang memiliki lubang biopori cukup memberitahu petugas kelurahan apabila sampah organik yang tersimpan sudah bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. “Jadi yang punya rumah tinggal isi (sampah organik), hasilnya juga buat mereka,” kata **Danil Defo Lurah Kuto Tuo**.

Sedangkan jenis sampah lainnya, kelurahan ini mengandalkan angkutan becak motor yang membawa sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Kendati demikian, ada pula sampah plastik yang dikelola menjadi kerajinan berupa tas dan lainnya. Pengelolaan tersebut banyak dilakukan oleh bank sampah meski keberadaannya masih terbatas.

Aktifkan bank sampah

Bank sampah diakui masih didominasi oleh sekolah. Meskipun sebenarnya, pada 2016 seluruh kelurahan di Payakumbuh memiliki bank sampah. Namun, karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, bank sampah di kelurahan menjadi tidak beroperasi. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Payakumbuh Rinta berharap, tahun ini dapat mengaktifkan kembali wadah tersebut. “Mudah-mudahan tahun ini bersama Ibu Yunimar, kami akan turun lagi untuk mengaktifkan kembali bank sampahnya,” jelasnya.

Yunimar menambahkan, pengaktifan bank sampah dapat dimulai dari TPST. Dirinya berjanji, pembinaan bank sampah bakal segera digencarkan. Mulai dari proses pengumpulan sampah sampai distribusinya. Ia mengaku, selama ini masih bingung menentukan tempat distribusi hasil pengumpulan lewat bank sampah.

Proses pembuangan sampah rumah tangga diawali dengan dibentuknya kepengurusan di tingkat kelurahan. Nantinya, petugas itu akan memotivasi masyarakat untuk memilah sampah. Dari hasil pemilahan, selanjutnya diantarkan ke bank sampah untuk didistribusikan. Warga yang menyalur-

kan sampahnya bakal mendapat buku catatan serupa nasabah bank. Catatan ini berisi hasil perolehan sampah berdasarkan jenisnya. “Di bank sampah itu sudah ada pencatatan sesuai jenis sampah yang diantar ke bank sampah. Jadi juga ada buku tabungan per orang yang membuang, seperti nasabah bank, jadi atas nama keluarga,” katanya.

Bank sampah Peduli merupakan satu dari sekian bank sampah di Payakumbuh yang masih aktif. Lokasinya berada di Kelurahan Subarang Betung Kecamatan Payakumbuh Barat. Saat ini kondisi bank sampah itu masih memerlukan perhatian pemerintah. Berada di lokasi yang cukup jauh dari jalan raya, membuat bank sampah Peduli sepi dari nasabah. **Lisa Marlina** salah satu pengelola menjelaskan, pada awalnya bank sampah yang berdiri sejak 2013 ini berada di pinggir jalan, sehingga akses nasabah ke lokasi menjadi mudah.

Pada 2017, dirinya mendapat bantuan dari DLH Payakumbuh berupa bangunan permanen. Namun, karena lahan yang ditempati bukan kepunyaannya, ditambah lagi tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengharuskan bank sampah berdiri di lokasi lain. “Itu *kan* tanah keluarga istilahnya, dipinjam *lah* terus sekarang *nggak* dibolehkan lagi, sebenarnya boleh sih boleh, cuma untuk bangunan sebesar ini *nggak* boleh di tepi jalan,” kata Lisa.

Ia menyebutkan, saat ini hanya 50 nasabah yang tergabung, padahal sebelumnya di lokasi awal bisa mencapai 100 nasabah. Jarak yang tidak dekat menjadi alasan utama mereka enggan menyetorkan sampah. Padahal, antusias warga sekitar begitu besar. Banyak dari mereka berharap, pihaknya memiliki layanan jemputan ke rumah-rumah warga untuk mempermudah distribusi sampah. Namun, Lisa melanjutkan, harapan itu tersandung anggaran untuk mengongkosi biaya pengangkutan.

Lisa menjelaskan, selama ini becak motor pengangkut sampah tidak mele-

wati lokasi bank sampahnya. Kendaraan itu hanya beroperasi di jalan-jalan besar. Akibatnya, tidak sedikit warga membuang sampah rumah tangga di sekitar rumah. Berbagai jenis sampah dibiarkan bercampur tanpa melalui proses pemilahan. “Untuk tahap pemilahan masih susah, kebiasaan ini *ya* Pak susah untuk diubah,” keluhnya.

Lisa berharap pengelolaan bank sampah dapat segera diperbaiki. Terutama menyediakan angkutan sampah bagi warga sekitar yang hendak men-

yalurkan sampah. Merespon itu, Rinta berjanji akan membantu bank sampah itu melalui skema dana stimulan. Ia menduga, belum adanya bantuan karena komunikasi pemerintah dengan pengelola bank sampah terputus. “Mungkin sekarang kalau sudah tau kayak *gini* nanti kita ke depan akan diskusikan sama-sama bagaimana atau posisinya nanti bisa pindah keluar lagi (samping jalan),” kata Rinta.

Dana stimulan diberikan tiap bulan sekali sebesar Rp 750 ribu. Meski dana

ini diberikan per Januari, namun Lisa mengaku belum menerimanya. Rinta berjanji dalam waktu dekat dana tersebut akan segera diberikan. “Hari ini mungkin besok lah, secara *non* tunai,” pungkasnya.

Selain itu, ada pula bank sampah Bakokaiko yang dikelola SMK 2 Payakumbuh. Bank sampah ini menangani sampah plastik berupa botol dan gelas. Sebelum dicacah sampah yang terkumpul dipisahkan sesuai warna. Alat pencacah sendiri berasal dari angga-

ran DLH Payakumbuh. Dengan tenaga listrik 10 ribu *watt* memungkinkan mesin ini tetap bekerja meski proses pembelajaran berlangsung, sebab tidak mengeluarkan suara gaduh. Dua sampai tiga kali dalam seminggu tempat tersebut mencacah sampah. “Karena dia (mesin) *nggak* berisik jadi *nggak* terganggu, jadi bisa kapan saja,” kata Rinta.

Proses pencacahan memakan waktu tiga jam dengan berat hasil cacahan empat sampai lima kilogram. Setelah



sumatra.bisnis.com



itu hasil cacahan dijemur. Rinta mengatakan rencananya mesin itu akan dilengkapi alat pengering untuk mempermudah proses pengeringan, jika terkendala cuaca. Hasil dari pengelolaan tersebut dijual ke distributor dengan harga beragam sesuai dengan kualitas barang.

Evaluasi Perda

Dalam menangani persoalan sampah, DLH kota Payakumbuh juga menerapkan strategi lainnya, seperti mengevaluasi pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Payakumbuh memang belum memiliki Perda spesifik menangani sampah plastik, sementara hanya mengatur sampah secara umum. Evaluasi itu diperlukan untuk mengatasi kekurangan Perda karena dinilai tidak menimbulkan efek jera. Kekurangan itu satu di antaranya, tidak dapat menindak pelanggaran secara langsung. Meski menurut Dafrul, Perda telah mengatur denda pelanggaran maksimal Rp 50 juta atau kurungan 6 bulan, tetapi dalam pelaksanaannya diakui menyulitkan. Sebab, lanjut Dafrul, nominal sebanyak itu tergolong

ke ranah pidana, yang harus melewati proses pengadilan dengan estimasi waktu tidak sebentar. “Bukan tidak pernah ada pelanggaran, memang kita kesulitan dalam melakukan tindakan hukum terhadap mereka,” kata Dafrul.

Selain itu, Perda juga belum mengatur dengan jelas hukuman bagi masyarakat yang melanggar. Dafrul menerangkan, Perda hanya mengatur jika pelaku adalah badan usaha. Hukuman itu berupa surat peringatan sampai mencabut izin usaha. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan beberapa perubahan Perda. Satu di antaranya, memasukkan nominal denda sebesar Rp 50 ribu untuk masyarakat, dan Rp 500 ribu bagi badan usaha dan juga mengurangi masa kurungan menjadi 3 bulan, sehingga tidak perlu melalui proses di pengadilan. Rancangan revisi yang diajukan juga memungkinkan petugas menindak pelanggaran secara langsung di lokasi. Saat ini, rancangan perubahan itu sudah dua kali dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Payakumbuh. “Mungkin nanti kami akan masuk ke asistensi ke biro hukum provinsi lagi,” katanya.

Selain persoalan sanksi, menurut Dafrul hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perda adalah wewenang pemerintah daerah dalam menangani limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang dihasilkan rumah tangga dan badan usaha *non* medis. Ia mengaku, solusi yang dinilai sulit, adalah menangani limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga, seperti pecahan kaca, dan sebagainya. Sebab, bagi badan usaha *non* medis skema penanganannya dapat melibatkan pihak ketiga, berbeda dengan rumah tangga yang terbenbur persoalan biaya.

Dafrul menyebutkan, sempat menemukan pelanggaran dari masyarakat yang membuang limbah B3 secara sembarangan. Namun, pelaku mengaku kesulitan mencari tempat pembuangan. Dafrul merasa tidak memiliki solusi yang jelas untuk pernyataan tersebut, karena menyadari pihaknya belum memiliki kewenangan. Sehingga kewenangan dan fasilitas penanganan mesti diperjelas, mengingat persoalan B3 perlu segera dibenahi. “Jadi terkadang kita istilahnya tutup mata saja, ketika memang melihat masyarakat membuang segala macam beling, yasudah diangkut saja dibuang ke TPA padahal sebenarnya tidak boleh,” katanya.

Tindak tegas

Perda memberlakukan waktu pembuangan sampah di beberapa titik di Payakumbuh dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 pagi. Namun faktanya, masih banyak dijumpai warga yang membuang sampah tidak sesuai jadwal. Padahal, berbagai imbauan dan sosialisasi secara kelembagaan telah juga dilaksanakan. Kesadaran warga dalam mengaplikasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga, agaknya masih kurang. Oleh karenanya, penindakan tegas dijalankan DLH bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satpol PP Payakumbuh Devitra membenarkan, tim gabungan melakukan razia terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Razia itu

dilakukan di lapangan dan TPSS. Dari Satpol PP sendiri menurunkan 3 regu untuk merazia warga yang tidak tertib dalam membuang sampah. Sambil melakukan razia, anggota Satpol PP bersama anggota Satgas Lingkungan Hidup, juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga terkait aturan membuang sampah yang benar. Adapun mekanisme penindakannya, pada tahap awal Satpol PP melakukan tindakan non yustisi berupa sosialisasi dan peneguran terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Setelah diingatkan dan masih melanggar maka diterapkan yustisi tindakan ringan.

Beberapa titik yang diawasi adalah Pasar Ibu, Apotek Dika Farma, depan Perusahaan Daerah Air Minum, dan Jalan Latsitarda perbatasan kelurahan Tanah Mati hingga Parit Rantang. Sedangkan, penempatan petugas ditempatkan lainnya, dilakukan secara bertahap serta berkoordinasi dengan pemuda, Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan dan kecamatan untuk membentuk satgas sampah di masing-masing tempat.

Berbagai bentuk pelanggaran yang ditemui di antaranya, membuang sampah dilokasi yang bukan tempatnya, membuang sampah di lokasi yang tepat tetapi waktu pembuangannya tidak sesuai dengan jam/jadwal. “Target yang diharapkan bukan menangkap basah warga yang tidak tertib membuang sampah, melainkan bagaimana warga kota bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap kebersihan di Kota Payakumbuh,” kata Devitra.

Penanganan sampah pasar

Sebagai salah satu titik yang diawasi, pasar tradisional memang identik dengan tempat yang becek dan banyak sampah berserakan di mana-mana. Namun, tidak demikian dengan Pasar Ibu di Payakumbuh. Para pedagang di pasar ini sudah paham betul bagaimana mengelola sampah. DLH Payakumbuh sejak 2007 telah membangun TPST untuk mengolah sampah pasar. Pemerintah kota ingin mengubah perilaku

dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa sampah bisa jadi kompos, tidak harus dibuang. Setiap hari, ada sekira 3 ton sampah yang dihasilkan dari Pasar Ibu. Semua sampah yang berjenis organik ini kemudian dibawa ke TPST dan diolah menjadi pupuk kompos. Cara tersebut sangat efektif dalam mengurangi sampah yang dibawa ke TPA.

Pasar Ibu mampu menghasilkan kompos sebanyak 450 kilogram per bulan. Sejak 2007, Pasar Ibu memiliki tempat pengolahan pupuk organik tepat belakang pasar sisi timur. Dibangun Pemerintah Kota Payakumbuh dan pihak swasta melalui *corporate social responsibility* (CSR). Satu bulan produksi pupuk organik Pasar Ibu paling banyak 450 kilogram. Pupuk kompos itu dijual ke Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Payakumbuh Rp 500 per kilogram atau Rp 5.000 per karung.

Proses memilah sampah organik dan non-organik di Pasar Ibu sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Sejak ada tempat pengolahan sampah ini, pedagang yang berjumlah 2.000-an mulai terbiasa melakukan pemilahan sendiri. Dalam satu hari, produksi sampah Pasar Ibu mencapai 3 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 700 kilogram per hari sampah jenis organik diolah di tempat pengolahan sampah tersebut oleh 11 orang pekerja termasuk operator. Hasil penjualan pupuk organik digunakan untuk membiayai operasional dan membayar pekerja.

Tempat pengolahan sampah organik di Pasar Ibu ini telah mengantarkan Kota Payakumbuh meraih predikat Kota Sehat dalam lima tahun berturut-turut. Payakumbuh mampu mempertahankan penghargaan Swasti Saba kategori Wistara (tertinggi) yang diberikan Kementerian Kesehatan.

Tidak heran jika Pasar Ibu terlihat selalu lebih bersih dan rapi. Masyarakat pun semakin menyadari pentingnya mengelola sampah dengan baik untuk kenyamanan bersama. Tetapi, semua itu tidak terjadi dengan mudah. Pemerintah kota sempat menghadapi kesu-

litan ketika pertama kali menerapkan aturan ini. Meski begitu, pendekatan demi pendekatan terus dilakukan pemerintah. Hingga akhirnya, masyarakat dan pedagang di pasar dengan sendirinya menyadari bahwa kebersihan yang diupayakan bersama dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka.

Bahkan, untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di pasar ini, Pasar Ibu membuat stasiun radio di pasar yang disebut dengan Radio Land. Radio ini secara khusus menyiarkan berbagai informasi mengenai kebersihan di pasar. Radio Land sudah ada sejak 2008, fungsinya untuk menyiarkan informasi kepada pedagang dan pengunjung terkait kebersihan dan penataan pasar, serta program-program pemerintah. Di samping itu, setiap tiga bulan sekali di pasar ini juga dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan berbagai pelaksanaan program kebersihan, Pasar Ibu pun menjadi pasar percontohan di Kota Payakumbuh.

Selain Pasar Ibu, pengelolaan sampah juga dilakukan di Pasar Berkah yang turut menjadi lokasi TPST. Di pasar ini sampah dipilah antara organik dan non organik. Untuk sampah non organik seperti botol plastik dilakukan pencahahan menggunakan mesin. Sedangkan sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos yang dijual dengan harga Rp 5 ribu per kilogram. Lurah Pasar Candra Januardi menyebutkan, harga murah sengaja diberikan agar hasil produksi dikenal orang banyak. “Sekarang kita jual promosi aja dulu karena masih kita kembangkan, sekarang kita *kan* masih uji laboratorium nanti kalo hasilnya udah keluar nanti harganya kita patok,” katanya.

Berkat pengelolaan itu, sampah yang dihasilkan Pasar Berkah tidak lagi dibuang ke TPA. Selain berasal dari aktivitas pasar, sampah yang dikelola juga berasal dari Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, sehingga sedikit banyak dapat mengurangi persoalan sampah.

■ MUJAENI

LEBIH DEKAT

LUKMAN,
Kepala Subdirektorat
Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti

**DARI KERJA KERAS
MENJADI KERJA CERDAS**

Banyaknya karya ilmiah, jika tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan jurnal yang baik akan menjadi percuma. Kualitas itu dapat diukur salah satunya melalui luasnya sebaran publikasi. Semakin luas publikasi jurnal, diyakini akan memberikan manfaat lebih banyak pada dunia keilmuan. Adalah Lukman (41), yang telah menggeser cara pandang pengelolaan publikasi jurnal di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, jurnal didorong dari yang semula cetak ke arah elektronik. Perubahan itu memungkinkan sebaran jurnal lebih luas tanpa mengenal ruang dan waktu. Tidak hanya membantu penyebaran, kini proses akreditasi jurnal dan peningkatan kualitasnya juga dilakukan secara daring. Dengan ikhtiar yang panjang, lelaki kelahiran Bandung ini terus membuktikan jika jurnal Indonesia memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan negara lain.

Perjuangan Lukman bermula saat bekerja di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI). Selepas mengundurkan diri dari perusahaan swasta, pada 2003 Lukman mendapat panggilan kerja di LIPI. Melihat latar belakang keilmuan teknik kimia, Lukman menduga bakal ditempatkan di laboratorium. Namun, nyatanya ia dipekerjakan di perpustakaan, yang mengharuskan setiap hari bergelut dengan tumpukan buku dan jurnal dari seluruh Indonesia. Tidak sesuai harapan, godaan untuk keluar dari pekerjaan itu sering muncul, tetapi ia lebih memilih bertahan dan menekuninya. Ia berusaha beradaptasi dengan dunia barunya, dan dari tempat itu Lukman mulai belajar memahami internet.

Dengan mengenal internet, ia banyak mengonsumsi infor-



Tempat Tanggal Lahir :

Bandung, 11 Mei 1978

Jabatan :

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah
Kemenristekdikti

Pendidikan :

S3 Ilmu Komputer (Universitas Indonesia)

S2 Perpustakaan (Universitas
Indonesia)

S1 Teknik Kimia (Universitas
Diponegoro)

masi termasuk pengelolaan jurnal di negara luar. Di negara lain jurnal begitu mudah dicari dan banyak menjadi rujukan. Kondisi itu jauh berbeda dengan yang dialami jurnal di Indonesia. Lukman melihat ada yang salah dari pengelolaan jurnal di dalam negeri, seperti sukar dicari. Publikasi jurnal yang hanya mengandalkan cetak, termasuk yang disetorkan ke PDII membuat jangkauannya terbatas. Pada 2008 Lukman diangkat sebagai Kasubid Pangkalan Data PDII LIPI. Dengan jabatan itu, ia membuat program inovasi yang mengintegrasikan jurnal Indonesia dalam satu wadah yang dapat diakses lewat jaringan internet. Program bernama *Indonesian Scientific Journal Database* (ISJD) ini dilakukan dengan memindai seluruh jurnal yang saat itu jumlahnya mencapai 7 ribu ke bentuk digital. “Awalnya staf saya hanya 8 orang, namun karena lama kelamaan ini membesar jadi 40 orang,” kata Lukman, saat ditemui *Media BPP* di kediamannya.

Meski didukung staf yang melimpah, tumpukan jurnal tetap menggunung seiring terus berjalannya setoran jurnal ke PDII. Lukman belajar ke beberapa negara, lalu menyadari ada kekeliruan dari kerja yang dijalankan. Ia mengusulkan agar jurnal terbit secara elektronik untuk mempercepat proses penghimpunan. Sebab, langkah sebelumnya lebih disebut kerja keras, ketimbang kerja cerdas karena membutuhkan banyak tenaga. “Kalau kerja cerdas itu semua jurnal dielektronikan, kita integrasikan satu *enter* ada di mana-mana seluruh dunia,” katanya.

Untuk menunjang lahirnya jurnal elektronik, ia memilih layanan *Open Journal System* (OJS). Pengenalan dengan sistem itu, membuat bapak dua anak ini dipercaya memegang jabatan sebagai Kepala Manajer Proyek OJS di Indonesia. Ia juga menulis buku pertamanya yang mengulas panduan OJS dan menjadi rujukan banyak orang. Meski menjabat orang OJS nomor satu di Indonesia, rupanya posisi itu tidak mendapat upah, termasuk akomodasi saat melakukan pertemuan dengan beberapa negara. Melihat peran OJS

penting, Lukman mengajukan permohonan dukungan ke Kementerian Riset, dan Teknologi (Kemenristek) dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Dikti Kemendikbud).

Itjen Dikti menyambut baik dan memberikan program insentif peneliti per ekayasa sebesar Rp 150 juta. Sedangkan Kemenristek menyambut dengan getol mensosialisasikan OJS ke Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK) dan Perguruan Tinggi (PT). Namun, dukungan itu belum banyak mendorong pengelola jurnal bermigrasi ke versi elektronik. Ia menduga, keengganan itu karena proses akreditasi jurnal masih berbentuk cetak bukan elektronik. “Jadi pikiran mereka, buat apa jurnal saya elektronik kalau akhirnya tidak diakui oleh negara, untuk kenaikan jabatan dan sebagainya,” kata Lukman.



“UNTUK MENUNJANG LAHIRNYA JURNAL ELEKTRONIK, IA MEMILIH LAYANAN OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS). PENGENALAN DENGAN SISTEM ITU, MEMBUAT BAPAK DUA ANAK INI DIPERCAYA MEMEGANG JABATAN SEBAGAI KEPALA MANAJER PROYEK OJS DI INDONESIA

Lukman kembali berjuang dengan mengusulkan proses akreditasi jurnal agar dilakukan secara daring. Saat itu akreditasi jurnal masih menjadi kewenangan LIPI dan Itjen Dikti. Namun, respon LIPI kurang memuaskan, berbeda dengan Itjen Dikti yang lebih terbuka. Meski pada akhirnya keduanya menyambut baik ide tersebut.

Tahun 2012 Lukman ditugaskan merumuskan regulasi akreditasi jurnal. Baru pada 2014 aturan akreditasi jurnal ber-

basis elektronik digunakan dengan keluarnya Peraturan Direktur Jendral Dikti No 1 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik dan Peraturan Kepala LIPI No 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Sebagai salah satu penyusun, Lukman menyebutkan, meski dari lembaga berbeda tetapi substansi dari regulasi tersebut serupa. “Di situ mulai masif jurnal-jurnal ke elektronik,” kata Lukman.

Pindah ke Kemenristekdikti

Digabungnya Itjen Dikti dan Kemenristek pada 2015 menjadi tonggak sejarah baru bagi ekosistem jurnal ilmiah di Indonesia. Lukman menyebutkan, kebijakan itu mestinya membuat akreditasi jurnal di Indonesia terpusat, dengan tidak lagi di bawah dua lembaga—LIPI dan Kemenristekdikti. Seiring berjalannya waktu, akhirnya keluarlah Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Regulasi itu sudah disusun Lukman sejak 2015, tetapi karena masih ada persoalan di masing masing internal lembaga, membuat aturan itu urung disahkan.

Menjelang disahkannya Permenristekdikti No 9 Tahun 2018, Lukman mendapat undangan pelantikan dari Kemenristekdikti. Tetapi ia tidak paham pelantikan jabatan apa yang dimaksud. Ternyata suami dari Yana Irawati ini, ditunjuk sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah. Jabatan struktural yang sebenarnya terbentuk atas usulannya pada 2015. Banyak orang yang mengira jabatan itu disiapkan Lukman untuk didudukinya. Tetapi ia membantah, usulan itu berangkat dari kebutuhan Kemenristekdikti dan awal terbentuk pun bukan Lukman yang menempatinya.

Alasan ditunjuknya Lukman sebagai Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah, karena ia sebagai inisiator lahirnya Permenristekdikti No 9 Tahun 2018. Kemenristekdikti khawatir jika dikelola orang lain, penerapannya akan melenceng dari tujuan dan harapan awal regulasi tersebut dibentuk. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Lukman

menerima pinangan tersebut. “Padahal sebelum-sebelumnya saya ditawari jabatan struktural oleh Dikti saya *nggak* mau, di Ristek saya *nggak* mau,” katanya.

Penolakan itu lantaran Lukman merasa lebih menikmati perannya sebagai peneliti ketimbang mengisi jabatan struktural. Peneliti menurutnya lebih memiliki kebebasan dan tidak dibayangi banyak tekanan. Saat menjabat sebagai Kasubid Pangkalan Data PDII LIPI sampai akhir 2011, Lukman merangkap sebagai peneliti Dokumentasi dan Informasi PDII LIPI tetap berlanjut bahkan hampir sampai pada peneliti madya. Namun untuk kali ini ia merasa tidak bisa menolaknya, terlebih ini adalah komitmen untuk memajukan jurnal di Indonesia. Karier sebagai peneliti akhirnya dilepaskan karena memilih dimutasi ke Kemenristekdikti. “Yang jelas pengorbanan saya di karier peneliti,” ujarnya.

Berbekal regulasi dan anggaran, 2 tahun pertama Lukman ditargetkan mengakreditasi 8 ribu jurnal seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, setelah dilantik ia membuat terobosan dengan merombak tim penilai akreditasi jurnal Kemenristekdikti. Agar lebih bijak, ia menggelar seleksi terbuka tim penilai untuk masyarakat umum termasuk mantan anggota tim. Tindakan itu cukup berani, karena meruntuhkan kemapanan struktur tim penilai yang sudah bertahun-tahun ada. Seleksi dilakukan dengan syarat kualifikasi tertentu untuk menemukan penilai yang berkualitas. Selain keilmuan, syarat itu menekankan calon penilai harus paham menggunakan teknologi, agar proses penilaian bisa dilakukan di mana pun, dengan memanfaatkan gawai misalnya. “Yang melamar itu ada sekira 2000-an, seleksi sangat ketat sekali, jadi 199 orang,” katanya.

Filosofi rumah dan jurnal

Dahulu saat awal Lukman merintis mengembangkan pengelolaan jurnal, berbarengan dengan pembangunan rumahnya. Ia bercita-cita dapat mandiri-



kan rumah yang nyaman, meski tidak didukung ongkos yang besar. Dari harapan dan sandungan itu Lukman belajar strategi membangun hunian yang baik, dan memutuskan untuk memanfaatkan barang-barang bekas.

Rumah yang diimpikan Lukman kini terwujud, meski pembangunannya dilakukan bertahap selama kurun waktu tiga tahun. Rumah yang berlokasi di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan itu, 80 persen dibangun dengan material bekas, mulai dari tiang penyangga, lan-

tai marmer, dinding yang didominasi kayu, dan beberapa komponen lainnya. Barang bekas berasal dari sisa pembangunan gedung, bongkaran bangunan tertentu, atau tempat lainnya. Dengan konsep semi panggung, rumah itu berdiri kokoh lengkap dengan kolam ikan di bagian depan dan belakang. Mata air itu berasal dari kondisi tanah yang semula adalah rawa.

Jika dilihat sekilas rumah dengan dua lantai itu didominasi material kayu yang tersusun rapih. Namun jika diperhatikan dengan teliti, beberapa bagian rumah itu terdapat tambalan, misalnya di tiang penyangga yang terbuat dari kayu kelapa. Tiang itu didapatnya dari sisa pembakaran sebuah rumah makan. “Buat orang lain sampah, tetapi buat saya sangat berguna, apalagi waktu itu saya tidak mampu untuk membeli ini dan itu,” kata Lukman yang mengaku lebih nyaman mengerjakan pekerjaan di rumah.

Dengan berdirinya hunian itu, Lukman membuktikan, biaya bukan menjadi persoalan jika memahami cara pembuatannya. Ia menyebutkan, hal itu serupa dengan pengelolaan jurnal yang mungkin saat ini kondisinya masih buruk, baik dari segi penulis pun infrastrukturnya. Jurnal yang tidak dapat peringkat tertentu bukan karena tidak mampu, melainkan karena belum memahami caranya.

Lukman mengaku, pernah mendampingi jurnal dengan modal biaya yang minim tetapi mampu terindeks Scopus. Tetapi ada pula jurnal dengan anggaran tinggi justru tidak mencapai hasil serupa, bahkan di tingkat nasional masih kelimpungan. Oleh karenanya, perlu memahami keterbatasan dan mencari jalan keluar, seperti dengan belajar ke pengelola jurnal lainnya. “Itu komitmennya (salah) yang penting keluar uang banyak, bukan prestasi yang dijadikan tujuannya,” katanya.

Lukman menyebutkan, ada tiga prinsip untuk memajukan jurnal di Indonesia, yaitu visibilitas, regularitas, dan kualitas. Persoalan visibilitas itu meliputi akses terhadap jurnal. Terbit secara cetak, membuat kesempatan jurnal dikenal orang luar menjadi kecil, sehingga versi elektronik dengan didukung layanan OJS yang gratis menjadi solusinya. Selain itu, perlunya dukungan regulasi, seperti kewajiban menulis karya ilmiah bagi individu tertentu, sehingga persediaan tulisan ilmiah melimpah yang berimbas pada konsistensi terbitan jurnal. Terakhir, adalah aspek kualitas, untuk mewujudkan jurnal berkualitas, tahun ini Lukman tengah menyusun peraturan integritas akademik. “Setelah ini terbentuk diharapkan tahun depan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain,” katanya.

Saat ini Indonesia menduduki peringkat pertama pengguna OJS di dunia dengan angka 37 ribu. Padahal, awal ia menyetup hanya 300 pengguna. Selain itu, *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, Indonesia peringkat kedua di dunia. Kondisi itu mustahil diraih jika *platform* yang digunakan tidak

open source seperti OJS. “Sekarang ini Sinta (*Science and Technology Index*), Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional), Garuda (Garba Rujukan Digital) *booming*, tetapi jika tidak didukung dari perjalanan membangun OJS dan peraturannya tidak mungkin bisa terwujud,” jelasnya.

Fokus membangun sistem

Sampai habis masa jabatannya Lukman berkomitmen ingin membangun sistem pengelolaan jurnal. Ia tidak ingin memanfaatkan posisinya untuk mempertahankan kedudukan. Justru impiannya adalah membangun sistem yang tanpa dan/atau dengan dirinya tetap bisa berjalan. Beberapa sistem yang terus dibangun selain peraturan adalah infrastruktur seperti Arjuna, Sinta, Garuda, dan beberapa lainnya.

Lukman berharap, dengan mudahnya akses publikasi karya ilmiah setiap orang dapat melakukan penilaian. Dengan begitu, penulis dan pengelola terdorong untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Selain itu, dengan kualitas dan publikasi yang luas, hasil penelitian Indonesia dapat dihargai dan diakui di tingkat dunia. Sebab, selama ini posisi Indonesia ihwal penelitian masih dianggap rendah. “Saya yakin orang Indonesia itu bukan bodoh, bukan tidak bisa, hanya saja belum dikenal (karyanya),” tandasnya.

■ MUJAEINI

“BUAT ORANG LAIN SAMPAH, TETAPI BUAT SAYA SANGAT BERGUNA, APALAGI WAKTU ITU SAYA TIDAK MAMPU UNTUK MEMBELI INI DAN ITU

Diet dengan Berpuasa

Puasa dipercaya memberikan banyak manfaat bagi tubuh, baik secara fisik maupun non fisik. Saat berpuasa tubuh tidak mengonsumsi apapun dalam kurun waktu tertentu baik dengan tujuan medis, ritual keagamaan, pun lainnya. Misalnya saat Ramadhan, umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan program pengurangan berat badan dengan cara berpuasa.

Penelitian terbaru, yang dilakukan Anton dkk peneliti dari University of Florida, Amerika, mengatakan, puasa dapat membatasi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Pembatasan itu ampuh jika diimbangi dengan asupan gizi seimbang selama berpuasa. Dengan penerapan seperti ini diyakini memberikan dampak positif bagi tubuh, seperti berkurangnya berat badan. Hal ini menjadi kabar baik bagi mereka yang mengalami kelebihan berat badan dan berniat menurunkannya. Selain itu, dengan berpuasa yang benar dapat menjadikan hidup lebih sehat. Hasil penelitian ini telah diterbitkan *Obesity Journal* pada Februari 2018, dengan judul *Flipping the Metabolic Switch: Understanding and Applying the Health Benefits of Fasting*.

Anton dkk menyebutkan, kelebihan kalori di dalam tubuh berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatnya risiko kardiovaskular, sensitivitas insulin, dan berkurangnya fungsi mitokondria. Oleh karenanya, kandungan kalori pada tubuh penting untuk diperhatikan. Namun sayangnya, saat ini banyak orang masih kesulitan mengendalikan kalori dengan konsisten. Oleh karenanya, puasa menjadi jalan alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut. "Puasa telah mendapatkan popularitas alternatif untuk mengendalikan kalori secara terus menerus dan telah menjanjikan dalam memberikan manfaat," kata Anton dkk,

Menurut Anton dkk, berbagai manfaat dari puasa tidak terlepas dari proses "saklar" metabolik. Proses ini diartikan sebagai peristiwa perubahan preferensial dari pemanfaatan glukosa menjadi lemak keton yang berasal dari asam lemak. Lemak keton sendiri berfungsi menjadi tenaga cadangan untuk otak dan tubuh selama berpuasa. "Saklar" metabolik biasanya terjadi antara 12 jam setelah berhenti mengonsumsi makanan. Meski tergantung pada kandungan awal glikogen hati saat puasa dan jumlah energi yang dikeluarkan. "Keton diangkut dalam jumlah besar ke dalam sel dengan metabolisme tinggi aktivitas sel otot dan neuron, di mana mereka dimetabolisme untuk asetil koenzim A, yang kemudian memasuki siklus asam trikarboksilat menghasilkan adenosin trifosfat (ATP)," kata Anton dkk dalam penelitiannya.

Meski memberikan banyak manfaat pada tubuh, tetapi puasa juga dapat berdampak sebaliknya jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Seperti merasa mual dan muntah, edema (pembengkakan anggota tubuh akibat penimbunan cairan di dalam jaringan), menstruasi tidak teratur, penurunan kepadatan tulang, dan dampak buruk lainnya.

Dengan pembatasan asupan kalori, sekira seperempat hingga sepertiga dari penurunan berat badan diketahui dari jaringan tanpa lemak. Dalam salah satu studi, Anton dkk menugaskan pada 34 pria sehat secara acak untuk diet, dengan berpuasa 16 jam sehari selama dua bulan. Dengan mempertahankan program pelatihan resistensi standar, hasilnya mereka dapat mengurangi massa lemak cukup maksimal.

■ MUJAENI



KELOLA ENERGI LISTRIK DENGAN MICROGRID

Salah satu tantangan terbesar bagi umat manusia adalah memastikan kapasitas sumber daya energi tetap tersedia. Aspek ini penting karena menjadi tenaga penggerak bagi kehidupan manusia termasuk dalam membangun peradabannya. Salah satu sumber energi yang perlu diperhatikan adalah listrik. Berbagai kajian telah dilakukan untuk menghasilkan sumber daya yang tergolong dapat diperbarui tersebut. Hasilnya, beberapa sumber alternatif produksi listrik ditemukan, seperti dengan memanfaatkan tenaga uap, angin, air, sinar matahari, dan sebagainya. Namun, langkah pengelolaan listrik mestinya tidak hanya berhenti pada penemuan sumber alternatif. Laju permintaan listrik yang terus meningkat, mengharuskan energi ini hadir secara efisien dan ekonomis terutama bagi para konsumen.

Penelitian terbaru yang dilakukan Muhammad Sufyan dan beberapa peneliti lainnya dari Malaysia menyebutkan, untuk memastikan pasokan energi listrik yang efisien dan ekonomis dapat memanfaatkan sistem penyimpanan baterai yang terhubung dengan *microgrid*. *Microgrid* merupakan jaringan mikro pada sistem tenaga listrik. Sistem ini berkaitan dengan integrasi *Distributed Energy Resources* (DER) seperti generator diesel, turbin angin dan lainnya, dengan baterai sebagai wadah penyimpanan energi. Penelitian ini dipercaya telah berhasil memecahkan masalah alokasi biaya antara proses produksi listrik dan penyimpanan, dengan menjadwalkan penggunaan dan memperhatikan kondisi baterai. Hasil kajian ini telah diterbitkan oleh Plos One pada Februari 2019 dengan judul *Optimal Sizing and Energy Scheduling of Isolated Microgrid Considering the Battery Lifetime Degradation*.

Selarasnya sumber energi listrik dan tata kelola penyimpanan merupakan kunci keberhasilan dari penerapan *microgrid*. Dengan sistem penyimpanan yang baik akan menghasilkan banyak fungsi, seperti mengatur tegangan dan frekuensi listrik pada *microgrid*. Selain itu, komponen tersebut dapat mengurangi fluktuasi daya yang dihasilkan dari berbagai sumber produksi listrik. Ia juga mampu menyimpan energi saat pembangkit listrik

kelebihan pasokan dan dapat digunakan saat kebutuhan energi melebihi kapasitas pembangkit listrik atau arus utama mengalami gangguan. "Sistem penyimpanan energi menjadi komponen penting dari *microgrid*," kata Muhammad Sufyan dkk dalam penelitiannya.

Dalam penelitiannya, Muhammad Sufyan dkk menggunakan jenis baterai *lithium-ion*. Baterai jenis ini dipilih karena memiliki kepadatan penyimpanan energi yang tinggi jika dibandingkan jenis baterai lainnya, terutama dalam menyimpan daya listrik yang dihasilkan dari produksi tenaga angin dan sinar matahari.

Selain memerhatikan baterai penyimpanan, hal lain yang mesti diperhitungkan adalah strategi manajemen daya *microgrid*. Sebab aspek ini memiliki dampak langsung pada operasional sistem. "Strategi manajemen daya yang efisien diperlukan untuk menemukan ongkos terendah, sehingga dapat melayani kebutuhan listrik tanpa tersandung kendala teknis pengelolaan sistem *microgrid*," lanjut Muhammad Sufyan dkk.

Microgrid dan Indonesia

Dengan letak geografis yang luas juga tersusun dari pulau-pulau seringkali menjadi kendala bagi pengadaan listrik di beberapa daerah di Indonesia. Dengan hasil penelitian ini Indonesia dapat berbenah dengan membangun jaringan *microgrid* di daerah-daerah yang dinilai sukar mendapat aliran listrik jaringan utama. Salah satu daerah yang telah menerapkan teknologi ini adalah Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dilansir dari viva.co.id Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menggunakan teknologi tersebut pada Februari tahun ini.

Muhammad Sufyan dkk menyebutkan, penggunaan sistem *microgrid* memang dapat diterapkan di beberapa daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapat aliran listrik. Dengan mengintegrasikan temuan pembangkit listrik alternatif dan penerapan sistem *microgrid* diharapkan mampu mengatasi persoalan listrik.

■ MUJAENI



MAKRIFAT PANCASILAIS, HARGA MATI KARAKTER NKRI

“Tidak sedikit partai gagal mendidik pemimpin karena terpenjara pencitraan, kekuatan uang, ambisi koalisi dan taburan janji utopis. Tujuannya tunggal merebut tahta dan harta, sehingga miskin proyeksi calon pada kerja prinsipil yang populis.” Apakah pernyataan ini hoaks di hati Yudi Latif?

Hoaks (berita bohong) selalu memburu nalar. Hoaks waras. Hoaks memelintir pola berpikir kritis. Tak luput sendiri-sendiri orang beriman Pancasila pun digoyah hoaks. Hoaks tak akan membuah apa pun dalam peradaban berbangsa.

Yudi Latif menangkis hoaks dengan karya *masterpiece*-nya. Nukilan Yudi Latif dari Bunda Teresa (Kolkata/Calcutta-India) membuah hasil yang gemilang: “Buah dari kesunyian adalah peribadatan. Buah dari peribadatan adalah keyakinan. Buah dari keyakinan adalah kecintaan. Buah dari kecintaan adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah perdamaian.” Yudi memetik buah, henggang dari tampuk BPIP RI. Keluar dari zona nyaman, *out of box*-kah?

Repetisi lima diksi buah menjadi perlambang. Tak sekadar klimaks puitis, tetapi menjadi titian tangga laiknya makrifat. Ada buah agung yang butuh pemeraman suh kebinekaan. Totalitas.

Cermin buah agung ini dapat diulik dari kehidupan Nabi Muhammad,

junjungan umat Islam, senantiasa penuh toleransi dan menghargai agama lain, khususnya Kristen-Katolik. Bahkan, Nabi Muhammad membuat surat jaminan kebebasan beragama pada tahun 628 yang masih tersip di Biara Santa Katarina di Sinai. Sasmita Nabi ini senada arus besar Islam saat ini, seperti Nahdliyin (NU) dan Muhammadiyah. Syukur kedua ormas besar ini selalu bersikap moderat, toleran, serta siap berdialog dengan umat beragama lain.

Terbitnya buku Yudi Latif ini mengingatkan rekam jejak umat. Satu contoh memorabilia dari iman Katolik yang terdekat yakni tajuk Adven Keuskupan Agung Semarang (KAS) 2017 silam. Ada tagihan mengemuka hari-hari ini. Ada tagar besar “Dalam Terang Iman, Menghidupi Nilai-Nilai Pancasila” ketika bernegara. Muncullah bara revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Tajuk ini dipilih demi mendamba wujud peradaban kasih di Indonesia. Betapa penting mengangkat spirit kebangsaan dalam kebinekaan. Disadari betapa vital umat beragama untuk saling memperjuangkan kembali nilai Pancasila dalam hidup



Makrifat Pagi, Percik Embun Spiritualitas di Terik Republik

Penulis : Yudi Latif

Penerbit : Mizan

Cetak : Desember 2018

Tebal : 326 hlm

ISBN : 978-602-441-047-6

Harga : Rp 79.000,00

beribadah dan bermasyarakat yang tendensius dipolitik-politikkan.

Empat tema bundel sarasehan yang diikat lima sila Pancasila diunggah sebagai penghela revitalisasi nilai. Secara pas, Yudi Latif menulis buku *Makrifat Pagi, Percik Embun Spiritualitas di Terik Republik* dengan kemas lima bab. Betapa menawan sinergi antara bundel sarasehan dan buku ini.

Sarasehan pertama mengupas sila pertama. Hargai dan ciptakan harmoni antarpemeluk agama dan kepercayaan. Markus (9:38-40) menunjukkan sikap Yesus yang memperluas wawasan Yohanes untuk terbuka kepada sesama yang berbeda pandangan hidup dan keyakinan.

Bab I buku *Makrifat Pagi* tentang ketuhanan. Yudi menilai ketuhanan serupa cinta. Semua agama diturunkan Tuhan untuk menyemaikan cinta-Nya di muka bumi. Kitab suci, para nabi, ibadah, ritual, dan syariat adalah media ketika cinta Tuhan benar-benar bisa dilaksanakan. Agama cinta memberi kita kehidupan, kekuatan, keluhuran, keseimbangan, dan kesalehan.

Sarasehan kedua membahas sila kedua dan kelima. Sila-sila ini mengajak kita mengedepankan secara pribadi, kelompok maupun bersama-sama untuk menjunjung nilai kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan setiap orang. Terungkap kisah Juan Jose Aguirre Munoz (seorang uskup) dan Norodin Alonto Lucman (seorang muslim) yang menolong korban pertikaian tanpa memandang agama dan etnis.

Bab II buku *Makrifat Pagi* menjelaskan kemanusiaan terletak pada simpati. Jauhnya jarak kaum papa-miskin dengan kaum kaya, pejabat dan rakyat, ulama dan umat dalam bangsa ini menjadi penyebabnya. Mencius berkata, simpati bersemayam dalam

jiwa yang sehat. “Jika seseorang melihat anak kecil berdiri di tubir jurang, secara refleksi orang tersebut akan menghela si anak tanpa sempat berpikir apa suku, agama, atau keuntungan yang didapat,” kata filsuf Konfusius tersebut.

Bab V buku *Makrifat Pagi* menjelaskan masalah keadilan sosial. Isu ini wujud terkonkret prinsip Pancasila. Sayangnya, prinsip adil justru diabaikan selama belasan tahun Reformasi. Era ini surplus kebebasan, tetapi defisit keadilan. Gap sosial kian menganga. Rentan muncul agitasi sosial yang

“

YUDI LATIF MENYINDIR BANYAK PARTAI GAGAL MENDIDIK PEMIMPIN KARENA TERPENJARA PENCITRAAN, KEKUATAN UANG, AMBISI KOALIASI DAN TABURAN JANJI UTOPIIS DEMI MEREbut TAHTA DAN HARTA, SEHINGGA MISKIN PROYEKSI CALON PADA KERJA PRINSIPIL YANG POPULIS.

mengoyak persatuan nasional. Mempelat simbol agama atau primordialisme sebagai legitimasi.

Sarasehan ketiga memperdalam sila ketiga dan keempat. Kita menyikapi pluralitas dengan dialog lintas iman, bekerja demi tujuan kesejahteraan umum. Popularitas gugur gunung memberi arti penting kerja sama. Kampung/desa di Indonesia mentradisikan gotong royong, misalnya an-

gkat rumah di Suku Bugis, Helem Foi Kenambai Umbai (Papua), Ammossi (Sulsel), dan gugur gunung (Yogyakarta).

Bab III buku *Makrifat Pagi* mengupas nilai kebangsaan yang fokus menerima perbedaan. Agama berbeda, tetapi sama-sama menyembah Tuhan. Nama Tuhan berbeda, sadarilah Ia hanyalah sebutan untuk esensi Tuhan yang sama. “Sejauh berjalan di atas kebenaran, akan selalu ada titik temu. Karena tidak ada kebenaran yang mendua,” suluk Yudi Latif.

Bab IV buku *Makrifat Pagi* memaparkan kerakyatan dan kepemimpinan. Pemimpin yang merakyat mesti berpengetahuan, punya pengalaman terlibat dalam urusan umum dan punya gagasan cemerlang serta kemampuan menaruh rakyat di hatinya. Pemimpin yang berkerakyatan siap menderita.

Sarasehan keempat menantikan Juru Selamat yang akan datang dengan kesediaan umat beriman untuk meneladan-Nya dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan nilai-nilai alkitabiah.

Dilematis “mempertanggungjawabkan kekuasaan bagi kebesaran dan keluasan bangsa Indonesia, kecuali mereka tidak takut kehilangan apa pun selain kebenaran dan keadilan.” Yudi Latif menyindir banyak partai gagal mendidik pemimpin karena terpenjara pencitraan, kekuatan uang, ambisi koalisi dan taburan janji utopis demi merebut tahta dan harta, sehingga miskin proyeksi calon pada kerja prinsipil yang populis.

Muncullah tamsil lantang, “Sungguh mudah seekor unta masuk ke lubang jarum!” ketika iktidat bernegara tak mampu membedakan tabiat fasik dengan tabiat bijak. Buku ini menampar wacana matinya kepakaran di negara kita.

■ ANTON SUPARYANTA



RUMAH MERAH PUTIH

Sutradara: Ari Sihasale
Pemain: Shafira Umm, Yama Carlos, Pevita Pearce, Petrick Rumlaklak, Amori De Purivicacao, Calvin Petrus
Produksi: Alinea Pictures
Tayang: 20 Juni 2019



Cara Sederhana Mencintai Indonesia

Aksi heroik bocah memanjat tiang bendera saat upacara HUT Republik Indonesia ke-73 di Pantai Mota'ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral di dunia maya. Aksi itu dilakukan setelah tali bendera tersangkut di ujung tiang. Oleh karena lakunya, bendera merah putih berhasil dikibarkan. Pujian mengalir dari berbagai pihak, bahkan bocah tersebut diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara.

Kisah ini rupanya menginspirasi sutradara Ari Sihasale menggarap film bernafas nasionalisme. Konon kisah itu mirip dengan skrip yang ditulis beberapa tahun lalu. Dalam film berjudul *Ru-*

mah Merah Putih ini juga menampilkan aksi bocah yang berani memanjat tiang bendera saat upacara kemerdekaan. Ari seolah ingin menguatkan ingatan publik, ihwal laku bocah yang dengan berani menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia.

Film yang diproduksi Alinea Pictures ini berkisah tentang kecintaan anak-anak perbatasan kepada tanah air. Tokoh anak itu bernama Farel Amaral dan Oscar Lopez yang tinggal di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste. Salah satu kecintaan itu ditunjukkan dengan ikut menyemarakkan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Alinea Pictures yang digawangi oleh Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen me-

mang selalu identik dengan produksi film anak-anak yang tidak kalah berkualitas dengan film-film hollywood. Film *Rumah Merah Putih* yang akan segera tayang ini, menunjukkan komitmen Alinea Pictures di tengah minimnya film anak-anak di Indonesia. Mereka pun berkomitmen untuk memberikan konten yang tidak hanya menarik, tetapi mengedukasi.

Kembali ke cerita film *Rumah Merah Putih*. Seperti pada umumnya, perayaan kemerdekaan selalu identik dengan berbagai lomba dan kemeriahan. Menjelang 17 Agustus, berbagai daerah mulai sibuk menghias lingkungannya dengan ornamen kemerdekaan, mulai dari bendera, mewarnai gapura dengan warna bendera, dan sebagainya.

Tepat seminggu menjelang peringatan kemerdekaan, Farel, Oscar dan beberapa kawan lainnya mengikuti perayaan lomba panjat pinang sebagai ritual menyongsong hari kemerdekaan. Namun, bukannya menyatukan semangat dan kekompakan, Farel dan

anggota tim lainnya justru berseteru mempersoalkan hadiah mana yang harus diambil terlebih dulu.

Perdebatan itu berlanjut saat Farel dan timnya menuai kekalahan. Bukannya belajar saling menguatkan, mereka justru menyalahkan satu sama lain atas kekalahan yang ditimpanya. Masalah semakin rumit, ketika dua kaleng berisi cat merah putih milik Farel hilang tanpa jejak. Padahal, kaleng itu merupakan titipan bapaknya.

Sebab takut kena amuk orang tuanya, Farel yang dibantu Oscar, dan teman lainnya berusaha mengumpulkan rupiah untuk kembali membeli cat merah putih. Namun, karena waktu kian mendekati puncak perayaan persediaan cat merah putih menjadi langka. Perjalanan Farel, Oscar, dan teman-temannya untuk merayakan 17 Agustus ini menjadi cerita utama dalam film tersebut.

Film *Rumah Merah Putih* dibintangi oleh sederet nama besar seperti,

Pevita Pearce, Yama Carlos, Shafira Umm, Abdurrahman Arif, dan Dicky Tapitapikalawan. Tidak hanya itu, film ini juga memperkenalkan pemain asli NTT sebagai tokoh utama, yaitu Petrick Rumlaklak (Farel Amaral) dan Amori De Purivicacao (Oscar Lopez). Film *Rumah Merah Putih* sendiri mengambil lokasi syuting di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Film yang diperuntukkan bagi semua umur ini, rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 20 Juni 2019 mendatang.

Selain menjadi tontonan, film ini juga bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat Indonesia. Mengingat iklim kehidupan sosial pasca pemilihan umum presiden dan legislatif yang masih memanas. Melalui film ini masyarakat diajak merenung arti besar pentingnya cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Jangan sampai dilewatkan.

■ MUJAEINI

Cerita dari Hujung Langit

Muhammad Harya Ramdhoni*

PADANG ilalang. Sejauh lemparan batu hanya hamparan rumput raksasa dan ilalang belaka. Dua tiga pokok Sekala yang menjulang di sela-selanya hampir tak berarti dalam kepungan semak berperdu. Matari bersinar menghujam ke bumi. Membakar setiap tubuh dengan amarahnya. Tiada ampun menguliti tanah harum bebatuan menjadi kerontang belaka.

Lima lelaki bertubuh tak lumrah berjalan setengah berlari menuju padang ilalang. Nampak tergesa hendak taklukkan waktu. Seorang diantaranya memanggul sesosok tubuh perempuan. Tubuh yang tak henti meronta. Kemudian segalanya terjadi begitu cepat. Mereka golekkan perempuan berusia belasan itu di atas padang ilalang. Tak jera. Perempuan remaja kebaskan tangan-tangan yang merayahnya. Berkali-kali ia berhasil melepaskan diri dan berlari. Namun lima lelaki lebih lekas menangkapnya kembali. Ia dilemparkan lagi dengan kasar dan ditelanjangi. Ditingkahi sorak-sorai lima lelaki. Perempuan remaja berteriak menghibe. Ia meronta-ronta. Suaranya telah berubah serupa lolongan sedih. Geletarkan setiap baris rumput dan semak berperdu. Menodai ketentrangan abadi yang tercipta selama ini. Perempuan remaja tak putus melawan sepenuh daya. Dengan pukulan, dengan cakaran. Diselingi pohon belas kasihan pada lima lelaki yang menelanjanginya. Ia tak berdaya. Sungguh tak berdaya. Bahkan hingga suaranya berubah parau dan kemudian bertukar menjadi tangis sesenggukan. Silih berganti lima lelaki bertubuh tak lumrah menggagahinya di atas padang ilalang sejauh mata memandang. Tengah hari itu kehormatannya dihirup paksa. Tanpa perlawanan berarti. Hanya sengal yang telah bersekutu dengan tangis terdengar membuat iba. Tetapi pada hati dan perasaan kelima lelaki berdiam iblis terkutuk. Tak hirau. Apalagi tersentuh pada tangis perempuan remaja. Mereka tuntaskan birahi silih berganti hingga peluh dan liur tertukar. Diimbuhi desau angin kering kerontang dan murka sang matari. Usai genapi hasrat bejat masing-masing, ia ditinggalkan



begitu saja oleh para jahanam di tengah padang ilalang sejauh mata memandang.

Perempuan remaja pandangi matari di atas kepala dengan mata basah.

Di bawah langit tubuhnya pasrah telanjang.

Ia tahu dirinya telah kotor. Durjana lima lelaki menyamun kesucian yang kukuh ia pelihara sejak kanak-kanak. Ia memang hamba sahaya tapi tak sebinat kawan-kawannya. Mereka yang jatuh pada bujuk rayu para lelaki sesama hamba dan

melepas kesucian tanpa ragu sedikit pun. Mereka yang relakan kesucian demi tuntaskan birahi anjing liar para algojo dan prajurit kerajaan. Dan ia bukan termasuk di antara keduanya.

Di bawah langit tubuhnya pasrah telanjang.

Peluh dan liur yang tertukar tak semudah itu mengering. Juga luka di hatinya perlahan-lahan menyerupa dendam pada para durjana yang membuat dirinya celaka. Ia kutuki dewata yang takdirkan hidupnya harus melata. Ia kutuki sang ratu. Penguasa buku silsilah yang bertanggung-jawab atas perhambaan pada dirinya sejak temurun tak terhitung.

Di bawah langit tubuhnya pasrah telanjang.

Segala tangis, marah, dendam dan kutuk perlahan-lahan bersalin rupa menjadi tekad berlawanan. Pada setiap jiwa yang membuat dirinya celaka ia tuaikan kesumat itu. "Aku harus, harus dan seribu kali harus balaskan penghinaan ini!", suaranya lirih sesenggukan. Tekadnya telah bulat, menuntut ditunaikan.

Di bawah langit ia berjalan telanjang. Terseok-seok tinggalkan padang ilalang sejauh mata memandang. Menuju sebuah tempat dimana orang-orang seperti diperlakukan sebagai hewan. Gadis secantik itu. Gadis sebela itu. Ia punya sepasang mata bulat yang dulu berbinar dengan indahnya. Kini sepasang mata itu layu tak bercahya. Bibir tipisnya takkan suntingkan

senyum riang kekanakan lagi. Juga lesung pipinya tinggal menjadi kerut belaka. Seumpama cacat yang dibawanya sejak lahir...

Matahari mulai menepi kala perempuan remaja tiba dengan tubuh lunglai di perkampungan hamba sahaya. Satu dua kawan-kawannya memandang heran padanya.

Ia tak berpakaian.

Tubuhnya masih pasrah telanjang dibawah langit remang senja.

Pakaiannya yang terbuat dari kulit kambing hutan ditinggalkannya begitu saja di padang ilalang. Ia sungguh tak perdulikan diri sendiri. Berpakaian atau tidak kini baginya sudah tak penting lagi. Durjana lima lelaki telah menjatuhkan dirinya sebagai perempuan kotor. Kesuciannya lesap berbarengan dengan kehormatan yang ia jaga seumur hidup.

"Pakaian seindah apa pun takkan mampu bersihkan diriku dari noda. Lagi pula aku hanyalah seorang hamba. Hamba sahaya yang tak memiliki hak bahkan sekedar untuk menghaki diri sendiri"

Sementara air matanya titik, langkah kakinya yang disibuki gemerincing sepasang rantai tembaga terus berjalan menuju sebuah gubuk buruk di kaki bukit kapur. Tak jauh dari situ terdapat sungai kecil berair jernih yang memperdengarkan gemericik airnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti tatkala ia ingat sungai itu. "Adalah lebih penting membersihkan diri daripada terus-menerus merenungi nasib" Ia pun berjingkat menuju sungai kecil di kaki bukit kapur. Langkah-langkah kecilnya lompati batu-batu kali yang tersekak. Tak lama berselang kemudian ia tenggelamkan diri di dalamnya. Cukup lama ia berendam memanjakan diri sendiri. Seraya nikmati suara gemericik air dari pancuran tak jauh dari situ. Pelan-pelan ia gosokkan batu kali ke sekujur tubuhnya. Luruhkan keringat, liur, dan lendir lima lelaki jahanam. Air matanya kembali tumpah. Tak lagi sekedar titik. Betapa lelaki-lelaki itu telah menyepak kesuciannya begitu rupa. Tangan-tangan kotor yang menjamah buah dadanya. Tangan-tangan bedebah sehina-dina lendir yang mereka tumpahkan di rahim perempuan remaja. Dengus nafas yang menjatuhkan harga

dirinya. Liur dan keringat yang menjijikkan itu. Perempuan remaja berjanji pada hati kecilnya akan selalu mengenang setiap penggal peristiwa-peristiwa itu sebagai hari paling sial dalam hidupnya. Kisah penghinaan tak termaafkan atas dirinya.

"Aku memang seorang hamba sahaya, tetapi bukankah Kau ciptakan aku sepertimana manusia lain yang memiliki martabat dan harga diri, ya dewa?"

Dewa tak mendengar keluhnya. Kuasa besar alam raya tak mengindahkannya. Ia cuma setitik debu tak berguna. Dalam aturan Triwangsa, dewa-dewa tak memiliki kewajiban apa pun terhadap hamba sahaya seperti dirinya.

Perempuan remaja masih pasrah telanjang di bawah langit remang senja. Air matanya tak lagi derai. Tapi kesumatnya sungguh tak tertawar. Ia akan hitung setiap pedih-perih perampasan atas kehormatan dan harga dirinya. Pada lima lelaki jahanam.

Pada para dewa yang mentakdirkan dirinya jatuh sebagai manusia tak berkasta. Pada penguasa buku silsilah yang bertanggung-jawab atas perhambaan dirinya sejak temurun tak terhingga. Ia simpan baik-baik semua itu sebagai pengingat. Menunggu saat yang tepat menagih setiap penggal kesumat yang membuat dirinya tak sesuci dulu.

EMPAT pasang mata tengadah ke langit. Di atas sana langit mulai mendung. Hujan sebentar lagi tandang. Petir sesekali menyambar membawa pertanda pergantian cuaca. Empat pasang mata harap cemas menantinya. Hari belum lagi petang tapi awan hitam telah suramkan seisi perkampungan itu. Kedatangan hujan di tengah hari yang semestinya terik bukanlah keinginan mereka. Jika hujan datang menyerbu maka, sia-sialah pekerjaan mereka sehari penuh. Sepuluh patung Melasa Kepappang yang terbuat dari tanah liat belum juga kering. Patung-patung berbagai ukuran itu ialah pesanan Lamban Dalom Sekala Bgha di Bunuk Tenuar. Sang Ratu sendiri yang memerintahkan membuat kesepuluh patung itu untuk menyambut Pemujaan Agung terhadap sesembahan seisi bumi Sekala Bgha.

"Celakalah kita bila patung-patung ini masih basah hingga prajurit Sekala Bgha esok datang mengambilnya," keluh lelaki bercawat dengan rambut panjang

“
AKU HANYALAH SEORANG
HAMBA. HAMBA SAHAYA YANG
TAK MEMILIKI HAK BAHKAN
SEKEDAR UNTUK MENGHAKI
DIRI SENDIRI

tergerai. Di bawah mata kanannya yang bergelambir terdapat bekas luka memanjang hingga ke pipi.

"Pemujan Agung terhadap Pokok Suci Melasa Kepappang akan dilangsungkan pada bulan *bakha*, dan itu berarti dua hari lagi," timpal lelaki di sebelahnya yang bertubuh besar namun bersuara mendayu-dayu seperti perempuan.

"Cecunguk-cecunguk dari Bunuk Tenuagh akan membelah kepala kita bila patung-patung itu belum juga siap esok pagi," lelaki bertubuh lebih pendek turut menimpali dengan nada suara mengandung cemas.

Lelaki keempat tak bersuara. Ia setia bertolak pinggang sejak tadi. Kedua bola matanya yang mirip sepasang mata burung hantu tak henti menantang langit. Gigi-giginya terdengar bergemeletukan. Menambah kesan kokoh pada rahangnya.

"Aku tak mau mati, aku tak mau mati! Lebih baik disiksa hingga setengah mampus daripada harus kehilangan nyawa. Cacat seumur hidup adalah pilihan terbaik dibanding mati. Bagiku kematian adalah sesuatu yang amat menakutkan", kilah lelaki bersuara lembut.

Lelaki keempat teguh tak bersuara.

"Bilakah semua ini akan berakhir? Adakah dewata akan mengekalkan kehinaan ini pada diri kita hingga maut memanggil?" keluh lelaki bercawat dengan luka memanjang di pipi kanannya.

"Takkan! Bahkan seribu dewa-dewa kahyangan sekalipun tak berhak menghukum kita dengan kenistaan seperti ini! Kehinaan ini harus diakhiri walau harus bertempur melawan seluruh dewa dan iblis sekalipun!", pekik lelaki keempat membuat kawan-kawannya terperanjat. Kata-katanya terlampau kasar dan tak mengindahkan sopan-santun kedewaan. Amarah yang mendadak meletup membuat kedua bola matanya yang mirip mata burung hantu terlihat semakin menakutkan.

"Tak baik menghujat para dewa dengan kata-kata seperti itu, Cunguh. Bukan salah dewata hingga kita mengalami nasib menjadi orang-orang buangan seperti ini, menjadi sampah bagi masyarakat dan tamadun kita sendiri. Mungkin ini karma dari perbuatan leluhur kita yang tak mengindahkan aturan para dewa dan tata kra-

ma manusia", nasihat temannya yang bertubuh pendek.

"Adakah aku termasuk di antara kalian yang masih meyakini aturan para dewa dan tata krama manusia?" Cunguh tak mau kalah.

"Aku bahkan tak pernah mendapat manfaat dengan mengimani dewa-dewamu, Benatat, dewa-dewa kalian semua!"

Perkataan Cunguh membuat kelu lidah rekan-rekannya. Hujahan apa lagi yang mesti terucap bila kekecewaan terhadap para dewa bukan lagi bersumber pada amarah biasa melainkan pada lemahnya iman dan keyakinan pada sang dewa sendiri.

Di bawah langit mendung menjelang senja mereka dikepung alam pikir masing-masing. Ketakutan pada murka dewata penguasa alam raya.

Empat lelaki hamba sahaya memandangi langit di atas mereka dengan sorot mata harap-harap cemas. Sepersekitan detik kemudian hujan menyerbu tanpa ampun.

"Dewata memang menghendaki kita terus menerus dihina dan dinajiskan, wahai Getam," desah Benatat kepada kawannya yang berambut panjang tergerai dengan bekas luka memanjang di bawah mata kanannya.

Getam mengangguk mengiyakan.

"Aku tak mau mati...aku tak mau mati...," sambar lelaki bertubuh besar dengan suara mendayu-dayu bagai perempuan.

"Tutup mulutmu Lekok!", tetak Cunguh.

Lelaki bersuara mendayu-dayu diam dibentak seperti itu. Tak lama kemudian tangisnya terdengar sesenggukan.

"Dasar wadam!" ketus Cunguh.

Sepuluh patung tanah liat Melasa Kepappang yang belum sempat kering pun perlahan-lahan meleleh dihajar derasnya air hujan. Kiamat kecil bagi keempat hamba sahaya yang akan terjadi sebentar lagi.



*MUHAMMAD HARYA RAMDHONI lahir di Solo, 15 Juli 1981. Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung ini menyelesaikan MA dan Ph.D. ilmu politiknya di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bukunya: Perempuan Penunggang Harimau (novel, 2011) dan Kitab Hikayat Orang-orang yang Berjalan di Atas Air (kumpulan cerpen, 2012).

Kota Malang Berbenah Mengelola Jurnal Ilmiah

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian. Di sisi lain, hasil penelitian yang berkualitas tidak akan berarti tanpa adanya publikasi. Sebab, publikasi berperan penting untuk mengabarkan hasil penelitian maupun pengembangan agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Demikian ungkap kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, **Erik Setyo Santoso**, saat memberi sambutan pada gelaran seminar bertajuk “Manajemen Pengelolaan Jurnal: Evaluasi Kesiapan Akreditasi Nasional dan Internasional”, Selasa (16/4).

Gelaran seminar yang diadakan Barenlitbang Kota Malang ini, dihadiri peserta dari berbagai kalangan, seperti unit kelitbang pemerintah kota/kabupaten di luar Pemerintah Kota Malang, pihak perguruan tinggi di Kota Malang, dan komunitas pengelola jurnal di perguruan tinggi Kota Malang. Kegiatan ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas tata kelola jurnal serta membangun jaringan dengan pengelola jurnal lainnya, baik dari perguruan tinggi maupun kementerian/ lembaga.

Salah satu jurnal yang dimiliki Kota Malang yakni Jurnal Pangripta. Jurnal yang terbit sejak 2018 ini hadir dengan periode penerbitan 2 kali setahun. Jurnal yang fokus pada isu perencanaan pembangunan ini menjadi wadah bagi hasil penelitian maupun pengembangan dengan lokus di Kota Malang. Selain itu, wadah publikasi ilmiah ini

juga telah mengantongi nomor *International Standard Serial Number* (ISSN), baik dalam versi elektronik maupun cetak. “Oleh karena itu, kami selaku pengelola Jurnal Pangripta merasa perlu mengadakan kegiatan ini untuk menjalin jejaring dengan para komunitas pengelola jurnal di lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Malang maupun pengelola jurnal di lingkup pemerintahan,” tambah Erik.

Erik melanjutkan, jurnal merupakan salah satu media publikasi karya ilmiah. Selain itu, jurnal juga menjadi sarana komunikasi antara peneliti, pengambil kebijakan, dan masyarakat. Publikasi di jurnal ilmiah juga penting untuk keperluan penulis. Erik mengatakan, salah satunya untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional seperti dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa, serta fungsional lainnya. “Bahkan, saat ini ada kewajiban untuk memublikasikan hasil penelitian baik skripsi, tesis, maupun disertasi atau penelitian lainnya di dalam suatu jurnal ilmiah,” kata Erik.

Namun, pentingnya publikasi itu seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Oleh karenanya, perlu strategi untuk meningkatkan kemampuan ihwal kepenulisan ilmiah dan pengelolaan jurnal ilmiah. Sebab, selain dari kualitas artikel, akreditasi jurnal pun mensyaratkan beberapa kualifikasi. Terlebih, saat ini keberadaan jurnal yang dikelola kementerian/ lembaga ditangani oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Hal itu berdasarkan Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Regulasi itu mengatur, proses



akreditasi Jurnal Ilmiah di Indonesia di bawah wewenang Kemristekdikti lewat layanan Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) dengan pengindeks Sinta (*Science and Technology Index*).

Dengan sistem ini, mengharuskan proses pengajuan jurnal dilakukan secara daring pun dengan pengelolaannya. Meski sebenarnya, saat ditangani Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jurnal kementerian/ lembaga sudah diimbau agar beralih dari cetak ke elektronik. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI No 3 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Adapun pengelolaan jurnal elektronik tersebut dapat didukung dengan layanan *Open Journal System* (OJS).

Di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 2 setelah Malaysia ihwal publikasi jurnal. Sedangkan jumlah jurnal yang terindeks di Sinta per April 2019 sebanyak 2333 yang tersebar di peringkat Sinta 1 sampai 6. Jumlah sebaran itu sebagai berikut, Sinta 1: 53, Sinta 2: 608, Sinta 3: 489, Sinta 4: 644, Sinta 5: 441, dan Sinta 6: 98. Erik berharap, dengan seminar ini dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas jurnal. “Dengan kegiatan ini jurnal-jurnal yang kita kelola bisa meningkat secara kualitas maupun akreditasinya hingga internasional,” harap Erik.

Langkah akreditasi

Hadir sebagai narasumber, pengelola jurnal ilmiah Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Moh Ilham A Hamudy menjelaskan, beberapa kualifikasi akreditasi jurnal ilmiah. Ia menyebutkan, jurnal yang akan diajukan akreditasi diwajibkan memiliki ISSN, baik berupa elektronik pun cetak. Selain itu, mencantumkan persyaratan publikasi pada laman *website* jurnal. Jurnal juga harus bersifat ilmiah, dengan penerbitan paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Pengelola jurnal yang hendak mengajukan akreditasi perlu memerhatikan jumlah artikel yang terbit, karena setiap penerbitan paling sedikit memuat 5 artikel.

Tidak hanya itu, beberapa syarat lainnya juga perlu dipenuhi, seperti adanya *author*, editor, *section editor*, editor ba-

hasa, *layout editor*, *proof reader*, dan mitra bestari. Setiap pengelola jurnal diwajibkan memiliki gaya selingkung naskah, seperti gaya bahasa, struktur penulisan dan beberapa syarat lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Selain itu, untuk menunjang instalasi OJS diperlukan sistem pendukung seperti, *Hypertext Preprocessor* (sebagai bahasa skrip yang dapat dimasukan pada HTML), *web server*, dan sistem lainnya. Ilham menyebutkan, beberapa rincian bobot penilaian akreditasi jurnal ilmiah yang perlu diperhatikan. “Penamaan terbitan berkala ilmiah 3 poin, kelembagaan penerbit 4 poin, penyuntingan 17 poin, substansi artikel 39 poin, substansi artikel 12 poin, penampilan 12 poin, keberkelaan 6 poin, dan penyebaran 11 poin,” kata Ilham.

Ilham menambahkan, pengelolaan jurnal yang baik perlu didukung oleh keberadaan SDM andal. Beberapa susunan SDM itu seperti ketua dewan redaksi, tenaga teknologi informasi yang menyiapkan administrasi pengelolaan jurnal, dan penyunting pelaksana, dewan redaksi, mitra bestari, *layout editor*, *copy editor*, dan *proof reader*. Semua komponen itu wajib diperhatikan jika hendak menghadirkan jurnal yang berkualitas.

Sementara, Respati Wikantiyoso akademisi Universitas Merdeka Malang (UMM) yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan, klasifikasi jurnal di Indonesia terdiri dari empat kelompok, yaitu jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional terakreditasi.

Ihwal ISSN, lanjut Respati, jurnal yang baru dan belum mendapat ISSN hendak terbit secara elektronik cukup dengan memiliki 1 nomor ISSN. Sedangkan jurnal yang sudah lama terbit, dan telah mempunyai ISSN cetak diharuskan mengajukan kembali ke versi elektronik. “Dengan cara mengunjungi laman issn.pdi.lipi.go.id,” katanya.

■ MUJAENI

Solusi Plastik Berbayar

Perkembangan kehidupan manusia di zaman globalisasi saat ini, manusia masih berpola hidup konsumisme, sekulerisme, legalisme, infantilisme dan determinisme. Manusia hidup semakin mengutamakan kepuasan berdasarkan keinginan (*wants*) yang tak terbatas nilainya dibandingkan dengan kebutuhan (*needs*). Mentalitas hidup seperti ini secara tidak sadar menimbulkan krisis antropologi, krisis ekologi dan krisis spiritual dalam setiap sendi kehidupan di masyarakat. Budaya modern kontemporer metafisika *Whitehead* menekankan “kemajuan peradaban manusia menjadi mungkin karena arahan konsep-konsep metafisika yang melandasi praksis kehidupan”, pemikiran ini perlu ditekankan sebagai dasar berpikir etika lingkungan hidup manusia.

Pernyataan di atas sesuai dengan pro kontra yang terjadi di Jayapura pada saat Walikota Jayapura mengeluarkan Perda No 1 Tahun 2019 tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai upaya mengatasi krisis ekologi. Ia mengimbau agar para pembeli membawa kantong ramah lingkungan dan bisa digunakan secara berulang, sehingga diharapkan sampah plastik dapat berkurang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sampah di lautan.

Kebijakan Pemkot Jayapura dinilai tepat, pasalnya data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan sampah plastik Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sekira 3,2 juta ton di antaranya dibuang di laut. Adapun kantong plastik yang terbuang di lingkungan mencapai 10 miliar lembar/tahun atau 85.000 ton. Isu limbah plastik tersebut menjadi sorotan saat pertemuan Forum Ekonomi Dunia (di Davos, Swiss, akhir Januari lalu). Indonesia menempati peringkat kedua setelah China dalam sumbangan sampah plastik.

Dengan demikian untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, terhitung mulai 1 Maret 2019, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kantong plastik dikenakan biaya minimal Rp 200,-/kantong. Namun demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Jika kita merujuk kebijakan skala nasional, peraturan pem-



www.liveabout.com

batasan penggunaan plastik memang belum dimiliki Indonesia meski pemerintah sudah pernah melakukan uji coba kebijakan ini pada 2016. Pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menggelar uji coba kantong plastik berbayar di berbagai daerah, terutama kota-kota besar. Dalam uji coba itu, konsumen diimbau membawa tas belanja sendiri.

Namun, langkah itu terhenti pada tahap uji coba. Selain itu juga, meski secara nasional belum ada, namun sejumlah daerah telah menerbitkan peraturan khusus tersebut. Tercatat ada lima kabupaten/kota yang sudah menjalankan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu

Kabupaten Bandung, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Kota Denpasar serta Kota Jayapura.

Kota Banjarmasin menjadi pelopor karena sudah memberlakukan kebijakan itu per 1 Juni 2016. Kemudian pada Juni 2018, Kota Balikpapan dan Kabupaten Badung mengikuti langkah Kota Banjarmasin. Kemudian disusul oleh Kota Bogor dan Denpasar serta Jayapura, masing-masing pada Desember 2018 serta Januari 2019.

Sedangkan pada tingkat provinsi, baru Provinsi Bali yang telah mengeluarkan peraturan khusus untuk membatasi penggunaan plastik. Pergub Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai telah terbit dan diterapkan sejak Januari 2019. Pergub ini menjelaskan tiga bahan mengandung bahan dasar plastik yang dilarang yaitu kantong plastik, polysterina (*styrofoam*), dan sedotan plastik.

Kebijakan pelarangan kantong plastik berbayar ternyata disikapi berbeda oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pihak pemerintah daerah/kota. Sebagai contoh, aturan kantong plastik berbayar oleh Aprindo tidak berlaku di Kota Bogor. Hal ini terjadi karena sebelumnya sudah ada Perwalkot Bogor No 61 Tahun 2018 tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan dan Toko Ritel. Jika dibandingkan dengan kebijakan dari Aprindo, maka hal itu tentunya suatu kemunduran, sehingga terkesan, ini hanya kebijakan sepihak dari Aprindo tanpa dikomunikasikan dengan pemerintah dan dikonsultasikan dengan legislatif yang notabene wakil rakyat.

Kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana kantong plastik berbayar harus transparan dan jelas penggunaannya. Saat ini draf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan kantong plastik masih dalam proses pembahasan. Terdapat dua Permen LHK yang dikeluarkan demi mengurangi sampah plastik. Pertama, yang memuat peta jalan bagi produsen untuk membatasi sampah plastik. Kedua, Permen LHK pengurangan penggunaan kantong plastik yang ditujukan untuk masyarakat.

Peraturan tersebut menargetkan pengurangan sampah plastik yang diproduksi pengusaha pada bidang manufaktur, ritel (supermarket, pasar), dan penyedia jasa makanan (restoran, kafe). Produsen diminta membuat peta jalan atau perencanaan untuk mendesain ulang kemasan dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Selain itu juga perlu membuat perencanaan melakukan penarikan kembali kemasan yang telah digunakan.

Alternatif lainnya adalah tetap menggunakan kantong belanja, tetapi yang mudah terurai seperti yang berasal dari nabati. Permen tersebut akan membatasi masa pembuatan peta jalan para produsen selama 10 tahun, yang berarti setiap pengusaha manufaktur, ritel, dan jasa makanan harus merencanakan langkah-langkah pengurangan sampah plastik hingga 10 tahun ke depan secara berkelanjutan. Sesuai peraturan yang lebih tegas dan peta jalan yang detail, komitmen semua pemangku kepentingan diharapkan sejalan dengan keinginan mengurangi sampah plastik. Asosiasi harus progresif menggunakan kantong plastik ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) sesuai dengan rekomendasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemerintah, pelaku usaha, produsen dan konsumen harus bersinergi mengurangi penggunaan kantong plastik. Pengurangan kantong plastik semestinya menjadi gerakan nasional pemerintah pusat, sehingga tidak terfragmentasi secara sporadis di masing-masing daerah dan berjalan sendiri tanpa koordinasi. Sejauh ini belum adanya keseriusan dalam penanganan sampah plastik. Kebijakan kantong plastik berbayar tidaklah efektif, pasalnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kantong plastik.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat digiring untuk menerapkan pola lama dengan tanpa menggunakan kantong plastik, sementara masyarakat modern masih merasa memerlukan plastik untuk berbelanja sesuai kebutuhannya tanpa dibatasi dengan kemampuan membawanya tersebut. Untuk itu, perlu solusi alternatif guna memediasi kebutuhan mas-

yarakat terkait tas belanja yang nyaman dan berbasis budaya lokal di Papua secara umum khususnya di Kota Jayapura.

Terkait hal itu, pemerintah bisa melakukan beberapa hal, pertama, Pemkot Jayapura perlu menambahkan kebijakannya dengan menggunakan tas atau “NOKEN” sebagai ciri khas Papua. Secara ekonomi penggunaan noken dapat mendorong kerajinan noken tersebut berkembang sebagai industri kreatif atau pengembangan UMKM di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Kedua, menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan Noken Papua sebagai alternatif di Swalayan. Hal ini juga menjadi jati diri masyarakat di Jayapura untuk melestarikan produk lokal dalam setiap sendi kehidupannya. Ketiga, mendorong pengembangan pembuatan noken, sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk memproduksi dalam jumlah besar, selain sebagai Noken untuk tas belanja, juga dapat diproduksi untuk jenis barang lainnya. Bahan baku pembuatan Noken, terdiri dari bahan kayu dan nilon. Sehingga perlu negosiasi harga kepada komunitas yang memproduksi agar dijual dengan harga yang sesuai dan efisien.

Keempat, menyosialisasikan kepada generasi muda untuk pengembangannya di masa depan. Hal ini dapat dimulai dengan pengenalan di tingkat sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama. Selanjutnya, pada sekolah tingkat menengah diajarkan kerajinan tangan bersama para mahasiswa dan pemuda untuk berkreasi sehingga dapat menjadi alternatif profesi sebagai pengusaha selain sebagai ASN yang semakin sulit tingkat persaingannya.

Dengan demikian, konsep Perda No 1 Tahun 2019 yang telah diterbitkan tersebut, dapat diterima semua pihak sebagai solusi untuk mengurangi volume sampah yang semakin tak terkendali tersebut sebagai kebijakan hilir yang perlu dikembangkan secara optimal. Selain kebijakan hilir tersebut, perlu juga memberikan kebijakan hulu, yakni sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan, agar masyarakat semakin sadar tentang kebersihan secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan gerakan nasional revolusi mental yang sedang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo, tentang tiga pilar perubahan yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Sebagai aplikasinya dijabarkan dalam 5 program antara lain: Indonesia bersih, Indonesia melayani, Indonesia tertib, Indonesia mandiri dan Indonesia bersatu. Harapannya di Tahun Emas Indonesia 2045, Indonesia dapat menjadi bangsa maju tetapi tetap mempertahankan negara NKRI.

Septevanus Rantetoding

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Cenderawasih, Jayapura



Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota kembali ramai diperbincangkan. Dalam

keterangannya, disebutkan beberapa pertimbangan dasar munculnya kembali wacana tersebut, khususnya terkait dengan daya dukung dan daya tampung DKI Jakarta yang semakin terbatas. Massifnya bencana banjir dan kemacetan, memang menjadi fakta yang tak dapat

dikesampingkan. Dalam hitungan Bappenas saja, kerugian ekonomi yang muncul akibat kemacetan di Jakarta sudah mencapai kisaran Rp100 triliun. Sedangkan bencana banjir yang rajin menyambangi, telah menyebabkan penurunan muka air tanah setiap tahunnya, sementara permukaan air laut justru meningkat 4-6 cm akibat dampak perubahan iklim. Di sisi lain, dalam kacamata pemerintah dibutuhkan adanya sebuah ibu kota negara yang memiliki jati diri dan identitas, *green*, *smart* dan *beautiful*. Dengan demikian wacana pemindahan ini menjadi sangat relevan.

Secara teori, ada beberapa alasan memindahkan ibu kota negara. Pertama, didasari oleh motif memisahkan aktivitas politik dan ekonomi. Ini yang dilakukan oleh Brasil, Belanda, AS, Australia dan India. Kondisi lainnya yang memaksa ibu kota dipindahkan adalah munculnya invasi dari negara lain sebagai dasar dinyatakan kondisi darurat. Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan, pernah menjalankan skema pemindahan ini. Berikutnya, memindahkan ibu kota karena pemerintah memang menginginkan terciptanya sebuah kota pemerintahan baru, seperti yang ditempuh Malaysia ketika memindahkan aktivitas kementerian dari Kuala Lumpur ke Putera Jaya.

Mendasarkan kepada analisis komparasi antar negara, banyak contoh keberhasilan proses pemindahan ibu kota. Beberapa negara lainnya khususnya di kawasan Afrika juga menunjukkan contoh gagal proses ini. Merujuk fakta tersebut, negara-negara yang masuk dalam kategori sukses adalah negara yang mendasarkan kepada motif pemisahan aktivitas politik dan ekonomi. Beberapa indikator kesuksesan antara lain: terbentuknya ekosistem fisik pemerintahan yang lebih baik, keseimbangan perkembangan sosial/ekonomi/politik antar kawasan serta kesinambungan keunggulan kompetitif dari negara/bangsa bersangkutan secara global.



Tak salah jika pemerintah kemudian memfokuskan diri dalam proses memisahkan ibu kota dengan pusat aktivitas bisnis. Dan proses ini dipastikan akan dilaksanakan secara gradual dengan menjaga proses transisi keseluruhan antara sistem sosial, ekonomi dan pranata hukum.

Pemilihan calon-calon lokasi ibu kota baru juga mendasarkan kepada analisis manfaat dan biaya secara komprehensif. Jangan sampai biaya besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menimbulkan dampak apapun serta menimbulkan potensi masalah berkelanjutan dikemudian harinya.

Menyelamatkan ibu kota

Dari sisi personal, penulis merasa bahwa ide pemindahan ini merupakan terobosan baru yang bersifat positif. Aspek pemerataan pembangunan antar-kawasan di Indonesia menjadi pertimbangan utama, khususnya kontribusi PDB Nasional. Hingga 2016 saja, Pulau Jawa masih mendominasi sumbangan PDB Nasional hingga 58,5% disusul Sumatera (22,0%), Bali dan Nusa (13,1%), Kalimantan (7,9%), Sulawesi (6%) dan terakhir Papua 2,5%. Padahal di saat bersamaan, Jawa dan Sumatera menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan yang pelik. Per September 2016, tingkat pengangguran di Jawa mencapai 5,9% sementara Sumatera sekitar 5,2%. Untuk tingkat kemiskinan di Jawa sudah sekitar 10,1% sementara Sumatera sebesar 11,1% salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Variabel berikutnya adalah upaya menyelamatkan DKI Jakarta itu sendiri. Sudah banyak riset yang menyebutkan daya dukung dan daya tampung DKI Jakarta sudah berada dalam ambang batas mengkhawatirkan. Contoh terbaru, hasil situs kontrol kualitas udara/air visual baru saja merilis daftar kota-kota terpolusi di Asia Tenggara. Hasilnya relatif mencengangkan ketika Jakarta menjadi pemuncak di antara kota-kota besar lainnya. Jakarta menjadi kota yang paling terpolusi di Asia Tenggara dengan total skor 45,3 disusul oleh Kota Hanoi di Vietnam dengan skor 40,8. Seterusnya berurutan ditempati oleh kota-kota di Thailand seperti Samut Rakhon, Nakchon Ratchasima, Tha Bo dan Saraburi secara

berurutan dan dilanjut oleh Meycauyan City, Filipina di peringkat ketujuh. Meski poin 0-50 sebetulnya masih dianggap relatif baik, namun kualitas udara aktual di Jakarta sudah masuk kategori merah yang artinya kondisi udara yang tak sehat dan berbahaya bagi kesehatan jantung serta paru-paru masyarakatnya.

Kompleksitas kemacetan di ibu kota memang nyata. Beberapa pengamat bahkan memprediksi Jakarta akan dilanda kelumpuhan transportasi di tahun 2020, jika tidak segera diambil kebijakan yang revolusioner. Prediksi ini cukup beralasan menengok angka kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya secara drastis. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, pertambahan jumlah kendaraan bermotor pribadi setiap harinya mencapai 6 ribu unit. Dengan rasio jalan hanya 7% dari total luas daratan, tak heran jika masyarakat harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk rute yang sebetulnya relatif pendek. Maraknya fenomena *parking on street* menambah keruwetan khususnya di hari dan jam tertentu.

Fakta-fakta tersebut sebetulnya dipahami oleh Pemda DKI Jakarta. Berbagai kebijakan sudah digulirkan, dimulai ketika diluncurkan sistem transportasi massal Busway-Trans Jakarta. Sembari merampungkan target koridor, penyelesaian berbagai jalan layang non-tol pun terus digeber. Sinerji dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian MRT/LRT menunjukkan meningkatnya level koordinasi. Pasca penghapusan kebijakan *three in one*, Pemda DKI Jakarta lanjut menerapkan kebijakan pembatasan nomor kendaraan ganjil genap (GANGEN). Konsep lama namun tidak pernah terealisasi dengan berbagai kendala dan alasan. Meski terlambat, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut efisien dan efektif. Secara teknis, kebijakan GANGEN akan mereduksi populasi kendaraan bermotor yang melintas di ibukota hingga 50%. Itu artinya sama dengan potensi pengurangan angka kemacetan yang signifikan.

Dengan pengaturan GANGEN, misalnya merujuk jumlah kendaraan bermotor tahun 2014 yang mencapai 17,5 juta unit, kendaraan bermotor yang meroda setiap harinya dibatasi 8,7 juta unit. Memang masih terbatas di beberapa ruas jalan tertentu, namun demikian benefit yang dihasilkan makin menggiurkan ketika dikaitkan dengan menurunnya biaya-biaya sosial kesehatan yang kerap muncul sebagai dampak kemacetan. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut juga menjawab *statement* Bank Dunia yang menyinggung kemacetan di DKI Jakarta menghilangkan potensi

produktivitas penduduk hingga Rp39,9 triliun dalam setahun.

Sayangnya, dalam perjalanan muncul beberapa wacana bertolak belakang dengan semangat mengatasi kemacetan tersebut. Pertama terkait dengan munculnya beleid Peraturan OJK No 35/POJK.05/2018 yang memberikan peluang penurunan uang muka (*down payment/DP*) pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 0%, untuk perusahaan *multifinance* yang mencatat rasio kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) di bawah 1%. Dalam keterangannya, penurunan DP menjadi 0% ditujukan untuk menggairahkan industri otomotif sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar.

Berikutnya adalah usulan penghapusan pajak kendaraan. Penulis yakin pajak kendaraan biasanya berkorelasi dengan kondisi kemacetan yang terjadi di daerah. Region yang relatif macet biasanya memiliki penerimaan pajak yang besar sebagai akumulasi jumlah kendaraan yang beredar, begitu pula sebaliknya. Sayangnya, ketiadaan kewajiban *ear marking* membuat hasil penerimaan pajak kendaraan belum optimal digunakan untuk mengembangkan sektor transportasi publik atau minimal menjadi dana untuk mengatasi dampak melebaknya kepemilikan kendaraan pribadi.

Ketika semua aktivitas pengembangan transportasi publik membutuhkan anggaran yang sangat besar, di sinilah peran dari PAD dengan kontributor utama pajak kendaraan, menjadi sangat vital. Dapat dibayangkan jika penghapusan pajak kendaraan betul-betul dijalankan maka APBD Provinsi tidak lagi memiliki kapasitas mengatasi kemacetan secara memadai. Yang terjadi justru kemacetan akan terus meningkat serta menimbulkan dampak lanjutan yang semakin akut. Kriminalitas, pengangguran serta berbagai penyakit sosial masyarakat lainnya akan bersatu padu menimbulkan muka kota yang semakin suram.

Melihat keseluruhan pembahasan di atas, penulis yakin, ide pemindahan ibu kota adalah gagasan yang perlu didukung meski bukan harga mati. Dibutuhkan konsep pemikiran dan *road map* pembahasan yang transparan dengan mempertimbangkan analisis manfaat dan biaya yang terbaik. Diperlukan juga akomodasi berbagai sifat dan keragaman karakteristik pemangku kepentingan dengan tetap mengedepankan sistem sosial, ekonomi, pranata hukum dan sistem budaya yang melingkupinya. Di atas keseluruhan kondisi tersebut, hal yang paling utama adalah hilangkan seluruh ego dan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sematkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Joko Tri Haryanto

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan-RI



Oposisi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu 85.607.362 suara. Sedangkan, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional tersebut terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

Keputusan KPU itu serta-merta menjadikan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bak gula di tengah kerumunan semut. Bagaimana tidak, kekuasaan yang begitu besar dan sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi bakal pasti ada di tangan mereka berdua. Oleh karenanya, tidak heran jika para politisi dan partai politik, yang merupakan kawan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, semakin rapat. Tidak hanya itu, partai-partai politik yang selama ini menjadi lawan politik keduanya pun mulai menggelayut, berharap diajak berkoalisi.

Sebut saja, misalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini begitu getol mengkritisi Jokowi dan berada dalam barisan Prabowo-Sandiaga, kini semakin manis di depan kubu Jokowi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan sudah empat kali menghadiri pertemuan bersama Jokowi. Meski ia berdalih itu adalah pertemuan biasa di antara petinggi negara (maklum, Zulkifli adalah Ketua MPR), sukar untuk menghindari kesan politis di dalamnya.

Belakangan, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun juga merapat ke Jokowi. Terakhir ia bertemu secara khusus dengan Jokowi di Istana Bogor pada minggu ketiga Mei lalu. AHY mengatakan, dirinya adalah jembatan komunikasi politik antara Jokowi dan Soesilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga ayahnya. Pada hari yang sama dengan pertemuan AHY-Jokowi, Zulkifli Hasan ternyata juga kembali bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor.

Adalah mustahil pertemuan keduanya cuma sekadar silaturahmi biasa, bahasa guyonnya "pasti ada undang di atas bakwan". Secara politik, komunikasi yang dibangun para politisi itu adalah sah-sah saja. Apalagi jika dibungkus dengan alasan suci ingin mendinginkan suhu politik yang memang sangat panas, setidaknya dalam dua bulan terakhir ini. Tetapi, tidak bisa dibantah jika komunikasi itu adalah bentuk penjajakan bagi-bagi kue kekuasaan.

Namun, sejatinya, hal itu tidaklah sehat secara praktik

demokrasi yang substantif. Andai bagi-bagi kekuasaan itu benar terjadi, maka bisa dipastikan Jokowi-Ma'ruf Amin dan para partai pendukung benar-benar menguasai lembaga eksekutif dan legislatif. Praktis, hanya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar pemerintahan. Impaknya, tidak ada oposisi yang konstruktif dalam politik Indonesia. Padahal, kekuasaan eksekutif itu cenderung berpotensi menjadi birokratis dan tanpa pengawalan sebuah kekuatan oposisi akan cenderung menjadi stagnan.

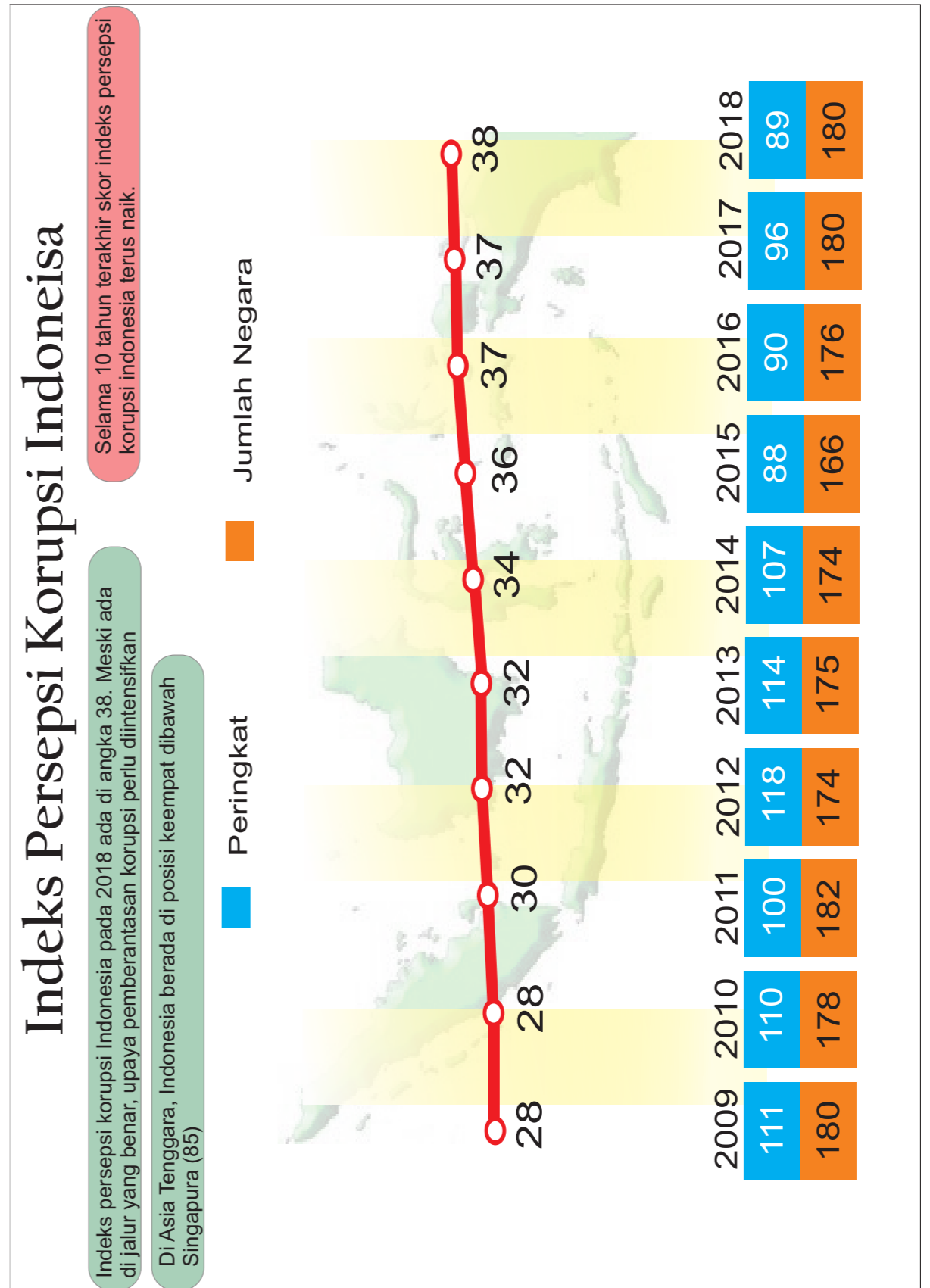
Dalam konteks ini harus dipahami, demokrasi sejati selalu bertumpu atas konsensus dan disensus. Seperti yang ditegaskan oleh filsuf Slovenia Slavoj Zizek dalam tesisnya sebagaimana termaktub dalam bukunya *the Essential Zizek* (2009) mengenai asas logika perbedaan minimal yang senantiasa menghadirkan sudut pandang baru pada setiap fase kehidupan. Menurut Zizek, dalam tradisi demokrasi modern, pembatasan kuasa negara perlu dimanifestasikan dalam sebuah sistem yang memungkinkan kekuatan oposisi berperan untuk memantau kualitas bekerjanya eksekusi kebijakan.

Oleh karenanya, kehadiran oposisi dalam sistem demokrasi adalah upaya subjek untuk mengaktualisasikan makna demokrasi hakiki yang salah satunya ditandai oleh sebuah relasi yang bergerak antara konsensus dan disensus, *checks and balances*, serta harmoni dan disharmoni. Terlepas dari hal itu sebuah kuasa akan menjadi totaliter dan absolut.

Lagi pula, tidak ada satu pun UU yang mengharamkan oposisi, karena disadari bahwa salah satu komponen negara demokrasi yang membedakannya dengan negara non-demokrasi adalah eksisnya unsur oposisi. Alasannya sangat logis, karena oposisi dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang jalan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara, sehingga pemerintahan dan negara dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam keadaan *abuse of power*.

Untuk itu, mestinya Jokowi-Ma'ruf Amin tidak perlu menggoda apalagi mengajak lawan politik dalam pemilu lalu untuk bergabung bersama. Kursi parlemen yang dikuasai mereka berdua sudah lebih dari 50 persen. PD dan PAN juga tidak perlu merengek-rengok minta dimasukkan dalam gerbong pemenang pilpres. Harusnya mereka tahu diri, sebagai lawan politik Jokowi-Ma'ruf adalah tidak etis menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka tidak berkeringat. Biarlah polarisasi antara kubu pemenang dan kubu yang kalah tetap berada dalam koridor diametral politik yang sehat. Kecuali, kedua partai politik itu sudah tidak punya malu lagi dan semata-mata mengejar kekuasaan saja.

■ MOH. ILHAM A. HAMUDY



SUMBER: HARIAN KOMPAS
INFOGRAFIS: ARDI

CALL FOR PAPERS



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

JURNAL BINA PRAJA

THEME

**HOME AFFAIRS
GOVERNANCE**

**MAY &
NOVEMBER**

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration



Submit
a scientific paper
on the theme of
Home Affairs Governance
to jurnal.kemendagri.go.id

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see jurnal.kemendagri.go.id | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.



Accredited No 21/E/KPT/2018

FOR MORE INFORMATIONS CONTACT US

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
jurnalbinapraja@yahoo.com